

DARI KISAH
HINGGA MONUMEN SEJARAH:
PALAGAN JOMERTO JEMBER

NAWIYANTO
SRI ANA HANDAYANI
DEWI SALINDRI

Diterbitkan oleh **Best Publisher**
Bekerja sama dengan
Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Jember
2018



DARI KISAH HINGGA MONUMEN SEJARAH: PALAGAN JOMERTO JEMBER

Penulis : Nawiyanto
Sri Ana Handayani
Dewi Salindri
Penyunting : Nawiyanto
Perancang Sampul : Mas Ahenk
Penata Isi : Mas Amir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Cetakan I, Februari 2018

Best Publisher

Gedung Galangpress Center
Jln. Mawar Tengah No. 72
Baciro Yogyakarta 55225
Tel. (0274) 554985 Faks. (0274) 556086
Email: penerbit.best@gmail.com

Bekerja Sama dengan:

Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Jember

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Nawiyanto, dkk

DARI KISAH HINGGA MONUMEN SEJARAH:
PALAGAN JOMERTO JEMBER
Cet. I, Februari 2018; 150 x 230 mm; 149 hlm.
ISBN: 978-602-8620-73-4

DAFTAR ISI

PRAKATA	— 5
KATA SAMBUTAN	— 7
BAB 1 PENDAHULUAN	— 9
A. LATAR BELAKANG	— 9
B. PERMASALAHAN	— 14
C. METODOLOGI	— 15
D. TUJUAN STUDI	— 19
E. RUANG LINGKUP	— 21
F. SISTEMATIKA STUDI	— 22
BAB 2 PENDUDUKAN JEPANG	— 25
A. PENDUDUKAN JEPANG DALAM KONTEKS PERJUANGAN NASIONAL	— 25
B. KARESIDENAN BESUKI PADA MASA PEMERINTAHAN JEPANG	— 40
BAB 3 DARI PROKLAMASI HINGGA PERISTIWA MADIUN	— 43
A. KONDISI POLITIK AWAL KEMERDEKAAN	— 44
B. MENUJU PEMBERONTAKAN KOMUNIS DI MADIUN	— 57

- C. MOBILE BRIGADE POLISI DAN PENUMPASAN PEMBERONTAKAN KOMUNIS — 69

BAB 4 LONG MARCH DARI PONOROGO KE BESUKI — 83

- A. KEMBALI KE KANTONG GERILYA — 83
- B. JALANNYA PERTEMPURAN JOMERTO — 90
- C. AKIBAT PERTEMPURAN — 97

BAB 5 PALAGAN JOMERTO DALAM NARASI DAN MONUMEN — 105

- A. PALAGAN JOMERTO DALAM KONTEKS PERJUANGAN NASIONAL
- B. PENGARUH PALAGAN JOMERTO BAGI PERJUANGAN — 105
- C. DESKRIPSI FISIK MONUMEN — 110
- D. ARTI LAMBANG — 114
- E. MAKSUD DAN TUJUAN PEMBANGUNAN MONUMEN — 117

BAB 6 KESIMPULAN — 121

DAFTAR PUSTAKA — 125

GLOSAIUM — 135

INDEKS — 141

BIODATA PENULIS — 145

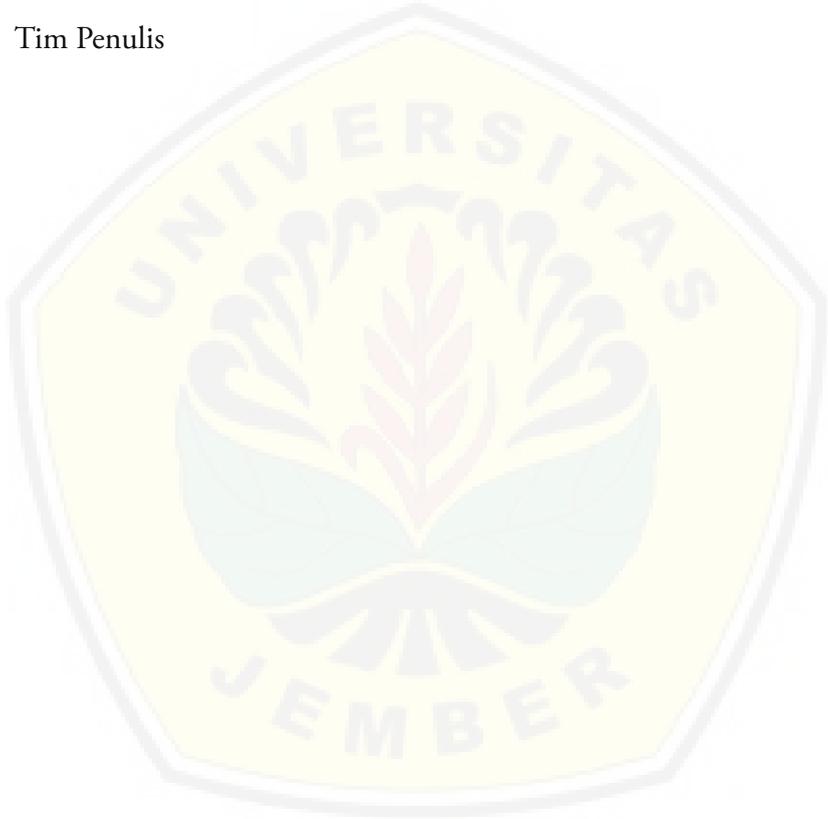
PRAKATA

Penerbitan buku ini dirasa penting dalam rangka menambah wawasan mengenai salah satu fragmen sejarah perjuangan bangsa melawan kekuatan kolonial Belanda yang berlangsung di wilayah Jember. Berbagai publikasi mengenai aspek-aspek ekonomi wilayah Jember khususnya sektor perkebunan telah banyak dilakukan, misalnya oleh Mackie, Sugijanto Padmo, Nawiyanto. Namun, orang tidak banyak tahu tentang Jember dalam konteks proses dekolonisasi dan perjuangan bersenjata dalam mewujudkan kemerdekaan. Kehadiran buku ini diharapkan dapat ikut mengisi langkanya publikasi dan menjadi dokumentasi sejarah perjuangan bangsa di Jember.

Dengan terbitnya buku ini, kami mengucapkan terima kasih kepada kepada Kantor Dinas Pelestarian Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional Jawa Timur yang telah memberikan dana penelitian, yang laporannya dijadikan pijakan untuk menghadirkan buku ini. Tanpa dana yang mereka sediakan buku ini pastilah masih dalam angan-angan. Kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya naskah yang menjadi bahan buku ini. Kami juga berterima kasih kepada Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, Dr. Retno Winarni, M. Hum., yang telah memberi kata sambutan. Kami juga berterimakasih kepada pihak Penerbit Galangpress di Yogyakarta yang

telah membantu proses penerbitan buku ini. Terima kasih disampaikan pula kepada M. Khoirudin (mahasiswa sejarah angkatan 2013) atas bantuan dan kerjasamanya. Semoga buku ini memberi manfaat dalam rangka membangun kebanggaan sebagai bangsa pejuang dan memberi inspirasi untuk tetap menghidupi semangat perjuangan dan nilai-nilai pengorbanan dalam rangka menjawab tantangan jaman.

Tim Penulis



KATA SAMBUTAN

Sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Budaya, saya menyambut gembira penerbitan buku berjudul *Dari Kisah hingga Monumen Sejarah: Palagan Jomerto Jember* yang ditulis oleh Nawiyanto, Sri Ana Handayani, dan Dewi Salindri. Saya mengenal baik ketiga penulis, sebagai orang yang mempunyai komitmen tinggi dalam bidang akademis. Buku ini merupakan salah satu bukti konkret komitmen tersebut. Buku ini juga bukan yang pertama dan satu-satunya dari penulis karena karya-karya lain sudah mereka publikasikan sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa keduanya aktif melakukan penelitian dan menyebarkan gagasan-gagasan sejarah yang mereka gali melalui publikasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas profesi mereka.

Buku ini menyajikan bahasan mengenai Palagan Jomerto, sebuah episode sejarah di tingkat lokal Jember. Dari akar-akar sejarah peristiwa Palagan Jomerto buku ini lantas membahas monumen secara fisik dengan simbol-simbol dan maknanya. Ditunjukkan bahwa Palagan Jomerto mempunyai kaitan genetis dengan proklamasi kemerdekaan, pemberontakan komunis Madiun, dan *long march* pasukan Mobile Brigade Polisi. Pembahasan selanjutnya masuk pada narasi peristiwa Palagan Jomerton, akibat yang ditimbulkan dan implikasinya bagi perjuangan lokal dan nasional melawan kolonialisme.

Digital Repository Universitas Jember

Sebagai dokumentasi sejarah, buku ini menyimpan kisah sejarah di Jember. Tanpa dokumentasi sejarah, peristiwa-peristiwa penting akan tenggelam menjadi bagian dari misteri masa lampau yang tidak akan pernah terungkap dan akhirnya dilupakan. Apalagi harus diakui bahwa generasi akan selalu berganti. Buku ini membantu menghindarkan penyakit untuk tidak mudah melupakan perjuangan bangsa dan mewariskan "semangat" yang menjadi esensinya dalam mengarungi sejarah berbangsa dan bernegara.

Wakil Dekan I

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember

Dr. Retno Winarni, M.Hum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjuangan merupakan kisah yang secara mencolok mewarnai perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sejak kekuatan kolonial hadir dan menanamkan pengaruh dan kekuasaannya di Nusantara melalui ekspansi territorial dan eksploitasi ekonomi, sejumlah perlawanan terhadap kolonialisme ikut mengiringinya. Perlawanan terhadap kolonialisme Barat khususnya Belanda muncul silih-berganti di berbagai tempat baik dalam skala besar maupun skala kecil. Perlawanan dalam skala besar dilakukan misalnya oleh Pengeran Diponegoro, Ktut Jelantik, Tuanku Imam Bonjol, Si Singamangaraja, Teuku Umar, Antasari, Hassanudin, Pattimura.¹

Dalam skala yang lebih kecil perjuangan melawan kolonialisme terungkap dalam gerakan sosial lokal yang bersifat endemis di Hindia Belanda. Gerakan sosial ini terutama muncul di daerah pedesaan yang menjadi sentra eksploitasi ekonomi kekuasaan kolonial yang hadir dalam perusahaan perkebunan yang dikelola pemerintah (Sistem Tanam Paksa) maupun perusahaan perkebunan swasta barat. Bentuk gerakan sosial tersebut cukup bervariasi misalnya berupa gerakan anti pemerasan, gerakan mesianisme-millenarianisme, gerakan nativisme dan revivalisme.

¹ Mengenai berbagai perlawanan di daerah terhadap kolonialisme Belanda lihat, Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, *Sejarah Nasional Indonesia IV* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 147 – 277.

Sebuah gerakan sosial dapat menampilkan diri dengan mengambil salah satu bentuk maupun merupakan campuran dari berbagai bentuk tersebut.²

Berbagai bentuk perlawanan entah dalam skala besar maupun kecil merupakan bukti-bukti konkret bahwa perjuangan merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari sejarah perjalanan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Hal ini sering diajukan sebagai landasan argumentasi untuk mendukung pendirian yang menyatakan bangsa Indonesia sebagai bangsa pejuang. Sebagai bangsa pejuang dapat dimengerti jika Indonesia telah melahirkan ribuan pahlawan yang dengan gigih dan tulus ikhlas rela berkorban jiwa, raga, dan harta demi membela kehormatan Indonesia sebagai suatu bangsa maupun negara yang berdaulat. Sebagai bangsa yang menghargai jasa pejuang, Indonesia juga memperingati hari pahlawan, yang peringatannya jatuh pada tanggal 10 November.

Pemberian karakter sebagai suatu bangsa yang mempunyai mentalitas dan semangat pejuang sebenarnya tidaklah terlalu berlebihan. Mentalitas dan semangat demikian tidaklah pupus sekalipun proklamasi kemerdekaan sudah dikumandangkan. Peristiwa proklamasi tidaklah serta-merta mengakhiri mentalitas sebagai bangsa pejuang. Justru sebaliknya, proklamasi bahkan semakin meneguhkan serta menuntut komitmen dan tanggung jawab lebih besar dan dengan pengorbanan yang lebih besar pula untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman kembalinya kekuasaan kolonial yang tidak segan-segan menggunakan kekuatan militeristik untuk mendukung kepentingannya.

Seperti telah dicatat dalam sejarah, proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia telah disusul dengan serangkaian pertempuran antara pihak Republik Indonesia dengan Belanda yang juga melibatkan tentara

2 Pembahasan yang sangat menarik mengenai berbagai gerakan protes sosial di pedesaan Jawa, lihat Sartono Kartodirdjo, *Protest Movements in Rural Java: a Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Twentieth Centuries* (Singapore: Oxford University Press, 1973).

Sekutu. Pertempuran terjadi karena adanya keinginan Belanda dengan memanfaatkan bantuan Sekutu memulihkan status-quo kolonial seperti sebelum kedatangan penduduk Jepang. Keinginan tersebut jelas ditolak oleh pejuang RI yang menginginkan Indonesia berdiri sebagai suatu bangsa dan negara yang merdeka.

Perbedaan keinginan tersebut tanpa bisa dihindari memunculkan terjadinya perbenturan kepentingan-kepentingan yang saling bertolak belakang. Untuk mendukung kepentingannya, masing-masing pihak menggunakan kekuatan senjata dan melahirkan perang antara kedua belah pihak. Rentetan pertempuran antara pihak Indonesia dengan pihak Sekutu/Belanda berlangsung di berbagai tempat baik di Jawa maupun di luar Jawa. Pertempuran melawan kehadiran tentara Sekutu/Belanda di Jawa secara massif terjadi antara lain di daerah Bandung, Semarang dan Surabaya.³

Pertempuran yang berlangsung di Surabaya, yang merupakan pusat pemerintah politik di Jawa Timur, tergolong massif. Dalam penilaian ilmuwan Amerika dan Indonesianis terkemuka, Ben Anderson peristiwa tersebut merupakan pertempuran yang terbesar, menggemparkan dan tidak diduga akan dialami oleh pasukan Sekutu yang baru saja memenangkan perang melawan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Kedahsyatan pertempuran yang berlangsung di Surabaya ini secara kuat dilukiskan oleh Wehl: “Seandainya pertempuran-pertempuran seperti

3 Pertempuran di Bandung melahirkan sebutan yang sangat populer yakni Bandung Lautan Api. Bahasan mengenai pergolakan revolusi di Bandung lihat misalnya, John R. W. Smail, *Bandung in the Early Revolution* (Ithaca: Cornell University Modern Indonesia Project, 1964); Bahasan singkat mengenai pertempuran di Semarang dan sekitarnya dapat dibaca dalam tulisan P. J. Drooglever, “Uneasy Encounter: Semarang, Ambarawa, and Magelang during the first Month of the Revolusi”, dalam T. Ibrahim Alfian, et al. (ed.), *Dari Babad dan Hikayat sampai Sejarah Kritis*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987), hlm. 36 – 64; Bahasan yang komprehensif dan mendalam mengenai revolusi kemerdekaan yang terjadi di Surabaya lihat kajian William H. Frederick, *Pandangan dan Gejolak: Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926 – 1946)* (Jakarta: Yayasan Karti Sarana dan PT Gramedia, 1989).

itu berlangsung di seluruh Jawa, jutaan orang akan tewas, baik Republik Indonesia maupun Hindia Timur Belanda akan tenggelam dalam lautan darah”.⁴

Penilaian yang tidak terlalu jauh berbeda mengenai pertempuran di Surabaya diberikan oleh sejarawan William H. Frederick. Pertempuran di Surabaya yang berlangsung dalam waktu selama tiga minggu dilukiskannya sebagai sangat mengerikan, destruktif dan jauh lebih nekat daripada yang pernah dibayangkan oleh pihak Sekutu maupun pihak Indonesia sendiri. Kota Surabaya diluluhlantakan oleh peluru meriam yang dimuntahkan secara terus menerus dari kapal-kapal perang. Sekitar 500 bom telah dijatuhkan dalam tiga hari pertama. Pertempuran ini telah mengakibatkan Surabaya mengalami kelumpuhan dan kelangkaan bahan makanan.⁵

Rentetan pertempuran dalam skala yang lebih kecil banyak berlangsung di daerah-daerah lain di Jawa Timur.⁶ Kehadiran kekuasaan Belanda dengan personel militernya di daerah bisa dipastikan selalu mendapatkan jawaban dari pihak Republik Indonesia melalui berbagai gerakan perlawanan bersenjata. Perlawanan yang dilancarkan bukan hanya melibatkan kekuatan regular yang dimiliki pihak Republik Indonesia, melainkan juga melibatkan partisipasi secara aktif kalangan rakyat melalui kelaskaran maupun badan-badan perjuangan.

Keterlibatan rakyat secara aktif dalam perjuangan memang tidak dapat disangkal. Keterlibatan tersebut dilakukan tidak hanya oleh rakyat yang bermukim di perkotaan melainkan juga di daerah pedesaan. Pertempuran di Surabaya secara kuat merepresentasikan keterlibatan rakyat di perkotaan.

4 Ben Anderson, *Revolusi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944 – 1946* (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1988), hlm. 138.

5 Frederick, *op. cit.*, hlm. 355.

6 Irna N. H. Hadi Suwito, *Rakyat Jawa Timur Mempertahankan Kemerdekaan* (Jakarta: PT Gramedia, 1994).

Dalam kajiannya mengenai revolusi di Surabaya Frederick menunjukkan dengan jelas fenomena rakyat tersebut.⁷⁷ Sementara keterlibatan rakyat di daerah pedesaan dalam perjuangan secara mengesankan dilukiskan oleh Simatupang dalam kesaksian pengalamannya selama perjuangan gerilya yang dipublikasikan dengan judul *Laporan dari Banaran*. Dalam pandangan Simatupang rakyat desa dan pedesaan mempunyai peranan yang sangat sentral sehingga disimbolisasi sebagai “kawan”.⁸

Pertempuran melawan Belanda juga terjadi di Jomerto Jember pada tahun 1949. Pertempuran ini kemudian lebih populer dikenal sebagai Palagan Jomerto. Meskipun pertempuran terjadi dalam waktu yang relatif singkat, hanya satu hari yaitu tanggal 11 Februari 1949, peristiwa pertempuran Jomerto ini menarik untuk dikaji. Peristiwa pertempuran di Jomerto merupakan suatu peristiwa lokal namun penting dalam konteks perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman kembalinya kekuasaan Belanda.

Dalam perspektif perjuangan di tingkat daerah (lokal) pertempuran Jomerto dapat dikategorisasikan sebagai salah satu peristiwa besar yang terjadi di Jember. Penilaian ini didasarkan pada alasan salah satunya adalah besarnya jumlah korban jiwa yang diakibatkan peristiwa ini. Di pihak Republik Indonesia telah jatuh korban 12 orang anggota polisi gugur, 1 orang pegawai negeri, ditambah dengan korban yang meninggal dari kalangan rakyat biasa sejumlah 20 orang, dan 1 orang lainnya cacat seumur hidup.⁹

7 Frederick, *op. cit.*, hlm. 299 – 304.

8 Daniel Dhakidae, “Laporan Tentang Perang dan Damai”, dalam *Prisma*, no. 12, Desember, 1980, hlm. 89.

9 Prayoga Kartomiharjo, Prapto Saptono, Soekarsono, *Monumen Perjuangan Jawa Timur* (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986), hlm. 9 – 10; R. M. Yunani Prawiranegara, “Nyemek Sejarah Palagan Jomerto: (2) Palagan Jomerto Minangka Mata Rantai Sejarah Perjuangan Polri lan Bangsa Indonesia”, dalam *Jaya Baya*, edisi 18 November, 1984), hlm. 15.

Dalam kaitan dengan peristiwa pertempuran di Jomerto tersebut maka didirikanlah Monumen Palagan Jomerto di Kelurahan Jomerto Kecamatan Patrang Kota Administratif Jember. Pembangunan monumen ini tidak disangsikan mempunyai makna yang cukup penting ditinjau dari berbagai aspek. Monumen ini tentu saja bukan hanya dapat dipandang sebagai bangunan yang secara kuat dimaknai dengan pertimbangan nilai historis. Makna bangunan ini bukan hanya menjadi tugu peringatan terhadap peristiwa sejarah yang pernah terjadi di daerah ini.

Lebih mendalam dari sekadar alasan nostalgia, Monumen Palagan Jomerto juga mempunyai makna didaktis dalam rangka membangun kesadaran sejarah masyarakat. Secara esensial Monumen Palagan Jomerto merupakan ungkapan pengakuan dan penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan rakyat dan para pejuang kemerdekaan. Di samping itu, Monumen Palagan Jomerto sekaligus juga dapat sebagai pemberi dan inspirasi untuk membangun dan mensosialisasikan nilai-nilai kejuangan di kalangan masyarakat. Melaluinya masyarakat setempat diikat kesadaran historisnya dengan sejarah perjuangan bangsa di masa lalu serta didorong partisipasinya untuk melanjutkan perjuangan pada masa sekarang dan mendatang. Perjuangan dan mentalitas sebagai bangsa pejuang masih mempunyai relevansi dan tetap diperlukan dalam konteks kekinian yaitu dalam rangka mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang luhur, untuk membentuk masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera dalam segi materiel maupun spiritual.

B. Permasalahan

Keberadaan Monumen Palagan Jomerto harus diakui belum banyak dikenal secara luas, padahal keberadaannya mempunyai makna yang cukup signifikan untuk membangun kebanggaan dan kesadaran sejarah masyarakat. Sehubungan dengan itu, studi ini bermaksud menyoroti

Monumen Palagan Jomerto. Pokok permasalahan yang akan diangkat sebagai *subject matter* dalam studi ini adalah:

- 1) Bagaimanakah bentuk fisik Monumen Palagan Jomerto serta makna apakah yang terkandung di balik wujud fisiknya?
- 2) Bagaimanakah dimensi prosesual maupun kausalitas peristiwa sejarah yang kemudian dikenal dengan Palagan Jomerto tahun 1949?

Kedua bentuk pertanyaan inilah yang akan disoroti dan menjadi fokus pembahasan dalam studi ini.

Dengan permasalahan pokok tersebut, studi ini berupaya menggabungkan baik unsur deskripsi-narasi dengan unsur analisis segi kausalitas peristiwa sesuai dengan kecenderungan yang tengah berkembang dalam pengkajian sejarah. Model penulisan yang membatasi diri pada unsur deskripsi-narasi yang bersifat konvensional dipandang tidak memadai lagi dalam rangka mengungkapkan kompleksitas sejarah pada masa lampau. Pengkajian sejarah mutakhir juga menuntut diungkapkannya dimensi kausalitas proses maupun peristiwa sejarah pada masa lampau sehingga dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman sejarah yang lebih baik.¹⁰ Hanya melalui jalan inilah pengkajian sejarah akan mampu memberikan kontribusi dan masukan dalam rangka mewujudkan tatanan dan kondisi masyarakat serta masa depan yang lebih baik bagi manusia.

C. Metodologi

Studi tentang Monumen Palagan Jomerto ini pertama menggunakan

¹⁰ Unsur deskripsi-narasi masih tetap dipakai dalam studi ini karena unsure tersebut merupakan salah satu sifat utama penulisan sejarah, lihat Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), hlm. 316.

metode pengamatan langsung (*direct observation*).¹¹ Dengan penerapan metode pengamatan langsung berarti peneliti mendatangi lokasi objek dan melakukan pengamatan terhadap objek yakni Monumen Palagan Jomerto dari jarak dekat dengan mata kepala sendiri. Dalam kaitan dengan studi ini, metode pengamatan langsung merupakan cara terbaik untuk mendapatkan informasi mengenai segi fisik monumen. Melalui pengamatan langsung lebih dimungkinkan untuk mengetahui bentuk, ukuran, luas monumet serta berbagai simbol atau lambang yang terdapat pada bangunan monumen sehingga dapat diberikan deskripsi objek secara tepat dan memadai.

Studi tentang monumen Palagan Jomerto ini juga menerapkan metode sejarah karena peristiwa Palagan Jomerto sendiri merupakan peristiwa sejarah. Untuk merekonstruksi pertempuran Jomerto menjadi sebuah bangunan historiografis yang seobjektif mungkin memerlukan prosedur dan langkah kerja secara sistematis dalam proses penggarapannya. Para sejarawan telah mengembangkan langkah kerja tersendiri dalam menggarap subjek studinya yang disebut metode sejarah kritis. Metode sejarah kritis ini semula dikembangkan di negara-negara Barat dengan tokoh perintis Leopold von Ranke, seorang sejarawan dari Jerman yang kemudian diangkat sebagai Bapak Sejarah Kritis.

Seperti dikemukakan oleh Louis Gottschalk dalam bukunya yang berjudul *Mengerti Sejarah*, metode sejarah mencakup empat tahapan kerja sebagai rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tahapan

11 Metode pengamatan langsung terutama banyak diterapkan dalam penggalian data-data antropologis. Vredendregt, *Metode dan Teknik Studi Masyarakat* (Jakarta: PT Gramedia, 1979), hlm. 72. Pengamatan langsung (*direct observation*) dinilai merupakan cara yang terbaik untuk mendapatkan gambaran mengenai pola budaya yang sulit diungkapkan secara verbal melalui kata-kata. Di samping itu, pengamatan langsung juga bermanfaat untuk menguji dan membuktikan apakah responden atau komunitas budaya yang dikaji masih melakukan tradisi kultural seperti yang dituturkan. Carol R. Ember dan Melvin Ember, "Teori dan Metoda Antropologi Budaya", dalam T. O. Ihromi, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, (Jakarta: PT Gramedia, 1980), hlm. 51.

yang pertama disebut heuristik. Tahapan ini mencakup berbagai aktifitas pengumpulan sumber-sumber penulisan yang relevan dengan persoalan (*subject matter*) yang dijadikan fokus pembahasan. Tahapan ini diikuti dengan tahapan kritik eksternal, yakni kegiatan penyeleksian sumber-sumber secara kritis untuk mendapatkan sumber sejarah yang terjamin otentisitasnya. Tahapan berikutnya adalah kritik internal.¹²

Dengan mendasarkan pada sumber-sumber sejarah yang otentik kemudian dilakukan penggalian dan pengkajian untuk mendapatkan kesaksian (informasi) yang dapat dipercaya atau kredibel untuk diterima sebagai fakta-fakta sejarah (*historical facts*). Keseluruhan fakta sejarah yang berhasil dikumpulkan kemudian disintesis menjadi sebuah kisah sejarah atau bangunan historiografis melalui serialisasi kronologis serta penguraian dimensi kausalitas sebagai sebuah interpretasi historis. Keempat tahapan kerja inilah yang akan dijadikan pedoman dalam penggarapan studi Monumen Palagan Jomerto.

Peristiwa Jomerto jika dilihat dari dimensi temporalnya masih dapat dikategorisasikan ke dalam sejarah kontemporer (*contemporary history or history in the making*). Dalam merekonstruksi sejarah kontemporer belakangan ini semakin berkembang luas penggunaan metode sejarah lisan (*oral history*). Metode sejarah lisan pertama kali dikembangkan oleh Alan Nevins dari Universitas Columbia di Amerika Serikat. Dalam waktu relatif cepat penggunaan metode sejarah lisan menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia seiring dengan perkembangan teknologi perekam. Metode sejarah lisan ini dirasakan besar kontribusinya dalam rangka studi sejarah kontemporer utamanya bagi sejarah lokal karena menyediakan akses informasi di tengah langkanya sumber-sumber tertulis mengenai banyak hal yang terjadi di tingkat lokal.

12 Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1975), hlm. 18.

Istilah sejarah lisan sendiri sebenarnya dapat dipergunakan dalam dua pengertian yaitu sebagai sumber dan sebagai metode. Dalam pengertian sebagai sumber sejarah istilah ini mengacu pada pemanfaatan koleksi dokumen sejarah lisan yang sudah dikumpulkan oleh orang atau institusi lain. Wujudnya bias berupa transkripsi wawancara maupun masih dalam bentuk mentah berupa kaset wawancara. Dalam pengertian sebagai metode, pengaplikasian sejarah lisan merujuk pada kegiatan penggalian dan pengumpulan informasi dengan melakukan wawancara sendiri secara langsung terhadap para pelaku sejarah (*historical actors*) dan saksi sejarah (*historical witnesses*) yang masih hidup.¹³ Studi ini menggunakan sejarah lisan (*oral history*) baik dalam pengertian sumber sejarah maupun metode penelitian sejarah kontemporer.

Penggunaan sejarah lisan dalam pengkajian sejarah dinilai mampu menjadi pasangan metodologis yang member manfaat begitu besar. Penggunaan sejarah lisan dipandang sebagai terobosan penting untuk memecahkan masalah kelangkaan sumber-sumber tertulis (*written sources*) yang diperlukan dalam rekonstruksi sejarah. Andaiapun sumber-sumber tertulis cukup tersedia, sumber-sumber sejarah yang digali melalui sejarah lisan tetap bernilai. Selain dapat menjadi bahan pelengkap informasi tersebut juga dapat dipergunakan sebagai bahan pembanding.

Dalam kaitan tersebut penting untuk disadari bahwa kedua jenis sumber sejarah ini mempunyai bobot yang sama. Sumber sejarah tertulis (*written history*) tidak lebih tinggi bobotnya dibandingkan dengan sumber sejarah yang bersifat lisan (*oral sources*). Hal ini berarti bahwa dalam pemanfaatannya kedua jenis sumber sejarah, baik yang berisi tertulis maupun lisan, sama-sama masih memerlukan penyikapan secara

13 Lihat Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1994), hlm. 22 – 24; Cullom Davis, et al. *Oral History: from Tape to Type* (Chicago: American Library Association, 1977), hlm. 4; juga lihat James Hoopes, *Oral History: an Introduction for students* (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1979), hlm. 140.

kritis-skeptis. Kedua jenis sumber sejarah mempunyai bobot yang sama dan masing-masing tetap mempunyai kelemahan baik karena alasan kelupaan, penyimpangan, penyembunyian serta manipulasi informasi melalui penambahan ataupun pengurangan karena kepentingan tertentu.

Pendekatan yang digunakan untuk membedah Palagan Jomerto adalah sosiologi. Sosiologi membicarakan struktur sosial yang berkaitan dengan interaksi dan hubungan sosial. Selain itu akan dibicarakan mengenai simbol-simbol yang tergambar dalam Palagan Jomerto. Teori Childe (dalam Koentjaraningrat, 1990:119-120) mengenai revolusi kebudayaan mengatakan bahwa perubahan kebudayaan akan semakin mantap berkat sistem pembagian kerja dalam masyarakat. Setelah pemerintah Jepang membentuk berbagai organisasi sosial dan semi militer bagi bangsa Indonesia, maka terjadi perubahan dalam sistem kerja yang bersifat profesional dan hal ini mengubah pola pikir bangsa secara revolusioner karena semangat patriotisme tumbuh secara merata ke seluruh lapisan masyarakat untuk melepaskan diri dari kekuasaan asing secara frontal.

D. Tujuan Studi

Studi ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai Monumen Palagan Jomerto di Kabupaten Jember. Secara lebih terperinci studi ini pertama bertujuan memberikan deskripsi fisik (*physical description*) Monumen Palagan Jomerto menyangkut luas, bentuk maupun ukuran. Dengan deskripsi ini akan diketahui bentuk arsitektural (*architectural form*) Monumen Palagan Jomerto. Lebih jauh lagi, studi ini bertujuan mengungkap gagasan serta makna simbolis yang terangkum dalam Monumen Palagan Jomerto sebagaimana diekspresikan dalam berbagai simbol ataupun lambang-lambang yang dipergunakan pada bangunan monument tersebut.¹⁴

¹⁴ Bangunan arsitektural di Indonesia terutama Jawa mempunyai bentuk yang

Sebagai bangunan yang bermakna historis, Monumen Palagan Jomerto terkait erat dengan peristiwa heroik dalam perjuangan melawan kolonialisme Belanda. Berkaitan dengan kenyataan studi ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dimensi historis Palagan Jomerto. Tujuan ini menuntut pengungkapan jalannya peristiwa Palagan Jomerto, sebab-sebab terjadinya maupun berbagai akibat yang ditimbulkannya.

Dengan kata lain, studi ini bertujuan bukan hanya menyajikan dimensi prosedural peristiwa Palagan Jomerto, melainkan juga menjelaskan dimensi kausalitas peristiwa beserta dampak yang ditimbulkannya. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru dalam pengkajian sejarah agar layak disejajarkan sebagai sebagai sebuah disiplin dengan ilmu sosial yang lain. Sebagai sebuah ilmu sejarah selain memberikan deskripsi juga dituntut mampu memberikan penjelasan mengenai peristiwa maupun proses sejarah yang terjadi pada masa lampau.¹⁵

Dengan menggabungkan ketiga metode sebagaimana yang telah dipaparkan, sumber-sumber sejarah yang diperlukan dalam rangka penggarapan studi ini dikumpulkan sebagai bahan untuk rekonstruksi. Oleh karena memang hanya melalui sumber-sumber sejarah rekonstruksi historis terhadap masa silam dapat dikerjakan. Masa lampau dengan berbagai dimensinya yang sangat kompleks memang hanya dapat direkonstruksi, dan rekonstruksi ini pun harus diakui masih bersifat

sangat beragam serta kaya dengan gagasan symbol atau lambang yang diekspresikan melalui penampilan fisiknya. Diskusi mengenai hal ini lihat misalnya Josef Prijotomo, *Ideas and Forms of Javanese Architecture*, third printing (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992).

- 15 F. R. Ankersmit, *Refleksi tentang Sejarah: Pendapat-Pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah*, terj. Dick Hartoko (Jakarta: PT Gramedia, 1987), hlm. 121; R. H. Nash, *Ideas of History: The Critical Philosophy of History* (New York: E. P. Dutton & co. Ltd., 1969), hlm 75 – 79; W. H. Walsh, *An Introduction to Philosophy of History* (London: Hutchinson University Press, 1963), hlm. 23. Taufik Abdullah, *op. cit.*, hlm. 7.

parsial, berdasarkan informasi yang ditinggalkan dalam bentuk sumber sejarah atau rekaman sejarah (*historical records*).

Ketersediaan sumber sejarah merupakan tuntutan dan kebutuhan yang bersifat mutlak karena peneliti sejarah dalam menggarap subjeknya tidak mungkin secara langsung berangkat dari masa lampau *an sich*, melainkan secara tidak langsung melalui peninggalan-peninggalan masa lampau entah berupa dokumen atau rekaman sejarah atau peninggalan lainnya yang berasal dari masa lampau.¹⁶ Jejak-jejak yang ditinggalkan masa lampaulah yang menjadi pintu gerbang peneliti sejarah untuk menggarap subjeknya. Di sini tampak sekali adanya ketergantungan peneliti sejarah terhadap sumber sejarah sehingga benarlah jika sebuah diktum menyatakan “tidak ada dokumen tidak ada sejarah” (*no documents no history*).

E. Ruang Lingkup

Salah satu karakteristik menonjol yang melekat pada studi sejarah adalah diperhatikannya batasan ruang (*spatial scope*) dan batasan waktu (*temporal scope*). Suatu peristiwa sejarah (*historical event*) maupun proses sejarah (*historical process*) senantiasa terikat pada dimensi ruang dan waktu. Baik peristiwa maupun proses sejarah selalu terjadi dan berlangsung pada dataran geografis serta kurun waktu tertentu.¹⁷ Keterikatan dengan dimensi ruang dan waktu juga membuat peristiwa maupun proses sejarah bersifat *einmalig*, artinya hanya sekali terjadi dan tidak pernah akan terulang lagi. Karakteristik ini pulalah yang dengan jelas membedakan jenis studi sejarah dengan jenis studi yang lain.¹⁸

16 Nash, *op. cit.*, hlm. 159.

17 Unit ruang dan waktu merupakan salah satu prinsip dalam pengorganisasian studi sejarah. Sartono Kartodirdjo. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: PT. Gramedia, 1992), hlm. 40, 60 – 61.

18 Djoko Suryo, “Sekitar Masalah Sejarah dengan Ilmu-Ilmu Sosial”, *Seri Bacaan Sejarah No. 4* (Yogyakarta: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, 1980), hlm. 7.

Secara riil ruang lingkup studi ini adalah Palagan Jomerto yang terdapat di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember baik dalam pengertian bangunan monumen maupun kisah sejarah. Sebagai monumen batasan ini cukup eksak. Akan tetapi, dalam pengertian sebagai kisah, batasan ini tidak digunakan secara ketat karena ketika mengungkap kisah sejarah yang berhubungan dengan Palagan Jomerto tidak dapat dihindarkan perlu pula menyinggung perkembangan di daerah lain karena alurnya saling berkaitan. Hal ini penting terutama ketika perkembangan daerah lain tersebut ikut menentukan jalannya peristiwa sejarah di Jomerto atau mempunyai relevansi dan keterkaitan dengan subjek yang menjadi fokus studi ini. Penggunaan daerah lain dalam pembahasan tulisan ini pada dasarnya merupakan bagian dari upaya untuk memperjelas baik dimensi kronologis-prosesual maupun kausalitas peristiwa Palagan Jomerto.

Batasan waktu studi ini adalah tahun 1949. Pembatasan waktu di sini juga tidak diperlakukan secara mutlak. Hal ini mengingat bahwa peristiwa sejarah tidak terlepas dari peristiwa yang terjadi sebelumnya. Antara peristiwa sejarah yang satu dengan yang lain sering terjalin dalam suatu pola hubungan mata rantai sebab dan akibat.¹⁹ Untuk mengungkap aspek prosesual maupun kondisional pertempuran yang berlangsung di Jomerto tahun 1949 menuntut dilakukannya penelusuran serta pengungkapan berbagai peristiwa serta kondisi yang mendahului atau telah ada sebelumnya. Tuntutan semacam ini membawa suatu konsekuensi logis bahwa dalam penggarapannya, rentang waktu pembahasan perlu ditarik ke belakang agar peristiwa Palagan Jomerto yang hendak dikaji dapat direkonstruksi, dijelaskan dan dapat dipahami secara lebih baik.

F. Sistematika Studi

Studi ini tersusun atas 6 bab. Setelah Bab Pendahuluan ini, disusul

¹⁹ Lihat Kartodirdjo, *op. cit.*, hlm. 40 – 41; Gottschalk, *op. cit.*, hlm. 154 - 155.

dengan uraian mengenai zaman Jepang, yang telah membentuk latar yang penting bagi revolusi kemerdekaan Indonesia. Pada Bab 3 dipaparkan konteks politik nasional yang melatari peristiwa pertempuran di Jomerto dari proklamasi hingga keterlibatan pasukan mobile brigade polisi dalam penumpasan pemberontakan komunis Madiun tahun 1948. Dalam Bab 4 dipaparkan Long-March Pasukan Mobile Brigade Polisi dari Ponorogo Menuju Besuki menyusul terjadinya agresi militer Belanda ke wilayah Republik Indonesia. hingga pecahnya pertempuran antara pasukan Belanda dengan pasukan Mobile Brigade Polisi di Jomerto, Jember. Dalam Bab 5 dipaparkan bagaimana Palagan Jomerto dilihat dan dimkanai dalam perjuangan nasional dan lokal melawan kolonialisme. Narasi tentang peristiwa Palagan Jomerto kemudian disusul dengan pembahasan tentang pengabdian kisah tersebut dalam bentuk monumen yang sarat dengan lambang dan makna simbolik. Bab 6 menutup uraian buku dengan kesimpulan yang dapat ditarik dari studi ini.

BAB 2

PENDUDUKAN JEPANG

A. Pendudukan Jepang dalam Konteks Perjuangan Nasional

Bagi bangsa Indonesia periode pendudukan Jepang merupakan periode yang sangat singkat, karena berlangsung tahun 1942 sampai dengan tahun 1945. Akan tetapi, masa pendudukan yang singkat ini telah banyak mengubah mentalitas bangsa Indonesia dari yang bersifat inferior menjadi patriotis.

Pemerintahan Hindia Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintahan militer Jepang pada tanggal 8 maret 1942. Kejatuhan pemerintahan Hindia Belanda yang terlalu cepat menandakan bangsa Indonesia tidak mendukung kekuatan militer Belanda, selain itu kekalahan Belanda telah menjatuhkan gengsi orang Belanda di mata orang Indonesia.¹

Interaksi orang-orang Jepang dengan masyarakat bumiputera, dimulai sebelum Jepang menguasai daerah Hindia Belanda terutama tahun-tahun terakhir sebelum pemerintah militer Jepang mengalahkan pemerintahan kolonial Belanda. Salah satu pendekatan orang-orang Jepang ialah dengan cara mengambil hati para pemimpin Islam.² Pendekatan orang-

1 George Mc. T. Kahin, *Nasionalisme Dan Revolusi Indonesia* (Solo: UNS Press, 1995), hlm. 130.

2 Harry. J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang* (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), hlm. 134-135

orang Jepang terhadap tokoh-tokoh politik baik dari kalangan nasionalis sekuler maupun nasionalis agama bertujuan untuk mengetahui kekuatan serta kesadaran dari para tokoh bumiputera terhadap rasa kebangsaan, yaitu Indonesia. Selain itu, dalam rangka mendapatkan dukungan dari orang-orang bumiputera, apabila Jepang mengadakan ekspansi ke wilayah Hindia Belanda. Jadi alasan kuat orang-orang Jepang adalah untuk mendapatkan dukungan dari berbagai tokoh pergerakan bumiputera dalam rangka perang Asia Timur Raya di kelak kemudian hari.

Pada awal kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, masyarakat Indonesia menerima kedatangan pemerintah militer Jepang dengan tangan terbuka, rakyat memiliki kepercayaan bahwa Jepang sebagai saudara tua akan membebaskan Hindia Belanda dari belenggu penjajahan karena rakyat Indonesia percaya bahwa Jepang akan membebaskan Hindia Belanda dari jajahan pemerintahan Belanda.³Selain itu, propaganda pemerintahan Jepang tentang "pembebasan rakyat Asia" dengan Ideologi "Kemakmuran bersama Asia Timur Raya" dipahami oleh warga bumiputera akan membebaskan masyarakat yang ada di Nusantara dari belenggu imperialisme, dan kapitalisme Belanda.⁴

Sejak pemerintahan militer Jepang menguasai daerah bekas jajahan Belanda, maka kebijakan pemerintah dilakukan berdasarkan kepentingan perang Jepang, sehingga kebijakan dari tahun ke tahun berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan perang melawan tentara Sekutu.⁵ Penekanan kebijakan dari tahun ke tahun berubah sesuai dengan tujuan, yaitu :

1. Tahun 1942, memulihkan dan memelihara ketertiban dan keamanan

3 Kahin, *op. cit.*, hlm 130.

4 Benda, *op.cit.*, hlm. 137.

5 Benda, *ibid.*

2. Tahun 1943, memperoleh sumber-sumber kebutuhan perang yang vital
3. Tahun 1944 sampai 1945, pasukan-pasukan tempur di daerah-daerah pendudukan mampu berswadaya.

Pada awalnya kebijakan pemerintah Jepang ditujukan untuk membina bumiputera sedemikian rupa, sehingga masyarakat bumiputera mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap kemaharajaan Jepang, kebijakan masih sekitar memulihkan ketertiban dan keamanan. Sistem pemerintahan yang diterapkan adalah sistem militer. Pada saat ini pemerintah Jepang berusaha mendekati rakyat Indonesia dengan jalan melancarkan propaganda dan mobilisasi tanpa melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Jepang memperkenalkan propaganda dengan semangat Jepang, yaitu Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia, yang dikenal dengan istilah Gerakan Tiga A. Akan tetapi Gerakan Tiga A ini tidak dapat berjalan dengan lancar bahkan mengalami kegagalan, karena dalam gerakannya tidak melibatkan tokoh-tokoh Indonesia sebagai panutan rakyat. Jepang menyadari kekeliruannya, maka pemerintah Jepang mengorganisasi rakyat ke dalam berbagai organisasi, usaha ini dinamakan mobilisasi.

Seiring dengan terdesaknya tentara Jepang dari peperangan Pasifik Raya, maka kebijakan Jepang ditujukan untuk memperoleh sumber daya alam serta sumber daya manusia dengan cara eksploitasi. Eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia secara besar-besaran dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang, yang mengakibatkan kesengsaraan yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia.

Kebijakan eksploitasi berubah lagi menjadi kebijakan yang melibatkan bumiputera dalam pertahanan dan keamanan, untuk menahan serangan sekutu yang sedikit demi sedikit mulai menguasai daerah Asia Tenggara dari kekuasaan pemerintahan Jepang.

Pemerintah Jepang membentuk organisasi yang dapat mendukung kepentingan perang mereka, bahkan pada akhirnya, pemerintah membentuk organisasi kemasyarakatan yang bersifat semi militer, baik bagi kaum nasionalis sekuler maupun nasional agama. Jepang sedapat mungkin menghindari pertumbuhan organisasi bumiputera yang dapat menuntut kemerdekaan dengan cara perlawanan senjata atau menumbuhkan nasionalisme bumpitera yang semakin kuat.

Organisasi politik bumiputera akhirnya diperbolehkan di bawah pengawasan ketat pemerintah, seperti Poetera (Poesat Tenaga Rakyat) yang dibentuk pada tanggal 9 Maret tahun 1943. Dalam perkembangannya, pemerintah Jepang menganggap Poetera menyimpang dari keinginan pemerintah karena bergerak di bidang politik yang dapat menimbulkan rasa nasionalisme Indonesia. Untuk meredam itu, maka ada tanggal 8 Januari 1944 Poetera diganti menjadi Jawa *Hokokai* atau Himpunan Kebaktian rakyat. Organisasi Jawa *Hokokai* merupakan organisasi masa. Jawa *Hokokai* bergerak di bidang sosial seperti pemberantasan buta huruf, kursus menenun, kampanye kebersihan, dan mengajarkan gaya hidup yang pantas pada waktu perang. *Hokokai* mempunyai peran dalam memobilisasi masa terutama untuk *kinro hoshi* (kerja bakti) yang melibatkan masyarakat secara luas, dari perkotaan sampai pedesaan dengan tidak memandang perbedaan kelas.

Jawa *Hokokai* merupakan suatu organisasi di mana berbagai kelompok masyarakat Indonesia menjadi anggota, dan ketuanya adalah *gunseikan*, sekretaris umumnya adalah *somubacho*, pejabat Jepang lainnya berada dalam kedudukan penting di dalam pimpinan pusat *Hokokai*.⁶ Penasehat utama adalah Ir. Soekarno dan Hasyim Ashari, adapun Drs. Moh. Hatta dan K.H. Mansyur sebagai pengelolanya.

⁶ Nugroho Notosusanto, *Tentara PETA pada Zaman Pendudukan Jepang Di Indonesia* (Jakarta: Lembaga Sejarah Hankam, 1979), hlm. 43-44.

Tujuan Hokokai adalah untuk memobilisasi masa ke arah kerja sama tak bersyarat dengan pemerintah, adapun fungsinya adalah:

1. Mengambil rakasa dalam melayani pemerintah militer.
2. Memberikan tuntunan kepada seluruh rakyat dalam pengabdian kepada pemerintah militer Jepang dengan semangat persaudaraan.
3. Memperkuat pertahanan militer.
4. Mendukung penyelesaian kondisi peperangan.
6. Menyediakan bantuan, perlindungan, dan bimbingan kepada seluruh penduduk.

Jawa Hokokai merupakan suatu organisasi massa yang menyatukan seluruh penduduk sebagai anggotanya. Semangat kebaktian diletakkan kepada rakyatnya dalam hal ini memiliki tiga dasar, yaitu:

1. Semangat mengorbankan diri.
2. Semangat mempertebal rasa persaudaraan.
3. Semangat melaksanakan sesuatu dengan bhakti.

Dalam perjalanan organisasi ini, *Hokokai* dijadikan alat oleh pemerintahan militer Jepang untuk mengeksploitasi sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan ekonomi perang mereka terutama untuk memenuhi swadaya ekonomi perangnya. Dampak positif dari organisasi *Hokokai* adalah dapat mendorong rakyat untuk berbakti dan mengabdikan dirinya sendiri kepada bangsa, rakyat memiliki prinsip-prinsip mengorbankan diri, kesetiaan, serta dedikasi bagi negara. *Hokokai* memberikan pencerahan bagi masyarakat Indonesia ke arah kesadaran politik. Dengan demikian Jawa *Hokokai* merupakan bentuk organisasi massa yang baru bagi masyarakat Indonesia, karena menyerap berbagai organisasi etnis dan berbagai tipe organisasi dalam

satu payung. Tujuan Jepang agar mudah mengawasi pergerakan dan kegiatan anggota Jawa *Hokokai*.⁷

Terlepas dari itu semua Jawa *Hokokai* dibentuk dari kota sampai ke pedesaan, sehingga masyarakat desa yang pada masa kolonial Belanda jarang terlibat secara langsung dalam kegiatan suatu organisasi, pada akhirnya menjadi terlibat dalam organisasi kemasyarakatan secara langsung. Hal ini menumbuhkan rasa kebangsaan yang tinggi, kesadaran akan kedaulatan bernegara, yang pada ujungnya adalah kesadaran untuk melepaskan diri dari penguasa asing dari Nusantara (Indonesia). Di sisi lain, pemerintah Jepang melatih warga bumiputera di bidang militer. Tujuan awalnya adalah untuk membekali warga bumiputera dalam mempertahankan wilayah Nusantara dari serangan Sekutu bersama-sama dengan tentara Jepang.

Pemerintah Jepang mulai mengeluarkan kebijakan yang melibatkan penduduk bumiputera untuk dilatih semi militer dan militer, setelah Jepang merasakan kekurangan pasukan untuk mempertahankan daerah-daerah yang berhasil direbut dengan mudah di Asia. Untuk mengatasi kekuarangan tentara yang profesional, maka pemerintah Jepang membentuk organisasi semi militer terutama untuk para pemuda, yaitu *Seinendan* (Barisan Pemuda) dan *Keibodan* (Barisan pembantu Polisi) yang dibentuk tanggal 29 April tahun 1943. Kedua organisasi ini dibentuk dalam waktu yang bersamaan, akan tetapi tujuan pembentukan ke dua organisasi ini berbeda, sehingga dalam perannya pun tidak sama.

Seinendan merupakan organisasi semi militer yang ditujukan untuk bumiputera berjenis kelamin laki-laki dengan rentang usia antara 14-25 tahun. Tujuan dari organisasi *Seinendan* adalah untuk mempersiapkan pemuda secara mental maupun teknis untuk memberikan sumbangan

⁷ Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol: Studi Tentang Perubahan Sosial Di Pedesaan Jawa 1942-1945* (Jakarta: Yayasan Karti Sarana dan Gramedia: Widiasarana Indonesia, 1993), hlm.354-355.

kepada usaha perang Jepang, baik dengan meningkatkan produksi maupun dengan pengamanan garis belakang. *Seinendan* mempunyai struktur teritorial dan sektoral. Jepang menjaga *Seinen dan* dari pengaruh kaum nasionalis, untuk itu Jepang mengontrol *Seinendan* melalui *pangreh praja*. Jepang mendidik dan memobilisasi anak-anak muda dengan efisiensi yang maksimum, akan tetapi menjauhkan mereka dari kegiatan yang berkaitan dengan politik. Kegiatan *Seinendan* ditujukan ke arah pekerjaan yang produktif.⁸ Mobilisasi tanpa politik merupakan prinsip yang ketat dari kebijakan Jepang terhadap organisasi *Seinendan*, maka banyak anak-anak muda pada waktu itu tidak terlalu untuk memasuki organisasi ini.⁹

Keibodan adalah badan sipil yang bertugas membantu polisi. Tugasnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban setempat, baik di desa maupun di kelurahan kota, yang diawasi dan dikendalikan oleh polisi setempat. Pada dasarnya *Keibodan* adalah suatu organisasi keamanan di bawah departemen kepolisian, dibentuk pada tingkat desa dengan kepala desa sebagai komandannya. Anggota dipilih oleh kepala desa dari kalangan penduduk pria desa dengan usia antara 23-35 tahun. *Keibodan* mempunyai peran sebagai tenaga bantu kepolisian yang bekerja untuk keamanan.¹⁰ Selain berperan untuk menjaga keamanan, *Keibodan* juga berkewajiban untuk memperhatikan pelaksanaan peraturan ekonomi pemerintah Jepang. Jadi peran *Keibodan* bukan saja menjaga keamanan, tetapi juga melenyapkan elemen-elemen anti Jepang, mengawasi keberhasilan tuntutan ekonomi untuk pemerintah dan lain-lain, jadi tugasnya sangat beragam.¹¹

Selain itu, pemerintah militer Jepang berusaha merangkul kaum nasionalis agama atau alim ulama. Pemerintahan Jepang memanfaatkan

8 *Ibid.*, hlm. 351.

9 *Ibid.*, hlm. 352.

10 *Ibid.*, hlm. 351.

11 *Ibid.*, hlm. 352.

alim ulama untuk memobilisasi massa. Pertama pemerintah militer Jepang mendirikan organisasi muslim, yaitu Masyoemi. Kedua membentuk seki urusan agama (*shumuka*) di setiap pemerintahan karesidenan. Ketiga menyelenggarakan program latihan alim ulama (kiyai *Koshukai*). Pemerintah Militer Jepang memberikan perhatian khusus kepada alim ulama, agar Jepang mendapat dukungan serta diharapkan alim ulama yang berpengaruh terhadap masyarakat dapat dijadikan sebagai propagandis yang pro Jepang.¹² Masjoemi (Madjlis Sjoero Moeslim Indonesia) merupakan organisasi muslim yang mewadahi umat Islam. Masyoemi merupakan federasi dari organisasi Islam, yaitu Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam Indonesia, melalui organisasi Masyoemi maka umat Islam mendapat pelatihan untuk menjadi seorang pemimpin yang dapat menjalankan kewajiban terhadap agama, bangsa, dan tanah air. Kepemimpinan yang diberikan kepada anggota Masjoemi dipandang penting dan perlu karena mempunyai arti yang sama dengan kepemimpinan imam atas para jamaah dalam menunaikan sholat.¹³ Organisasi Masjoemi dipandang mempunyai arti penting dalam kaitan dengan perubahan kedudukan mereka secara politik.¹⁴ Hal yang baru bagi pergerakan kaum muslim, yang selama masa pemerintahan kolonial Belanda umat Islam sangat terpinggirkan.

Pemerintah militer Jepang menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi kaum ulama. Persiapan dan pelatihan ulama ditangani oleh seksi Penelitian, Kontrol, dan Pengelolaan yang dikepalai Furusawa. Lebih dari 1.000 kyai telah dimobilisasi mengikuti pelatihan ulama hingga bulan Mei 1945 untuk menjadi tim propaganda yang bekerja untuk tujuan-

12 Ibid., hlm. 275.

13 Nawiyanto, Eko Crys Endrayadi, dan Siti Sumardiati, *Melacak Jejak Pejuang: Biografi R.H. Noerdhin Soetawidjaja* (Yogyakarta: Galang Press bekerjasama dengan Tarutama Nusantara dan Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember, 2015), hlm. 74.

14 Ibid., hlm. 75.

tujuan yang dikehendaki Jepang. Dalam pelatihan tersebut, kaum ulama menerima indoktrinasi kekejaman kolonial Belanda, maksud dan tujuan perang Asia Timur Raya, serta kemenangan-kemenangan Jepang dari kolonial Belanda. Setelah selesai mengikuti pelatihan, maka peserta akan mendapatkan ijazah sebagai bukti keikutsertaan dalam pelatihan dan kesanggupan untuk menjadi tim propaganda.¹⁵ Masjoemi terbukti merupakan organisasi politik yang mampu menyiapkan kader-kader bangsa pada saat Indonesia di ambang kemerdekaannya.

Pemerintah militer Jepang semakin giat melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh agama Islam, baik yang berada di perkotaan maupun di pedesaan. Kebijakan Jepang terhadap aksi politik Islam dari waktu ke waktu berubah, tujuan akhir dari kebijakannya adalah mempolitisir Islam dari perkotaan sampai pedesaan (Benda,1980:166-168).¹⁶ Ada keputusan penting yang pada dasarnya mempengaruhi perkembangan politik Islam di kelak kemudian hari, yaitu diciptakannya korps atau pasukan sukarelawan Indonesia di Jawa. Organisasi *Hizbullah* yang berideologi Islam dibentuk oleh Jepang pada bulan Desember tahun 1944 yang berafiliasi dengan Masyoemi di Jawa Barat. Kegiatannya dipercayakan kepada Masyoemi. Laskar *Hizbullah* merupakan sayap militer dari Masyoemi yang fokus gerakannya dalam kancah politik.¹⁷

Hizbullah merupakan wadah pelatihan kemiliteran yang secara khusus beranggotakan pemuda-pemuda Islam di Jawa dan Madura. Anggotanya terdiri atas pemuda yang berasal dari madrasah atau pondok pesantren. Dalam pelatihan *Hizbullah*, para peserta mendapat gembengan secara jasmani dan rohani. Secara jasmani mereka dilatih dan dibekali pengetahuan praktis kemiliteran. Secara rohani diberi pendalaman

15 *Ibid.*, hlm.76-78.

16 Benda, *op.cit.* hlm.166-168.

17 Nawiyanto, *op. cit.*, hlm. 90

pengetahuan tafsir Al-Quran, dan keteguhan Iman.¹⁸Pemerintah militer Jepang membentuk *Hizbullah* dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dari barisan pemuda-pemuda Islam. Barisan *Hizbullah* mempunyai dua tugas pokok, yaitu: 1) menyelesaikan peperangan sebagai cadangan tentara Pembela Tanah Air; 2) membentuk masyarakat baru sebagai hamba Allah yang taat dan berbakti.¹⁹*Hizbullah* kemudian sebagai mitra Islam untuk PETA.

Kebijakan lain yang berkaitan dengan mobilsasi masa adalah *romusha*. Romusha sudah diterapkan sejak awal pemerintahan Jepang, akan tetapi baru pada tahun 1944 *romusha* diorganisasi secara penuh di dalam lingkungan *Naimubu* (Departemen Urusan Dalam Negeri) , di dalam peraturan *romusha* ini adalah perekrutan tenaga kerja untuk diperkerjakan di daerah-daerah pendudukan Jepang dengan cara dibayar, agar masyarakat bumiputera menjadi sejahtera. Akan tetapi, dalam prakteknya *romusha* ini merupakan eksploitasi tenaga kerja bagi kepentingan perang Jepang yang mengakibatkan penderitaan berkepanjangan bagi para *romusha* dan keluarganya. Banyak *romusha* yang tidak kembali ke daerah asalnya, karena mereka dipekerjakan di daerah-daerah berbahaya untuk membuat fasilitas transportasi perang pemerintah Jepang di daerah Asia. Mobilisasi masa untuk *romusha* inilah yang mengakibatkan masyarakat Indonesia menjadi semakin membenci pemerintahan Jepang. Di akhir masa pendudukan, pemerintahan Jepang perlahan-lahan mulai bergeser memberikan konsensi-konsesi politik yang lebih besar kepada penduduk bumiputera.

Organisasi militer yang dibentuk Jepang lainnya adalah PETA (Pembela Tanah Air).Pada pertengahan tahun 1943 ada gagasan dari Inada atas dugaan bahwa pemerintah Jepang tidak akan dapat mengatasi Perang Asia Timur Raya tanpa adanya dukungan dari militer bumiputera.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 83

¹⁹ *Ibid.*, hlm 81-82

Jepang harus mempersiapkan diri untuk melaksanakan operasi defensif, dan untuk itu, dukungan penuh dari rakyat-rakyat di Asia Tenggara yang negerinya diduduki harus digalang. Di sisi lain, pada tanggal 7 September 1943 ada permohonan dari Gatot Mangunpraja kepada Panglima Tertinggi dan Kepala Pemerintahan Tertinggi untuk membentuk sebuah barisan sukarela pembela tanah air.²⁰ Permohonan mengenai pembentukan barisan sukarela pembela tanah air mendapat dukungan dari Soekarno dan Hatta. Maka pada tanggal 3 Oktober 1943 Panglima Tentara Keenambelas Jepang, Letnan Jendral Kumakitji Harada membentuk *Giyugun* (Pembela Tanah Air yang kemudian dikenal sebagai PETA (Pembela Tanah Air). Pembentukan PETA oleh pemerintah Jepang dianggap penting, karena dapat membantu pertahanan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Bagi bangsa Indonesia PETA sangat bermanfaat karena tidak dibentuk dalam suatu vakum, melainkan didukung oleh suatu tradisi keprajuritan maupun aspirasi rakyat Indonesia.²¹

Tentara PETA merupakan *home defence army*, sehingga tidak boleh dibawa ke luar dari daerah untuk ekspedisi militer. Tugasnya adalah untuk mempertahankan daerahnya sendiri terhadap serbuan militer asing. Anggota PETA berusia antara 17 sampai 30 tahun dengan syarat, berbadan sehat dan kuat yang diseleksi secara ketat. Latihan kemiliteran diberikan bagi seluruh anggota PETA, seperti disiplin militer, latihan kemiliteran, latihan tempur, dan sebagainya. Komando militer diserahkan kepada para *chudancho* (komandan kompi) dan *sudantjo* (komandan peleton) yang berasal dari tokoh-tokoh masyarakat. Dengan demikian, hubungan antara komandan peleton, kompi, dan batalion (orang Jepang) dengan anggota PETA menjadi kokoh dan memperkuat kekompakan sosial di antara kelompok-kelompok kecil setempat.²²

20 Notosusanto, *op.cit.*, hlm. 9

21 *Ibid.*, 72.

22 Robert Bridson Cribb, *Gejolak Revolusi di Jakarta 1944-1949: Pergulatan Antara Otonomi dan Hegemoni* (Jakarta: Grafiti, 1990), hlm. 34.

Dampak positif dari pembentukan PETA bagi bangsa Indonesia, terutama generasi muda adalah menerima pendidikan kemiliteran yang lebih luas.²³ Penerapan kebijakan yang berkaitan dengan aspek kemiliteran telah menggembelng semangat dan jiwa patriotisme dari sebagai besar masyarakat Indonesia, tidak terkecuali masyarakat perkotaan maupun pedesaan secara bersamaan.

Hal ini berbeda dengan masa penjajahan pemerintah Hindia Belanda yang membatasi bumiputera untuk memasuki dunia kemiliteran secara profesional.²⁴ Disiplin PETA yang sangat keras dan ketat menumbuhkan cinta air yang dalam, bahkan anggota PETA tumbuh menjadi kelas sosial baru yang kedudukannya dihormati oleh masyarakat, bahkan banyak anggota PETA yang akhirnya menjadi tulang punggung Tentara Nasional Indonesia dikemudian hari.

Di luar kebijakan keorganisasian di atas, masa Pendudukan Jepang mewarnai kehidupan bernegara dan berbangsa lainnya. Pada awalnya Jepang menghilangkan semua pengaruh Barat, baik di bidang sosial budaya, politik, dan ekonomi. Pemerintah Jepang menghapuskan bahasa asing barat (Belanda, Inggris, dan sebagainya) sebagai bahasa resmi dan pergaulan, diganti oleh bahasa daerah dan bahasa Melayu. Kedudukan yang strategis di pemerintahan diberikan bangsa Indonesia yang dianggap mampu, suatu hal yang tidak pernah terjadi pada masa pemerintahan Kolonial Belanda. Jepang mewajibkan menyanyikan lagu-lagu yang bersemangat, menggunakan bahasa Melayu, yang tanpa disadari menumbuhkan patriotisme. Sistem pendidikan dualisme dihapuskan diganti dengan sistem pendidikan yang seragam dengan bahasa pengantar Melayu atau bahasa daerah setempat, walaupun penyeragaman ini

23 A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, jilid I (Bandung: Angkasa, 1977), hlm. 104.

24 *ibid.*

dimaksudkan untuk keperluan perang Asia Timur Raya.²⁵

Selain itu, pemerintah militer Jepang membentuk lembaga sosial baru di tingkat masyarakat, yaitu *tonariguni* dan *kumiai*. *Tonarigumi* adalah rukun tetangga yang terdiri atas 10 sampai 20 kepala rumah tangga. Kedua lembaga ini merupakan lembaga tiruan dari Jepang untuk mengawasi dan memobilisasi masa di Jepang dan mensukseskan program perang Asia Timur Raya pemerintah Jepang. *Tonarigumi* adalah lembaga sosial yang dimaksudkan agar masyarakat berpartisipasi dalam perang dengan penekanan kepada semangat gotong royong. Pada dasarnya *tonarigumi* dianggap sebagai lembaga untuk membantu pemerintahan desa, karena beban kerja pemerintah yang meningkat akibat situasi perang.²⁶ Sebuah lembaga ekonomi yang dibentuk Jepang dan dianggap penting adalah *kumiai*, yaitu mesin Jepang untuk mengendalikan ekonomi. *Kumiai* semacam koperasi gaya Jepang yang berbeda dengan koperasi masa kolonial Belanda. Alasan pemerintah militer Jepang membentuk koperasi gaya Jepang untuk melindungi perekonomian pribumi dari serbuan ekonomi luar, seperti China. Akan tetapi, pada kenyataannya pemerintah Jepang justru memperkuat cengkeramannya atas kegiatan ekonomi pribumi serta China. Jadi, walaupun tujuan membentuk ke dua lembaga baru ini adalah melindungi kegiatan ekonomi pribumi dari serbuan asing terutama China, akan tetapi sasaran pokoknya adalah untuk mempermudah pemerintah Jepang dalam mengontrol kegiatan pribumi. Bagi pribumi sendiri dengan dibentuknya kedua lembaga sosial tersebut mempunyai dampak positif, karena masyarakat secara langsung dapat terlibat dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan memiliki akses kepemimpinan desa.²⁷

Pemerintah Jepang berusaha untuk mengganti budaya Barat dengan budaya Jepang (Jepangisasi), akan tetapi masyarakat bumiputera

25 Sartono Kartodirdjo, Sejarah Pergerakan Nasional Jilid I (Jakarta: Gramedia), hlm. 172.

26 Kurasawa.op. cit., hlm.201-202.

27 Kurasawa, op. cit., hlm. 208

(Indonesia) tidak paham dengan budaya dan bahasa Jepang secara menyeluruh, maka Jepang mengganti semua simbol dan struktur Barat dengan kebudayaan setempat dan juga mengenalkan budaya Jepang kepada masyarakat. Pemerintah Jepang mengizinkan bahasa Melayu menjadi bahasa resmi dan pergaulan di samping bahasa Jepang sendiri, memberikan kedudukan yang strategis kepada orang bumiputera yang dianggap cakap dalam bidangnya, mengganti nama-nama dari bahasa Barat dengan bahasa Melayu atau Jepang. Kebijakan Jepang yang berkaitan dengan budaya ini memantapkan akar-akar nasionalisme yang telah tumbuh pada masa kolonial Belanda.

Bagi masyarakat Indonesia organisasi masa yang dibentuk oleh pemerintah Jepang dalam rangka memenuhi kebutuhan perang Asia Timur raya mempunyai arti penting, terutama bagi masyarakat desa, mereka mulai menyadari adanya dunia yang lebih luas, jauh dari batas-batas desa mereka.²⁸ Selain itu, Juga membuka mata penduduk desa akan pentingnya informasi, memberi kesempatan mendapatkan pendidikan dan hidup berorganisasi. Dengan terbentuknya organisasi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, maka terjalin suatu akar organisasi yang kokoh dari tingkat atas sampai lapisan masyarakat yang paling bawah, bahkan memperkokoh koherensi setiap lapisan dalam pengalaman kehidupan berorganisasi.²⁹

Masa pendudukan Jepang yang singkat memberi pengaruh yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Di satu sisi, eksploitasi besar-besaran baik sumber daya alam, maupun sumber daya manusia menumbuhkan rasa antipati yang sangat mendalam terhadap pemerintah Jepang. Bangsa Indonesia mengalami masa traumatik yang mendalam baik dari segi fisik maupun physis yang mempengaruhi segala aspek kehidupan.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 83.

²⁹ Cribb, *op.cit.*, hlm. 35.

Semangat perjuangan bangsa Indonesia semakin meningkat dengan terjalinnnyakomunikasi secara intensif antara tokoh pergerakan dari nasionalis sekuler dan tokoh nasionalis agama dengan masyarakat secara umum, dari perkotaan hingga pelosok pedesaan. Ungkapan tokoh militer Indonesia, A.H. Nasution menganggap bahwa masa pendudukan Jepang merupakan masa yang sulit tetapi penuh dengan semangat kebangsaan untuk merdeka dari kekuatan asing:

Masa ini saya rasakan sebagai masa latihan yang penting, di mana saya dapat berdialog dengan pemimpin-pemimpin masyarakat khususnya tokoh-tokoh politik, dan dalam masa ini pula untuk pertama kalinya dapat langsung secara aktif dalam pimpinan gerakan-gerakan kemasyarakatan, khususnya kepemudaan baik dalam organisasi formal maupun non formal atau di bawah tanah, yang merupakan pengalaman-pengalaman yang berguna. Saya merasa bersyukur atas kesempatan luas untuk pendidikan pribadi dalam masa yang sulit ini. Sehingga saya menyimpulkan periode ini sebagai tahap yang menentukan bagi kehidupan saya untuk seterusnya, yakni bukan untuk menjadi sekedar militer, tetapi juga untuk pertama-tama berusaha sebaik-baiknya dalam perjuangan nasional.³⁰

Pengetahuan dasar berorganisasi dan memahami sedikit taktik dan strategi perang secara bergerly, serta semangat anti Barat semakin memperkuat semangat kebangsaan. Salah satu bentuk keberanian anak bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa dan Negara Indonesia adalah pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November 1945 yang telah menelan korban anak bangsa.

Karesidenan Besuki tidak kalah dalam mempertahankan daerahnya dari serangan tentara asing. Pertempuran terjadi di daerah-daerah yang menurut Belanda merupakan daerah vital, salah satunya adalah Jember. Akan tetapi, Jember pun tidak jauh berbeda dengan daerah lain, di mana beberapa pemuda telah memasuki organisasi kemasyarakatan dan semi militer yang dibentuk oleh Jepang dalam rangka mendukung perang

30 A.H. Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas : Kenangan Masa Muda*, Jilid I (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 72.

Asia Timur Raya. Rakyat Jember pun sudah siap dalam menghadapi agresi militer Belanda. Salah satu pertempuran yang melibatkan pasukan Indonesia (Brimob) yang dibantu rakyat dengan KNIL terjadi di Desa Jomerto.

B. Karesidenan Besuki Pada Masa Pemerintahan Jepang

Dalam pertempuran yang singkat antara pasukan Belanda dengan pasukan Republik Indonesia di Desa Jomerto menggambarkan adanya ikatan yang erat antara warga desa dengan pasukan Brimob. Hal ini dapat ditelusuri dari latar belakang sebelumnya mengapa masyarakat di pedesaan menjadi sangat patriotis.

Karesidenan Besuki pun tidak terlepas dari pengaruh penerapan kebijakan pemerintahan militer Jepang, karena pemerintah mengembangkan jaringan propaganda ke berbagai pelosok desa. Staf propaganda pemerintah Jepang ini dikirim ke kota-kota besar untuk mendapatkan latihan-latihan yang sistematis. Peran ulama tetap yaitu memberikan ceramah keagamaan kepada umat, akan tetapi diwajibkan untuk menjalankan menjalankan propaganda sesuai dengan keinginan pemerintah Jepang yang telah digariskan dalam pelatihan, beberapa eks peserta ditugaskan untuk menangani kewajiban baik di kantor pemerintah maupun di masyarakat.

Berkaitan dengan kegiatan Masyoemi , maka untuk mendapatkan dukungan dari golongan muslimin, para pengurus Masyoemi melakukan perjalanan keliling Jawa dan Madura. Maksud perjalanan keliling tersebut untuk membentuk organisasi Masyoemi di daerah-daerah. Kegiatan yang dilakukan oleh Masyoemi selain berdakwah juga memberi semangat perjuangan bagi kaum muslimin untuk menjadi bagian dalam perjuangan kebangsaan. Jepang meyakini bahwa kegiatan Masyoemi yang berada di bawah pengawasan pemerintah akan dapat dikontrol. Akan tetapi,

Masyoemi dapat mempengaruhi umat muslim untuk bertindak secara nyata dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari.³¹

K. Dhofier, seorang guru pesantren di Jember, mengikuti pelatihan propaganda di Jakarta sekitar bulan Maret 1944, setelah kembali ia diangkat sebagai popagandis sambil tetap mengajar di pesantrennya di Jember.³² Kemudian seorang guru pesantren lainnya di Jember, K. Zaenuri diangkat sebagai pegawai propaganda di Kabupaten Jember dan dikirim ke Jakarta selama lima belas hari untuk dilatih sebagai propagandis, setelah menerima latihan sebagai alim ulama.³³ Dengan demikian, beberapa kiyai di Jember telah mengikuti pelatihan kepemimpinan, akan tetapi tidak semua kiyai mengikuti keinginan Jepang. Mereka berusaha untuk tetap menggunakan perannya membela kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pemerintah Jepang yang sangat eksploitatif.

Hubungan antara pemimpin Jepang dan Indonesia tidak berjalan lancar, khususnya di Karesidenan Besuki karena terdapat kasus pemecatan dan penangkapan pangreh praja yang sewenang-wenang. Di Karesidenan Besuki yang meliputi Kabupaten Jember, Situbondo, Banyuwangi, dan Bondowoso terjadi pergantian kepala desa di tujuh desa, sementara di tempat lain hanya satu kali pergantian dalam waktu yang bersamaan.³⁴ Ketidakharmonisan hubungan antara pemerintah Jepang dengan pemimpin bumiputera mengakibatkan adanya rasa benci yang mendalam terhadap kepemimpinan orang-orang Jepang di daerah tersebut.

Pada umumnya kondisi masyarakat Karesidenan Besuki pada masa pendudukan Jepang tidak jauh berbeda dengan saudara-saudara lainnya

31 Nawiyanto, *op. cit.*, hlm. 76-77

32 Kurasawa, *op.cit.*, hlm. 320

33 Kurasawa, *op.cit.*, hlm. 236.

34 Kurasawa, *op. cit.*, hlm.442.

di wilayah yang berbeda. Eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya manusia melalui berbagai program pemerintah terutama program *romusha* membuat masyarakat Karesidenan Besuki tidak menyukai pemerintahan dan orang-orang Jepang. Dengan demikian, bibit-bibit ketidaksukaan ini membuat masyarakat di Karesidenan Besuki, khususnya Jember berusaha untuk melepaskan diri dari cengkeraman penjajahan asing.

Kesiapan warga Jember untuk menjadi masyarakat yang merdeka telah dibuktikan melalui suatu pertempuran yang terjadi di daerah Jomerto. Pertempuran yang terjadi masa revolusi fisik menjadi suatu bukti, bahwa masyarakat Jember telah bangkit dan sadar sebagai warga negara yang ingin bebas dari kekuatan dan kekuasaan asing. Pelatihan dasar yang diberikan dalam kegiatan organisasi yang dibentuk pemerintahan militer Jepang, secara tidak langsung telah mengubah pola pikir serta membentuk rasa patriotisme yang tinggi terhadap negara kebangsaan sendiri, yaitu Republik Indonesia. Palagan Jomerto merupakan bukti keheroikan warga Jember dalam memepertahankan kemerdekaan dari rongrongan bangsa asing.

BAB 3

DARI PROKLAMASI HINGGA PERISTIWA MADIUN

Peristiwa pertempuran di Jomerto merupakan salah satu fragmen yang ikut mewarnai kisah perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Dengan pemahaman Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah yang tidak terpisahkan, maka semua peristiwa yang terjadi di daerah-daerah perlu dipandang dan ditempatkan sebagai komponen yang ikut menyusun dan menganyam sejarah nasional Indonesia. Berbagai peristiwa dan perkembangan yang terjadi di tingkat nasional ikut mempengaruhi bahkan menentukan jalannya peristiwa maupun dinamika di daerah-daerah. Dalam alur pemahaman demikian, peristiwa pertempuran di Jomerto, sebagaimana pula halnya dengan berbagai peristiwa yang berlangsung di daerah lain, pada dasarnya merupakan konsekuensi lebih lanjut dari perkembangan yang berlangsung di tingkat nasional.

Berkaitan dengan alur pemahaman tersebut, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pertempuran Jomerto perlu diuraikan terlebih dahulu latar belakang politik nasional pada masa awal kemerdekaan. Melaluinya hendak diperlihatkan adanya kaitan dan pengaruh perkembangan politik nasional terhadap pertempuran di Jomerto. Oleh karena yang terlibat dalam pertempuran Jomerto adalah pasukan Mobile Brigade Polisi (Mobrig), dalam bagian lain dirasa sangat perlu untuk menyajikan uraian mengenai proses terbentuknya pasukan

Mobile Brigade Polisi. Dalam bagian ini akan dipaparkan pula perjalanan peran yang dimainkan pasukan Mobile Brigade Polisi dari usaha merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Dalam bagian selanjutnya akan disinggung peranan Mobile Brigade Polisi dalam penumpasan pemberontakan komunis di Madiun serta *long march* dari tempat penugasan operasi penumpasan kaum pemberontak komunis menuju kantong gerilya di Bondowoso. Uraian ini dipandang penting karena perjalanan *long march* inilah nantinya yang melahirkan pertempuran di Jomerto. Kemudian disusul dengan uraian yang berisi deskripsi prosesus pertempuran Jomerto maupun berbagai akibat yang ditimbulkannya.

A. Kondisi Politik Awal Kemerdekaan

Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 pagi Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Setelah teks proklamasi dibacakan, bendera nasional Sang Merah Putih dikibarkan sebagai simbolisasi fakta bahwa bangsa Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Selanjutnya lagu Indonesia Raya dikumandangkan oleh semua orang yang hadir dalam upacara dengan penuh bangga dan suka cita.¹

Demikianlah Hatta memaparkan pengalamannya pada suatu hari yang kemudian dianggap keramat, sakral dan mempunyai arti sangat penting dan mendalam bagi perjalanan sejarah Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara yang merdeka serta berdaulat. Dengan posisi demikian Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara telah menyejajarkan dirinya berada pada kedudukan yang sederajat dengan bangsa-bangsa lain yang telah merdeka dan berdaulat.

1 C.L.M. Penders, *Mohammad Hatta Indonesia Patriot*, Singapore: Gunung Agung, 1981), hlm. 240.

Berkaitan dengan kelahiran Indonesia sebagai negara dan bangsa yang berdaulat, Ahmad Soebardjo, salah seorang pelaku sejarah memberikan kesaksian bahwa keputusan untuk memproklamasikan kemerdekaan diambil melalui proses yang alot dan panas. Proses menuju proklamasi diwarnai silang pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Silang pendapat ini bahkan mencapai klimaks dengan dilakukannya penculikan terhadap Soekarno-Hatta yang dikenal dengan peristiwa Rengasdengklok. Sekelompok pemuda bermaksud memaksa Soekarno-Hatta untuk dengan segera memanfaatkan keadaan *vacuum of power* yang tengah berlangsung untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia.²

Berita mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia sejak tanggal 18 Agustus menyebar dengan cepat ke berbagai daerah. Penyebaran ini semula melalui komunikasi secara lisan karena pemerintahan bala tentara Jepang yang menguasai alat-alat komunikasi tidak menginginkan berita tersebut tersebar luas. Hal ini berkaitan dengan kewajiban yang dibebankan kepada pemerintah bala tentara Jepang oleh pihak Sekutu yang telah keluar sebagai pihak pemenang dalam pertempuran. Jepang ditugaskan untuk tetap memelihara status quo sampai pihak Sekutu melakukan pengambilalihan kekuasaan. Akan tetapi, pada tanggal 22 Agustus 1945 berita mengenai proklamasi kemerdekaan berhasil dipublikasikan secara resmi dalam surat kabar *Asia Raya*.³

Beriringan dengan menyebarnya berita tentang proklamasi kemerdekaan, maka mulai muncullah serangkaian tanggapan berbagai rupa. Tanggapan – tanggapan yang muncul misalnya keinginan untuk mengambil alih administrasi pemerintahan dari tangan Jepang, melucuti dan merebut senjata yang dikuasai Jepang. Di berbagai tempat reaksi

2 Ahmad Soebardjo, *Lahirnya Republik Indonesia* (Bandung: PT Kinta, 1977), hlm. 83 – 144. Berbagai kesaksian mengenai Peristiwa Rengasdengklok juga dapat dibaca dalam Pamoe Rahardjo, *Tentara Peta (Pembela Tanah Air)* (Jakarta: Majalah “PETA”, 1993).

3 R. Z. Leirissa, *Sejarah Masyarakat Indonesia 1900 – 1950*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm. 93.

terhadap proklamasi sempat melahirkan pertempuran dengan Jepang misalnya di Semarang. Di berbagai tempat yang lain malahan proklamasi kemerdekaan melahirkan revolusi sosial yang bermaksud menumbangkan kekuasaan pangreh praja seperti misalnya di Karesidenan Pekalongan.⁴

Revolusi sosial terhadap kekuasaan birokratis pangreh praja meletus akibat sikap pangreh praja dianggap kurang responsif terhadap proklamasi kemerdekaan. Dalam pandangan rakyat kelompok pangreh praja dianggap mendukung status quo. Akan tetapi, alasan yang lebih mendasar sebenarnya adalah dendam rakyat yang begitu besar terhadap pangreh praja sehubungan dengan tindakan – tindakan mereka di masa lalu ketika masih berada di bawah kolonialisme Belanda maupun pendudukan Jepang. Kaum pangreh praja telah menempatkan dirinya sebagai alat eksploitasi kolonial untuk memeras rakyat baik demi kepentingan penguasa kolonial. Alasan yang lebih menyakitkan lagi adalah kelompok pangreh praja tidak jarang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri dengan menaruh beban kewajiban serta pungutan yang jauh lebih besar dari yang semestinya.⁵

Di Surabaya tanggapan masyarakat terhadap proklamasi salah satunya dimanifestasikan dalam bentuk rapat-rapat raksasa. Rapat raksasa terselenggara pada tanggal 11 September di lapangan Tambaksari dan hal serupa terjadi pula di lapangan Pasar Turi pada tanggal 17 September 1945. Kegiatan tersebut sebagian besar dihadiri oleh kaum muda dari berbagai lapisan dan golongan seperti mahasiswa, pelajar, pedagang, tukang becak, buruh, bahkan juga pencopet maupun preman.⁶

4 Lihat Anton E. Lucas, *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi Dalam Revolusi* (Jakarta: Grafiti Pers, 1989).

5 Lucas, *ibid.*, hlm. 9 – 71; Mengenai eksploitasi pada masa pendudukan tentara Jepang secara jelas dan terperinci dapat ditemukan uraiannya dalam Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942 – 1945* (Jakarta: Yayasan Karti Sarana bekerjasama dengan PT Gramedia, 1993), hlm. 167 – 225.

6 Ben Anderson, *Revolusi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944 – 1946* (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1988), hlm. 149 – 151.

Dalam berbagai pertemuan akbar tersebut mereka mencetuskan seruan-seruan untuk merebut dan mengambil-alih kantor-kantor dan gedung-gedung pemerintahan. Akibatnya serangkaian aksi massa tanpa dapat dicegah lagi bermunculan dengan sasaran pusat-pusat kegiatan dan berbagai fasilitas yang dikuasai Jepang. Dalam rangkaian aksi ini termasuk pula perebutan dan pelucutan senjata yang ada di tangan tentara pendudukan Jepang. Sejumlah senjata yang berhasil direbut kemudian dijadikan modal dalam melakukan perjuangan mempertahankan kemerdekaan terhadap kolonialis yang bermaksud menanamkan kembali kekuasaannya di Indonesia.

Apa yang berlangsung di kota Surabaya segera diikuti dengan aktivitas serupa di daerah-daerah lain. Tidak ketinggalan pula aksi perebutan dan perlucutan terhadap pasukan pendudukan Jepang berlangsung pula di daerah Karesidenan Besuki. Keberanian para pejuang di Besuki rupanya telah tergugah oleh peristiwa-peristiwa yang berlangsung di Surabaya. Hal yang sama pun kemudian mereka lakukan terhadap pusat-pusat pemerintahan dan fasilitas Jepang di kawasan Besuki seperti Jember, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi.

Tentara Jepang di Besuki tidak dapat menghindarkan diri dari aksi-aksi perlucutan dan perebutan persenjataan yang dilancarkan kaum pejuang Republik Indonesia di kawasan Besuki. Kegiatan perebutan dan perlucutan misalnya dipimpin oleh Inspektur Polisi Soetjipto Joedodihadjo. Tentara Jepang yang dikalahkan Sekutu rupanya sudah tidak bersemangat lagi untuk melakukan perlawanan sehingga dengan mudah mereka dilucuti. Tentara Jepang yang dilucuti semula dikumpulkan di kamp konsentrasi di Garahan (Sempolan) namun kemudian dipindahkan di kamp interniran yang baru di Balungtutul/Balung, Jember. Sesuai instruksi pemerintah Republik Indonesia mereka selanjutnya dinaikkan

kapal di pelabuhan Probolinggo untuk dipulangkan ke Jepang.⁷

Pengembalian mereka ke Jepang ditangani oleh Sekutu karena hal ini menjadi salah satu tugas yang dibebankan dengan kedatangannya di Indonesia. Dipulangkannya tentara Jepang tidak berarti para pejuang Republik Indonesia di Besuki sudah tidak menghadapi masalah. Permasalahan baru timbul karena kedatangan Sekutu ternyata diboncengi oleh NICA yang bermaksud memulihkan status quo seperti sebelum tahun 1942. Pada awal tahun 1946 NICA/Belanda berhasil menguasai Bangka, Belitung, Riau dan pada bulan Juli Belanda diserahkan wilayah Indonesia oleh Sekutu kecuali Jawa dan Sumatera.⁸ Namun demikian, pasukan Belanda telah diberi kekuasaan melakukan patroli di garis demarkasi sekitar Jakarta.

Hal tersebut menimbulkan ketegangan-ketegangan yang semakin memuncak antara pihak Republik Indonesia dengan pihak Belanda. Terlebih lagi Belanda secara terang-terangan meneruskan langkah untuk menguasai Jawa dan Sumatera, padahal dalam perjanjian Linggarjati Belanda telah mengakui secara de facto kekuasaan RI atas Jawa dan Sumatera.⁹ Rencana penguasaan kembali wilayah Republik melalui agresi militer diselesaikan pada bulan Juni 1947. Belanda menyiapkan tiga rencana operasi, yaitu: Operasi Produk, Operasi Amsterdam, dan Operasi Rotterdam. Terdapat tiga target pokok dalam Operasi Produk:

1. Merebut dan menduduki wilayah-wilayah yang secara ekonomis penting khususnya perkebunan dan penghasil bahan pangan
2. Melakukan tekanan secara politis kepada pihak Republik

7 Team Kodak X Jatim, *Peranan Polri Dalam Perjuangan Kemerdekaan di Jawa Timur 1945 – 1949* (Surabaya: Kodak X Jawa Timur, 1982), hlm. 62 – 63.

8 M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), hlm. 334.

9 *Ibid.*, hlm. 337.

agar menerima kesepakatan Linggarjati sepenuhnya.

3. Menduduki wilayah-wilayah teritori Republik Indonesia untuk dijadikan jaminan bila terjadi perundingan lanjutan.¹⁰

Bukti konkret keinginan Belanda menguasai RI terlihat dengan dilancarkannya aksi militer pada bulan Juli 1947.¹¹ Aksi militer Belanda ke wilayah Besuki merupakan bagian dari Agresi Militer Pertama yang dimulai pada 21 Juli 1947. Di daerah Besuki aksi militer Belanda ditandai dimulai dengan pendaratan pasukan di pantai Pasir Putih, Situbondo.¹² Pendaratan berjalan dengan lancar karena kondisi pantai yang landai maupun dimungkinkan berkat dukungan pesawat udara dan kendaraan lapis baja.¹³ Pada saat pagi buta kekuatan militer Belanda melakukan pendaratan di Pantai Pasir Putih Kabupaten Situbondo secara berlombang, yang terdiri dari empat *landingschepen personel*, pasukan penyerbu, dan kapal pengintai. Sekitar pukul 10.00 WIB, kapal pengintai “Piet Hein” melepaskan tembakan meriam. Dalam durasi sepuluh menit, sekitar 200 tembakan diarahkan ke sasaran. Pada pukul 10.14 WIB, tembakan dihentikan dengan tanda tembakan peluru yang mengeluarkan cahaya merah. Tidak lama kemudian menyusul serangan udara yang dilancarkan melalui pengerahan pesawat-pesawat udara yang melepaskan tembakan metraliur dan menjatuhkan bom-bom ke posisi-posisi pejuang republik dan pusat-pusat logistik.¹⁴

10 Himawan Soetanto, *Yogyakarta: Jendral Spoor (Operatie Kraai) versus Jendral Sudirman (Perintah Siasat No. 1)* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 74-75.

11 Robert B. Cribb, *Gejolak Revolusi di Jakarta 1945 – 1949: Pergulatan Antara Otonomi dan Hegemoni*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990), hlm. 150.

12 Panitia Peristiwa Korban Gerbong Maut Bondowoso, “Sekelumit Sejarah Kepahlawanan: Kisah Peristiwa Perjalanan K. A. Gerbong Maut Bondowoso – Wonokromo”, *Brosur*, (Bondowoso: Panitia Peristiwa Korban Gerbong Maut, t. t.), hlm. 1.

13 Dison Mulyadi, “Peranan Perjuangan Rakyat Bondowoso Menghadapi Agresi Belanda I 1947”, *Laporan Penelitian*, (Jember: Pusat Penelitian Universitas Jember, 1984), hlm. 37.

14 “Angkatan Laoet Keradjaan Menoelis Sedjarah di Djawa Timur” dalam *Saudara Seperdjoeangan*, Tahun 2 No. 21, 8 September 1947, hlm. 8-9; G.A. Ohorella dan Restu Gunawan, *Sejarah Lokal Peranan Rakyat Besuki (Jawa Timur) pada Masa Perang Kemerdekaan* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2001), hlm. 51-52.



Foto 3.1 Pendaratan pasukan Belanda di Pasirputih (Koleksi KITLV, No. KLV001060457)

Ketika sampai di pertigaan Panarukan, pasukan Belanda memecah diri menjadi dua kolone besar. Sebuah kolone bergerak kearah Barat

melalui Jalan Raya Daendels untuk menyerang Probolinggo. Kolone yang lain menyusur ke arah Timur menuju Situbondo.¹⁵ Saat pasukan Belanda mendarat di Pasir Putih, wilayah ini dipertahankan oleh Kesatuan Tentara Laut Republik Indonesia (TLRI) dari Pangkalan X/A yang berada di bawah komando Mayor Waraou, selain didukung pula Batalyon TRI, dan berbagai kekuatan kelaskaran. Dengan persenjataan lengkap dan modern, kekuatan pasukan Belanda mampu mendesak kekuatan Republik dan sekitar pukul 14.00 WIB, kekuatan militer Belanda menguasai Kota Situbondo. Hari berikutnya pasukan Belanda bergerak ke arah barat daya menyerang kota Bondowoso dengan didukung kendaraan lapis baja dan pesawat udara. Kota Bondowoso dianggap penting mengingat kedudukannya yang penting sebagai ibukota Karesidenan Besuki.¹⁶ Untuk menghambat gerak militer Belanda, Batalyon Magenda melakukan perlawanan didukung Batalyon 14 Garuda Putih di bawah komando Mayor Syafuludin.¹⁷

Para pejuang republik yang mempertahankan Bondowoso di bawah pimpinan Mayor Magenda serta pasukan Mobile Brigade Polisi di bawah pimpinan Soetjipto Joedodihardjo membangun front di Klabang. Dengan keunggulan perlengkapan senjata militer Belanda mampu memukul mundur kekuatan republik ke arah pegunungan. Pasukan republik dipaksa menerapkan taktik perang gerilya, dan membiarkan Kota Bondowoso jatuh ke tangan pasukan Belanda, yakni Mariniers Brigade “Gajah Merah” yang dikomandoi Overste Brendgen.¹⁸ Pasukan pejuang mengundurkan diri ke desa Krocok tidak lama kemudian pindah lagi ke Curahdami. Operasi militer Belanda menyapu Curahdami sehingga kekuatan pejuang mundur ke desa Kahyangan di lereng Argopuro. Di tempat ini kedudukan

15 Nasution, *ibid.*; Dison Mulyadi, *ibid.*

16 Panitya Peristiwa Korban Gerbong Maut Bondowoso, *loc.cit.*

17 R. Soetojo, “Sekilas Perjuangan Fisik Membela dan mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia di Daerah Jember”, dalam *Bunga Rampai Perjuangan dan Pengorbanan*, Jilid IV (Jakarta: Markas Besar Legiun Veteran RI, 1991), hlm. 494.

18 Soetojo, “Sekilas Perjuangan Fisik”, hlm. 494.

pimpinan dilakukan pemisahan, Mayor Magenda di Desa Pangepok, IP Soetjipto di Desa Tanah Bulan, Maesan dan Soekari di Desa Sucokebun. Dari tempat ini serangan-serangan gerilya terhadap pasukan Belanda dibangun oleh kekuatan militer dan kelaskaran Republik.¹⁹

Setelah berhasil menduduki Bondowoso, kekuatan militer Belanda bergerak ke arah Kota Jember. Pergerakan militer Belanda merebut Kota Jember terjadi pada saat para pejuang republik melakukan konsolidasi mempertahankan kota, yang melibatkan di antaranya Pasukan TRIP Batalyon 5000 Kota Malang dengan TRIP Batalyon 4000 Kota Jember. Ketika koordinasi tengah berlangsung, pesawat-pesawat udara Belanda membombardir tempat pertemuan. Gerak militer Belanda dengan keunggulan senjata yang dimiliki susah dihentikan laskar-laskar republik dan Kota Jember pun akhirnya dikuasai Belanda pada tanggal 22 Juli 1947. Kekuatan republik mengundurkan diri ke wilayah pedesaan di sekitar Kota Jember untuk melancarkan strategi perang gerilya dengan dukungan rakyat pedesaan.²⁰

19 Kepolisian Resort Jember, *Palagan Jomerto: Perjuangan Polri dalam Perang Kemerdekaan RI, Jember: Kepolisian Indonesia Resort Jember, 1984*, hlm. 21 – 22.

20 Ohorella dan Gunawan, *Sejarah Lokal*, hlm. 54; Soetojo, "Sekilas Perjuangan Fisik", hlm. 495-497; ANRI, Koleksi Arsip Kementerian Pertahanan No. Inventaris 1377, "Peninjauan di Daerah2 Pendoedoekan di Karesidenan Malang dan Besoeki, pada tg. 18/10-4/11-47"; ANRI, Koleksi Arsip Kementerian Penerangan, No. Inventaris 94, "Laporan No. 20/ Secr/G/tg. 1-12-48: Daerah Pendudukan Besuki".



Foto 3.2 Marinir Belanda di Pasir Putih (Koleksi KITLV001060460)

Pada bulan Januari 1948 antara pihak RI dengan pihak Belanda tercapai kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Renville. Perjanjian ini diselenggarakan di atas kapal USS Renville yang berlabuh di pelabuhan Jakarta. Perjanjian ini berlangsung di bawah naungan Komite Jasa-Jasa Baik (*Good Offices Committee*) yang beranggotakan Australia, Belgia dan Amerika Serikat. Dalam perjanjian ini delegasi Indonesia langsung dipimpin Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda di bawah pimpinan R. Abdulkadir Wijoyoatmo. Hasil perjanjian Renville ini mengakui suatu gencatan senjata di sepanjang apa yang disebut garis van Mook, suatu garis yang menghubungkan titik-titik terdepan pihak Belanda.²¹

Ditinjau dari segi daerah kekuasaan, perjanjian ini kurang menguntungkan RI karena mempunyai konsekuensi penciptaan wilayah RI

21 Ricklefs, *op. cit.*, hlm. 340; Penders, *op. cit.*, hlm. 267; Cribb, *op. cit.*, hlm. 166.

sehingga hanya meliputi sebagian Jawa dan Sumatera.²² Dari segi militer kekuatan pasukan RI yang telah selama beberapa waktu melancarkan perjuangan gerilya terpaksa harus ditarik dari kantong-kantong gerilya.²³ Persetujuan Renville mengharuskan Divisi Siliwangi meninggalkan benteng-benteng pertahanan di Jawa Barat yang dengan susah payah dibangun menuju daerah yang menjadi wilayah RI yakni Jawa Tengah. Sementara itu, sesuai dengan kesepakatan yang dicapai dalam Perjanjian Renville pula, maka pasukan RI yang bergerilya di daerah Bondowoso dihijrahkan ke Blitar.²⁴

Penerimaan persetujuan Renville oleh pihak Republik dalam hal ini Amir Syarifuddin semula dimaksudkan sebagai taktik untuk mempertahankan pemerintah pusat dengan mengorbankan daerah-daerah pinggiran. Dengan menerima perjanjian yang mendapat dukungan internasional tersebut diharapkan posisi Republik semakin kokoh. Akan tetapi, langkah yang ditempuh Amir Syarifuddin rupanya harus dibayar dengan biaya yang mahal. Kontroversi mengenai Perjanjian Renville bermunculan di dalam negeri dan melahirkan sejumlah oposisi terhadap Kabinet Amir. Mereka yang tidak menyetujui tindakan Amir menuduhnya telah melakukan politik kompromistis dengan menjual wilayah RI kepada pihak Belanda. Penerimaan Perjanjian Renville juga dianggap sebagai kekalahan pihak Republik karena secara implisit berarti pemberian pengakuan *de facto* terhadap kekuasaan Belanda.²⁵

Oposisi terhadap Kabinet Amir Syarifuddin semakin merebak yang akhirnya bermuara pada penarikan dukungan sejumlah partai terhadapnya. Pada tanggal 15 Januari 1948 Masyumi menarik dukungannya terhadap Kabinet Amir. Dihadapkan pada kenyataan demikian Amir masih

22 Leirissa, *loc. cit.*, hlm. 101

23 T. B. Simatupang, *Pelopop Dalam Perang Pelopop Dalam Damai* (Jakarta: Sinar Harapan, 1981), hlm. 23.

24 Kepolisian Resort Jember, *op. cit.*, hlm. 23.

25 Cribb, *op. cit.*, hlm. 166 – 168.

berharap tetap dapat bertahan dengan mengharapkan dukungan dari sekelompok PNI yang lebih moderat. Akan tetapi, harapan tersebut sia-sia saja karena pada tanggal 18 Januari 1948 kelompok PNI juga melakukan oposisi terhadap Amir dan bahkan menyerukan pembentukan kabinet baru. Hilangnya dukungan PNI membuat Kabinet Amir Syarifuddin tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sehingga pada tanggal 24 Januari 1948 Amir Syarifuddin terpaksa mengundurkan diri dan mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno akibat tekanan Masyumi dan PNI.²⁶

Jatuhnya Kabinet Amir disusul dengan penunjukan Hatta oleh Presiden Soekarno untuk menyusun kabinet baru. Berbekal kepercayaan tersebut Hatta bermaksud menyusun kabinet koalisi yang mengikutsertakan semua partai dalam kabinet untuk menggalang persatuan nasional. Dalam kabinet ini kelompok sayap kiri dengan tokohnya Amir Syarifuddin menuntut empat kursi termasuk jabatan menteri pertahanan. Karena kelompok sayap kiri bersikeras pada tuntutananya, maka Hatta akhirnya tidak melibatkan kelompok sayap kiri dalam kabinetnya setelah tawarannya tidak dimanfaatkan.

Hatta mengumumkan kabinetnya pada tanggal 31 Januari 1948 dan kabinet ini bersifat presidensial, yakni kabinet yang para menterinya bertanggung-jawab kepada presiden. Sistem ini sesuai dengan yang digariskan Undang-Undang dasar 1945 yang menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Meskipun demikian, Soekarno sendiri tidak ingin langsung mempergunakan sistem kabinet presidensial dengan menunjuk dirinya sebagai penanggungjawab pemerintahan. Hal ini lantaran kelanjutan perjuangan menghendaki figur yang dapat diterima baik di dalam negeri khususnya barisan bersenjata maupun luar negeri untuk melanjutkan diplomasi.²⁷ Dalam kabinet ini,

26 Ann Swift, *The Road to Madiun: The Indonesian Communist Uprising of 1948* (Ithaca, New York: Cornell Modern Indonesia Project, Southasia Program Cornell University, 1989), hlm. 17 – 19.

27 Deliar Noer, *Mohammad Hatta Biografi Politik* (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 310.

Hatta memegang posisi sebagai perdana menteri merangkap menteri pertahanan. Jabatan lainnya yang strategis diisi dengan figure-figur yang berasal dari kelompok PNI dan Masyumi.²⁸

Dengan terbentuknya Kabinet Hatta yang tidak mengikutsertakan kelompok sayap kiri memperlihatkan terjadinya pergeseran penting. Setelah selama beberapa waktu tampil di pusat kehidupan politis semasa Kabinet Sjahrir dan Kabinet Amir, kelompok sayap kiri dengan tampilnya Hatta mulai tergusur. Dalam konteks ini tampaknya cukup relevan meminjam teori Dahrendorf yang membuat dikotomi antara pemilik kekuasaan otoritatif dengan yang tidak mempunyai kekuasaan otoritatif. Kekuasaan otoritatif dimaksudkan sebagai kekuasaan yang bersumber pada kedudukan (*authority*) yang dibedakan dengan *power* yang bersumber pada kepribadian individual.²⁹

Dikaitkan dengan teori tersebut, kelompok sayap kiri rupanya telah tersingkir dari kekuasaan otoritatif terutama setelah menempatkan diri berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Pada posisi demikian kelompok sayap kiri mempunyai kepentingan yang berbeda dengan kelompok yang memerintah. Perbedaan kepentingan ini dikonsepsikan Dahrendorf sebagai akar terjadinya konflik. Kalau kepentingan Hatta dan kelompok yang memegang kekuasaan otoritatif adalah mempertahankan kekuasaan, maka kelompok sayap kiri mempunyai kepentingan merebut kekuasaan otoritatif.

Pada mulanya kepentingan kelompok sayap kiri untuk mengubah hubungan kekuasaan yang ada ditempuh melalui cara-cara konstutisional dengan memerankan diri sebagai partai oposisi. Peranan ini dimainkannya sampai dengan bulan Mei 1948. Dalam periode ini kelompok sayap kiri, yang sejak bulan Februari 1948 menamakan diri sebagai Front Demokrasi

28 Ann Swift, *op. cit.*, hlm. 19 – 21.

29 Ralf Dahrendorf, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri* (Jakarta: CV Rajawali, 1984), hlm. 201 - 202

Rakyat (FDR) banyak melontarkan kritik terhadap kabinet Hatta. Kritik keras terutama dilontarkan kepada para menteri yang berasal dari Partai Masyumi. Menteri Sosial Sjafruddin Prawiranegara misalnya dituduh sebagai pembela kapitalisme. Kritik serupa dilontarkan terhadap Sukiman yang menjabat Menteri Dalam Negeri. Dalam Kongres di Yogyakarta tanggal 24 – 26 April 1948 FDR mengkritik pemerintah agar mencabut pajak, menjamin hak mogok, meningkatkan perjuangan melawan dunia kapitalisme. Tujuan semua ini sebenarnya adalah ingin memperlemah pemerintahan yang pada gilirannya jika memungkinkan mereka dapat memaksakan pembentukan kabinet baru di bawah kepemimpinan FDR.³⁰

Kabinet Hatta ternyata cukup kokoh terbukti mampu bertahan terhadap berbagai langkah yang dilakukan FDR untuk menggoyang melalui berbagai isu. Tidak mengherankan kalau mulai bulan Juni 1948 kelompok FDR mulai meningkatkan tekanannya terhadap Kabinet Hatta dengan menggerakkan aksi pemogokan di berbagai tempat. Pemogokan berskala besar misalnya terjadi di Delanggu, Klaten yang pecah pada tanggal 23 Juni 1948.³¹

B. Menuju Pemberontakan Komunis di Madiun

Di luar harapan FDR Kabinet Hatta ternyata tetap tidak tergoyahkan. Hal yang lebih mengecewakan lagi bagi FDR adalah mulai dirasakannya perkembangan yang mengkhawatirkan sehubungan dengan program reorganisasi dan rasionalisasi (Rera) yang dijalankan Hatta. Melalui program ini Hatta bermaksud menata kembali dan mengurangi jumlah kekuatan pasukan TNI. Jumlah pasukan TNI yang ada dipandang tidak efisien bila mengingat kondisi sosial-ekonomi yang buruk serta wilayah

30 Ann Swift, *op. cit.*, hlm. 22 – 23.

31 Pemogokan ini melibatkan 15.567 orang buruh pabrik karung dan 7 buah perkebunan kapas di Delanggu. Isu yang diangkat adalah tuntutan pembagian bahan makanan dan pakaian. A. H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia* (Bandung: Penerbit Angkasa, 1979), hlm. 35

Republik Indonesia yang sempit.³² Kekuatan personel TNI dalam pandangan Hatta jumlahnya juga terlampau besar apabila dibandingkan dengan jumlah senjata yang dimiliki. Dengan program rasionalisasi Hatta merancang rasio antara prajurit dengan senjata adalah 4 banding 1, sehingga prajurit yang kurang memiliki semangat tempur digeser dari ketentaraan dan dikembalikan ke tengah-tengah masyarakat.³³

Kebijaksanaan Hatta tersebut dipandang FDR sangat merugikan dan memperbesar ketidakpuasan mereka yang nantinya menjadi salah satu faktor yang menggerakkan pemberontakan komunis di Madiun. Hal ini disebabkan karena program rasionalisasi bagi FDR berarti demobilisasi atau pembubaran unit-unit gerilya yang telah digalang dalam wadah TNI Bagian Masyarakat yang berada di bawah kontrol pengaruh komunis.³⁴

Dengan kata lain, rasionalisasi yang dijalankan Hatta memperlemah kekuatan dan mengurangi FDR di kalangan tentara. Padahal FDR mempunyai rencana menguasai seluruh tentara untuk dapat dimanfaatkan bagi tujuan mereka. Dapat dipahami kalau FDR menentang secara habis-habisan program rasionalisasi, namun Hatta tetap teguh pada pendiriannya. Dengan tangan besi Hatta menjalankan program yang telah digariskannya demi alasan profesionalisasi tentara maupun pertimbangan untuk perbaikan keadaan ekonomi yang begitu buruk.³⁵

Ketidakpuasan FDR terhadap Hatta terkait pula dengan ditariknya Suripno untuk tidak melanjutkan usaha menjajagi kemungkinan pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Uni Soviet. Tindakan Hatta menarik kembali Suripno membuat FDR mulai

32 Himawan Soetanto, *Perintah Presiden Soekarno: "Rebut Kembali Madiun..."* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 60. Menurut pemikiran Himawan jumlah tentara Republik Indonesia regular dan non-regular mencapai sekitar 800.000 orang.

33 Penders, *op. cit.*, hlm. 281 – 282.

34 Donald Wilhelm, *Emerging Indonesia* (Jakarta: PT Indira, 1980), hlm. 35 – 36.

35 Nugroho Notokusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990), hlm. 154 – 155; Himawan Soetanto, *op. cit.*, hlm. 114 – 115; juga Ricklefs, *op. cit.*, hlm. 343.

memandang pemerintah Hatta bersifat konservatif. Dalam pandangan FDR Indonesia perlu bekerjasama dan bergabung dengan Uni Soviet sebagai kekuatan progresif dalam perjuangan melawan kolonialisme Barat. Pertimbangan Hatta rupanya tidak demikian karena menurutnya kedekatan dengan Uni Soviet bisa menimbulkan hambatan dalam perundingan dengan Belanda maupun pelaksanaan hasilnya. Tentu disadarinya pula bahwa pembukaan hubungan formal dengan Uni Soviet akan lebih banyak menguntungkan kepentingan FDR yang dirancang Uni Soviet sebagai kepanjangan tangannya untuk mengembangkan ideologi komunis di Indonesia.³⁶

Dalam keadaan diwarnai berbagai ketidakpuasan itulah Muso, seorang gembong komunis yang lama tinggal di Uni Soviet muncul kembali di Indonesia pada tanggal 11 Agustus 1948.³⁷ Kedatangan Muso ini mendapat sambutan luar biasa dari orang-orang FDR dan ia membawa garis perjuangan baru bagi kaum komunis. Setelah melalui kritik intern (*selfcritics*), Muso menyadari bahwa organisasi FDR terlampau lemah. Kesadaran ini mendorong Muso mengambil inisiatif melakukan pembenahan organisatoris.

PKI yang sebelumnya bergerak secara *low posture* (lunak) berdasar garis *Dimitrov* dianjurkan untuk mengambil garis baru yang lebih keras yakni garis *Zhadnov* (Stalinis). Dalam garis baru ini gerakan komunis harus meninggalkan kerjasama dengan kaum nasionalis borjuis untuk melakukan perlawanan terhadap kekuatan imperialisme. Garis *Dimitrov* semula dianggap perlu ketika menghadapi ancaman Nazisme dan Fascisme dan tetap dipertahankan karena dianggap masih relevan untuk

36 Ann Swift, *op. cit.*, hlm. 40 – 41.

37 “Keluarga Musso Ragu”, dalam *Murba* tanggal 19 September 1948, hlm. 2. Musso lahir di Desa Pagu, Distrik Papar, Kediri tahun 1897. Ia anak dari Martoredjo. Musso melarikan diri ke Moscow setelah pemberontakan PKI yang gagal pada tahun 1926. Di Moscow ia menjadi anggota staff Comintern dan pada tahun 1948 kembali ke Indonesia dengan menyamar sebagai sekretaris pribadi Suripno.

menghadapi kaum imperialis. Setelah dalam kenyataannya posisi kaum komunis tidak menguntungkan maka dirasakan perlu oleh kaum komunis untuk menempuh garis keras.

Dengan segera Muso melakukan konsolidasi organisatoris untuk menggalang kekuatan melalui seruan gerakan fusi. Semua organisasi yang tergabung dalam FDR dianjurkan meleburkan diri menjadi satu partai kelas buruh dengan nama Partai Komunis Indonesia (PKI).³⁸ Program pembenahan internal FDR ke dalam PKI tersebut rupanya dapat berjalan cepat. Pada tanggal 31 Agustus 1948 Partai Sosialis mengumumkan fusinya dengan PKI. Pengumuman penggabungan juga datang dari SOBSI serta PBI. Sementara itu, Pesindo menyatakan penggabungannya dengan PKI pada tanggal 3 September 1948.³⁹

Tampilnya PKI sebagai pimpinan kelompok kiri mulai September 1948 telah diikuti dengan penyelenggaraan rapat-rapat akbar untuk menggalang dukungan massa. Para pimpinan PKI seperti Muso, Amir Syarifuddin, Setiajid, Wikana giat melakukan perjalanan ke berbagai tempat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka berpidato dalam beberapa kesempatan rapat akbar seperti di Solo pada tanggal 7 September, Madiun tanggal 8 September, Kediri tanggal 11 September, Jombang 13 September, Bojonegoro tanggal 14 September, Cepu dan Purwodadi tanggal 16 September.⁴⁰

Dalam berbagai rapat akbar tersebut para pemimpin PKI melancarkan kampanye dan agitasi dengan target menjatuhkan pemerintahan Hatta secara konstitusional. Dalam pandangan kaum komunis Hatta dianggap sebagai musuh dan simbol nasionalis borjuis.⁴¹ Dalam sebuah rapat akbar

38 "PKI dan SOBSI Mengakui Kesalahan", dalam *Murba*, tanggal 24 Agustus 1948, hlm. 1.

39 Keputusan Pesindo untuk bergabung dengan PKI diambil dalam Rapat DPP Pesindo di Solo yang berlangsung tanggal 31 – 1 September 1948. Lihat "Pertanyaan Pesindo", dalam *Pacific*, tanggal 3 September 1948, hlm. 2.

40 Ann Swift, *op. cit.*, hlm. 61.

41 Ruth T. McVey, "Persona Revolusi: Sejarah dan Aksi dalam Sebuah Naskah Komunis

di Solo yang dihadiri sekitar 7.000 orang, Muso mengkritik pemerintah yang dikatakannya terdiri dari orang-orang feodal dan borjuis yang bekerjasama dengan kolonialis.⁴² Mereka harus diganti dengan orang-orang dari kaum buruh. Dalam pandangan Muso hanya kaum buruhlah yang dapat menyelesaikan “Revolusi Agustus” karena mereka inilah yang benar-benar mempunyai sifat anti imperialisme dan kolonialisme. “Revolusi Agustus” dipandang belum sempurna karena Indonesia menurut mereka masih merupakan masyarakat semi kolonial dan semi feodal.⁴³

Partai Komunis Indonesia sebagai satu-satunya partai buruh mereka paling berhak memikul tanggung jawab bagi penyelesaian “Revolusi Agustus” dalam rangka menyempurnakannya.⁴⁴ Tuntutan semacam ini dengan jelas menunjukkan bahwa kaum komunis bermaksud merebut kekuasaan negara. Untuk memberikan pembenaran atas maksud tersebut kaum komunis dengan tidak henti-hentinya menyalahkan Hatta dan kabinetnya telah menyimpangkan jalannya revolusi.

Suripno dalam sebuah tulisan misalnya menyatakan bahwa revolusi Indonesia sedang sakit karena para pemimpin pemerintahan telah menjadi kaki-tangan imperialis. Mereka ini dikatakannya justru telah menindas kekuatan revolusioner yang anti imperialis di negara sendiri.⁴⁵ Dalam sebuah pesan untuk menyambut proklamasi, Muso menyatakan bahwa secara prinsip Revolusi Indonesia tidak konsekuen bersifat revolusioner dan anti imperialis karena kaum buruh tidak duduk dalam pimpinan negara.⁴⁶

Indonesia”, dalam Anthony Reid dan David Maar (ed.), *Dari Raja Ali Haji Hingga Hamka* (Jakarta: Grafiti Pers, 1983), hlm. 179 – 180.

42 “Hukuman Besar Bagi Pemimpin Yang Menimbulkan Kesengsaraan Rakyat”, dalam *Murba* tanggal 2 September 1948, hlm 2.

43 Ruth T. McVey, *op. cit.*, hlm. 176.

44 *Ibid.*, hlm. 181.

45 “Pemuda dan Revolusi”, dalam *Buruh*, tanggal 18 Agustus 1948, hlm. 1.

46 “Kesalahan Revolusi Yang Prinsipel”, dalam *Buruh* tanggal 17 Agustus 1948, hlm. 1.

Politik kompromi Kabinet Hatta dengan Belanda sebagaimana dicerminkan dalam kegiatan-kegiatan perundingan terus dipersalahkan oleh kaum komunis. Kebijaksanaan Hatta untuk merealisasikan hasil Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville, sekalipun dalam kenyataan Amir Sjarifuddin yang menandatangani, dikatakan kaum komunis sebagai tindakan menjual tanah air bangsa kepada kaum imperialis.⁴⁷ Dengan memvonis tindakan Hatta sebagai tindakan yang “salah” sebenarnya kaum komunis berharap dapat menggoyang pemerintahan Hatta agar kehilangan dukungan. Hilangnya dukungan berarti kabinet tidak mungkin dapat dipertahankan lagi.

Hal tersebut akan berarti tuntutan PKI yang sering dikampanyekan dalam rapat-rapat bahkan juga rapat di tingkat lokal akan terwujud. Rapat-rapat ini diselenggarakan misalnya di Playen (30 Agustus 1948), Nglipas (31 Agustus), Tepus (31 Agustus), Pathuk (2 September) serta di berbagai tempat lain seperti Caruban, Imogiri, Pati, Jepara. Semuanya mengajukan tuntutan pembubaran Kabinet Hatta dan mengusulkan pembentukan kabinet baru yang disebut Kabinet Front Nasional.⁴⁸

Sebenarnya hal itulah yang menjadi tujuan utama semua tindakan PKI, yakni kembali mendominasi kekuasaan otoritatif. Dalam kaitan ini relevan jika dikatakan bahwa tujuan politik adalah merebut kekuasaan yang jika dimungkinkan dilakukan secara konstitusional. Peluang PKI untuk tampil kembali di tengah-tengah kekuasaan otoritatif secara konstitusional baru terbuka kalau Kabinet Hatta yang memegang kekuasaan otoritatif telah tumbang. Oleh karena itu, semua kebijakan Kabinet Hatta yang dipersalahkan kaum Komunis hanyalah merupakan cara untuk memojokkan dan menumbangkan Kabinet Hatta. Hal ini mengingat arsitek perjanjian dengan Belanda khususnya Perjanjian Renville adalah Amir Sjarifuddin sendiri. Dengan demikian, kecaman

47 Himawan Soetanto, *op. cit.*, hlm. 111.

48 “Siapa Pengacau”, dalam *Buruh*, tanggal 19 September 1948. hlm. 1.

kaum komunis lebih merupakan alasan pembenaran bagi tindakan untuk merebut kekuasaan otoritatif. Secara terang-terangan Muso menyatakan bahwa kaum komunis harus mengambil-alih kepemimpinan nasional.⁴⁹

Pada saat beberapa pemimpin PKI dengan memobilisasi dukungan massa untuk tujuan yang telah dirancangnya, perkembangan di tingkat bawah memperlihatkan ketegangan yang semakin meningkat. Di tingkat lokal ketegangan antara massa pendukung PKI dengan pendukung partai lain yang tengah memerintah tidak jarang diwarnai dengan bentrokan-bentrokan fisik maupun penculikan.⁵⁰ Diawali dengan berbagai penculikan ini kemudian berkembang menjadi pertikaian bersenjata antara pasukan Divisi IV yang dipengaruhi komunis dengan Divisi Siliwangi yang berada di Solo. Keberadaan Divisi Siliwangi di daerah Solo merupakan konsekuensi dari pelaksanaan Perjanjian Renville. Sesuai dengan Perjanjian Renville semua pasukan Republik Indonesia yang berada di belakang garis van Mook harus ditarik menuju daerah kekuasaan RI. Bagi Divisi Siliwangi hal itu berarti harus meninggalkan kantong-kantong gerilya di Jawa Barat. Divisi Siliwangi diperintahkan masuk ke daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang masih menjadi wilayah RI. Sebagian batalyon Divisi Siliwangi ditempatkan di daerah Solo.⁵¹

Dalam pertikaian tersebut pasukan Divisi IV tidak mampu mengalahkan Divisi Siliwangi yang dibantu Barisan Benteng. Kekalahan yang dialami Divisi IV yang dibantu Pesindo di daerah Solo telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam di kalangan pucuk pimpinan Pesindo dan pasukan Brigade 29 yang berpusat di Madiun. Pucuk pimpinan Brigade 29 merasakan bahwa rasionalisasi akan segera dilakukan terhadap pasukan Brigade 29. Hal ini berarti pengurangan kekuatan yang telah

49 Ann Swift, *op. cit.*, hlm. 56.

50 "Protes Umum Rakyat di Solo Sekitar Penculikan Pemimpin Rakyat di Solo Sekitar Penculikan Pemimpin Rakyat dan Militer", dalam *Buruh* tanggal 13 September 1948, hlm. 1.

51 Himawan Soetanto, *op. cit.*, hlm. 35 – 57.

lama dipersiapkan sejak Amir Sjarifuddin menjabat menteri pertahanan. Dihadapkan pada kekhawatiran ini, Djoko Soejono dan Soemarsono memutuskan untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah sebelum kekuatannya dilucuti. Gerakan ini agaknya lebih cepat dari yang direncanakan Muso dan Amir Sjarifuddin. Akan tetapi, karena gerakan pemberontakan telah diambil tidak ada pilihan lain bagi Muso dan Amir Sjarifuddin selain mengambil-alih pucuk pimpinan pemberontakan.⁵²

Sebelum pemberontakan komunis di Madiun dilancarkan, di berbagai wilayah di Karesidenan Madiun banyak terjadi kekacauan berupa perampokan, penggarongan, dan pembunuhan. Kekacauan ini terjadi antara lain di Kendal, Jogorogo, Sine di daerah Ngawi.⁵³ Hal yang sama juga berlangsung di daerah Gorang-Gareng, Maospati, Panekan di daerah Magetan.⁵⁴ Kekacauan ini digerakkan oleh orang-orang komunis dengan maksud memecah konsentrasi Mobile Brigade Karesidenan Madiun dan polisi dan tentara yang loyal kepada pemerintah RI Yogyakarta. Dengan begitu upaya mereka untuk merebut Madiun akan berjalan lebih mudah karena kekuatan yang tertinggal di kota tinggal sedikit.

Dalam rangka mengatasi berbagai masalah keamanan dan ketertiban sehubungan dengan terjadinya banyak kekacauan, pasukan Mobile Brigade Karesidenan Madiun terpaksa dipecah-pecah dan ditugaskan ke daerah-daerah. Sebuah seksi dikirim ke kecamatan Kendal daerah Ngawi dengan komandan Agen Polisi kelas 1 Kasun. Dua seksi dikirim ke Gemaran dan Caruban dipimpin Abdul Salam. Adapun satu regu pasukan yang

52 Ada informasi bahwa pada waktu pemberontakan pecah Muso dan Amir Sjarifuddin tidak berada di Madiun tetapi baru saja tiba di Purwodadi. Beberapa pimpinan PKI yang lain malahan berada di ibukota Republik Indonesia Yogyakarta dan belum mengetahui bahwa teman-teman mereka di Madiun memberontak. Pada tanggal 19 September 1948 para pemimpin PKI di Yogyakarta ditangkap polisi negara dan tentara. Lihat, "Kekuasaan Penuh Kepada Presiden Soekarno", dalam *Murba*, tanggal 21 September 1948, hlm. 1.

53 Wawancara dengan Bapak Drmowaluyo tanggal 11 Maret 1982 di Kores 1053/Ngawi. Koleksi kaset milik Disbintal Mabes POLRI Jakarta, No. Kaset ST. 26. Bp.

54 Wawancara dengan Bapak Sartono tanggal 12 Maret 1982 di Kores 1054/Magetan. Koleksi kaset milik Disbintal Mabes POLRI Jakarta, No. Kaset ST. 26. Bx.

ditugaskan di Gorang-Gareng dipimpin oleh Agen Polisi kelas 2 Sutikno. Satu regu lagi dikirim ke Kantor Polisi Walikukun, satu seksi dikirim ke garis status quo di Kepanjen Malang dipimpin Palidin.⁵⁵ Sementara itu, di Asrama Mobile Brigade Karesidenan Madiun yang terletak di Kletak hanya terdapat satu seksi dengan komandan Inspektur Polisi R. Suparto.⁵⁶

Dengan demikian kekuatan Mobile Brigade yang berada di pusat kota Madiun praktis telah menjadi lemah. Dalam situasi demikian pada tanggal 19 September 1948 pukul 24.00 kekuatan komunis dengan inti Brigade 29 dan Pesindo bergerak menyerbu Asrama Mobile Brigade Polisi di Kletak. Penyerbuan di Kletak didahului dengan adanya tembakan yang diarahkan ke pos penjagaan yang kemudian mendapat balasan dari penjaga. Akibatnya beberapa anggota pasukan komunis tewas dan luka-luka, tetapi mereka tetap melakukan perlawanan sambil mundur. Sebagian dari pasukan komunis kembali ke markasnya mencari bantuan dan sebagian lagi tetap melancarkan tembakan ke asrama. Dalam waktu singkat pasukan komunis bertambah banyak bersamaan dengan datangnya bala bantuan sehingga Asrama Mobile Brigade terkepung. Walaupun persediaan peluru mulai berkurang dan terdesak, IP Suparto dengan pasukannya terus melakukan perlawanan.⁵⁷

Setelah bertempur sekitar delapan jam Asrama Mobile Brigade Karesidenan Madiun di Kletak dapat diduduki pasukan komunis, para anggota Mobile Brigade terpaksa menyerah karena kehabisan peluru. Semua anggota Mobile Brigade dikumpulkan termasuk Inspektur Polisi I Suparto, dibawa ke pabrik Gula Rejo Agung dan kemuddian ditawan di penjara Kletak.⁵⁸ Pada waktu hamper bersamaan lascar Pesindo juga

55 Wawancara dengan Bapak Kasidik tanggal 11 Maret 1982 di Kores 1053/Ngawi, Koleksi kaset milik Disbintal Mabes POLRI Jakarta, No. Kaset ST. 26. Bq.

56 Wawancara dengan Bapak Sukardi tanggal 12 Maret 1982 di Kores 1054/Magetan. Koleksi kaset milik Disbintal Mabes POLRI Jakarta, No. Kaset ST. 26. By.

57 Wawancara dengan Bapak Kasidik tanggal 11 Maret 1982 di Kores 1053/Ngawi, Koleksi kaset milik Disbintal Mabes POLRI Jakarta, No. Kaset ST. 26. Bq.

58 Wawancara dengan Bapak Sukardi tanggal 12 Maret 1982 di Kores 1054/Magetan.

melakukan serangan terhadap Kantor Polisi di Gorang-Gareng Magetan dan berhasil menawan para anggota polisi.⁵⁹ Di pusat kota Madiun pasukan komunis terus bergerak melakukan serangan sehingga berhasil menduduki Markas CPM, SPDT, DAN STM. Sarana-sarana vital seperti Kantor Pos, Telegraf, Bank dan BRI juga direbut.⁶⁰

Dengan direbutnya berbagai markas kekuatan yang setia kepada Negara RI Yogyakarta maupun sarana-sarana vital lainnya yang ada di Madiun, pada pukul 10.00 WIB Soemarsono mengumumkan lewat Radio Gelora Pemuda bahwa rakyat telah mengambil-alih pemerintahan serta mengumumkan berdirinya Pemerintahan Front Nasional dengan pusat di Madiun.⁶¹ Pucuk pimpinan partai Komunis Indonesia seperti Muso, Amir Sjarifuddin, Setiajit, Wikana yang tengah mengumpulkan dukungan massa atas program oposisinya terhadap Kabinet Hatta segera dengan meletusnya pemberontakan segera berangkat ke Madiun untuk mengambil-alih pucuk kepemimpinan pemberontakan.

Madiun muncul sebagai pusat gerakan pemberontakan karena beberapa alasan. Pertama, daerah Madiun dipandang strategis sebagai basis gerilya dalam perjuangan jangka panjang mengingat wilayahnya merupakan kompleks pegunungan seperti Gunung Lawu, Gunung Wilis, Gunung Gembes dengan hutan-hutan yang masih lebat. Kedua, di daerah Madiun kaum komunis mempunyai pengaruh yang kuat terhadap organisasi buruh. Ketiga, Madiun merupakan tempat konsentrasi kekuatan militer komunis. Kekuatan intinya adalah Brigade 29 yang terdiri dari Batalyon Mustafa, Batalyon Mursid, Batalyon Darmintoadji, Batalyon Panjang Djokopriono, Batalyon Abdurachman dan Batalyon

59 Koleksi kaset milik Disbintal Mabes POLRI Jakarta, No. Kaset ST. 26. By. Wawancara dengan Bapak Sartono tanggal 12 Maret 1982 di Kores 1054/Magetan. Koleksi kaset milik Disbintal Mabes POLRI Jakarta, No. Kaset ST. 26. Bx.

60 Himawan Soetanto, *op. cit.*, hlm. 165.

61 Ann Swift, *op. cit.*, hlm. 73 – 74.

Maladi Yusuf.⁶²

Perebutan kekuasaan di Madiun dengan menggunakan kekuatan militer serta disusul dengan proklamasi berdirinya Negara Soviet Republik Indonesia yang berpusat di Madiun menandai perubahan strategi perjuangan kaum komunis. Dengan terjadinya peristiwa Madiun kaum komunis telah menempuh strategi militer dalam rangka mewujudkan ambisi politiknya untuk berkuasa. Dalam kaitan ini terlihat bahwa konflik politik telah meningkat intensitasnya dan menjelma menjadi pertentangan dengan kekerasan yang melibatkan penggunaan senjata.⁶³ Dengan demikian pemberontakan komunis Madiun sebagaimana dikatakan Kuntowijoyo lebih merupakan peristiwa militer daripada pemberontakan petani.⁶⁴

Kaum komunis telah melakukan percobaan perebutan kekuasaan dengan menggerakkan kekuatan militer yang berhasil dipengaruhinya. Dalam gerakan tersebut kaum komunis juga menggerakkan Tentara Laut Republik Indonesia di bawah pimpinan Mayor A. Jadau yang juga berhasil dipengaruhinya. Untuk mendukung gerakannya, kaum komunis merancang strategi pengaturan pasukan dengan menempatkan batalyon yang dipimpin Panjang Djokopriono di Madiun. Untuk memperkuat Batalyon Panjang maka di kawasan Saradan ditempatkan Batalyon Mursid. Pertahanan sayap kanan di daerah Ngawi ditempati oleh Batalyon Mustafa yang mencakup pula wilayah Cepu dan Pati. Pertahanan sayap kiri di kawasan Ponorogo ditempati Batalyon Abdurachman yang merentang sampai wilayah Pacitan dengan dibantu Mayor Saleh Martopawiro. Kekuatan pasukan yang diandalkan sebagai penggebig yakni Batalyon Maladi Jusuf ditempatkan di daerah Mojoroto dan pasukan inti dari Brigade 29 dipimpin Letkol Dachlan ditempatkan di pertahanan kota

62 Himawan Soetanto, *op. cit.*, hlm. 139 – 141; juga Ann Swift, *ibid.*, hlm. 15 dan 77.

63 Ralf Dahrendorf, *op. cit.*, hlm. 362 – 363.

64 Kuntowijoyo, *Radikalisasi Petani* (Yogyakarta: Benteng Intervisi Utama, 1993), hlm. 11 – 12.

Kediri.⁶⁵

Pemerintahan Hatta dengan didukung partai-partai yang memerintah sebagai pemegang kekuasaan otoritatif tentu saja tidak tinggal diam menghadapi tindakan kaum komunis yang dengan terang-terangan melakukan perebutan kekuasaan. Pada tanggal 19 September 1948 pemerintah mengeluarkan pernyataan sehubungan dengan terjadinya perebutan kekuasaan oleh PKI dan menyatakannya sebagai tindakan yang tidak sah sehingga harus ditumpas.⁶⁶ Presiden Soekarno, yang sejak tanggal 15 September 1948 diberi kekuasaan penuh untuk mengambil tindakan demi menjamin keselamatan negara, setelah melalui sidang kabinet segera member perintah kepada Panglima Besar Soedirman untuk mengambil tindakan demi keselamatan negara.⁶⁷ Untuk mengatasi kekacauan di Jawa Timur Panglima Besar Soedirman melalui RRI mengumumkan pengangkatan Kolonel Soengkono sebagai panglima pertahanan Jawa Timur. kepadanya diberi kekuasaan penuh untuk menyelamatkan dan mengamankan kembali semua daerah Jawa Timur.⁶⁸

Sehubungan dengan pecahnya pemberontakan PKI Madiun bulan September 1948, tidak ada pilihan bagi pemerintah Republik Indonesia kecuali melakukan gerakan operasi militer untuk menumpasnya. Dari arah Barat tugas operasi penumpasan dipercayakan kepada pasukan dari Divisi Siliwangi dan Mobile Brigade Polisi dari Jawa Tengah.⁶⁹ Dari arah Timur tugas operasi penumpasan diberikan kepada pasukan Brigade Surakhmat dan Mobile Brigade Polisi di bawah komando M. Jasin. Mobile Brigade Polisi dari Besuki ikut dimasukkan dalam pasukan yang

65 Maksum, *et. al.*, *Lubang-Lubang Pembantaian: Petualangan PKI DI Madiun* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990), hlm. 98 – 99.

66 "Pemerintah Soekarno-Hatta tetap Koeasa", dalam *Hidup* tanggal 20 September 1948, hlm. 1.

67 Nasution, *op. cit.*, hlm. 241.

68 "Perintah Panglima Besar Soedirman", dalam *Hidup* tanggal 20 September 1948.

69 Himawan Soetanto, *op. cit.*, hlm. 161 – 280.

dipimpin M. Jasin yang bergerak dari Blitar.⁷⁰ Pada bagian berikut akan diuraikan peranan Mobile Brigade dalam penumpasan pemberontakan komunis di Madiun, namun terlebih dahulu dipaparkan mengenai proses terbentuknya Mobile Brigade untuk lebih memperjelas keberadaannya.

C. Mobile Brigade Polisi dan Penumpasan Pemberontakan Komunis

Dengan munculnya Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat, maka disusunlah berbagai alat kekuasaan negara yang salah satunya adalah Mobile Brigade Polisi (Mobrig). Pembentukan pasukan Mobile Brigade Polisi merupakan salah satu langkah reorganisasi kepolisian dilakukan semasa Jawatan Kepolisian berpusat di Purwokerto. Pembentukan Mobile Brigade Polisi dimaksudkan sebagai pasukan khusus kepolisian yang nantinya dapat diikutsertakan dalam tugas-tugas operasi militer.⁷¹ Pasukan Mobile Brigade Polisi mempunyai tingkat mobilitas yang tinggi dengan persenjataan relatif lebih lengkap dibandingkan kesatuan polisi lainnya.⁷²

Pasukan Mobile Brigade dibentuk dari eks-pasukan *Tokubetsu Keissatsu tai* yang anggotanya adalah orang-orang Indonesia. Setelah kemerdekaan eks-pasukan *Tokubetsu Keissatsu Tai* mengubah dirinya, namun karena tidak ada koordinasi maka penyebutan di berbagai daerah berlainan. Sebagai missal eks-pasukan *Tokubetsu Keissatsu Tai* ada yang menamakan dirinya sebagai Polisi Istimewa, Pasukan Polisi Istimewa, Barisan Polisi Istimewa, Pasukan Polisi Perjuangan, Polisi Gerak Cepat dan lain-lain. Perkembangan demikian menggerakkan R. Soemarto yang menjabat wakil kepala Kepolisian Negara di Purwokerto mengambil

70 Wawancara dengan Bapak Masiran, tgl. 11-3-1982, Koleksi kaset milik Disbintal Mabes Polri Jakarta No. Kaset ST. 26. Br.

71 Himawan Soetanto, *op. cit.*, hlm. 161 – 280.

72 M. Oudang, *Perkembangan Kepolisian di Indonesia* (Jakarta: Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 1968), hlm. 81.

inisiatif untuk melakukan pembenahan polisi istimewa. Dalam rangka pembenahan inilah R. Soemarto menghendaki agar polisi istimewa dijelmakan menjadi Mobile Brigade Polisi.⁷³

Inisiatif tersebut disodorkan kepada Jawatan Kepolisian Negara. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Muda Kepolisian No. Pol. 12/78/91 tertanggal 14 Nopember 1946, pasukan polisi istimewa dan sebutan lainnya dikonsolidasikan dan diberi nama baru Mobile Brigade.⁷⁴ Mobile Brigade dibentuk di setiap karesidinan dengan sebutan Mobile Brigade Karesidenan (MBK) dengan kekuatan personel sekitar 100 orang.⁷⁵ Kesatuan Mobile Brigade dipimpin seorang inspektur polisi kelas 1 atau kelas 2 dengan sebutan Komandan Mobile Brigade. Di samping itu, dibentuk pula pasukan Mobile Brigade Besar (MBB), yakni Mobile Brigade Besar Jawa Tengah berpusat di Surakarta, Mobile Brigade Besar di Jawa Timur berpusat di Blitar (sebelumnya Malang) serta Mobile Brigade Jawatan berkedudukan di Purwokerto.⁷⁶

Dalam segi administratif dan taktis Mobile Brigade Karesidenan berada di bawah pimpinan Kepala Kepolisian Karesidenan. Sementara itu, Mobile Brigade Besar secara taktis dan administrative langsung berada di bawah Jawatan Kepolisian Negara. Garis komando Mobile Brigade Besar berada langsung dari pusat yaitu Jawatan Kepolisian Negara. Hal ini berarti bahwa Mobile Brigade Karesidenan secara hierarkhis tidak berada di bawah Mobile Brigade Besar. Mobile Brigade Besar dikepalai oleh

73 Kodak IX/Jateng, *Sejarah Kepolisian Komando Daerah Kepolisian IX Jawa Tengah 1945 – 1980* (Semarang: Kodak IX, 1980), HLM. 16.

74 Anonim, *20 Tahun Perkembangan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia* (Jakarta: Inkopak, 1967), hlm. 68.

75 Di Jawa dan Madura terdapat 17 Karesidenan yaitu Banten, Batavia, Bogor, Cirebon, Priangan, Pekalongan, Semarang, Banyumas, Pati, Kedu, Surabaya, Bojonegoro, Madiun, Kediri, Malang, Besuki, Malang dan Madura, ditambah dengan dua daerah khusus yaitu Yogyakarta dan Surakarta, lihat Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 11.

76 Saleh As'ad Jamhari, *Ichtisar Sejarah Perjuangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 1945 – Sekarang* (Jakarta: Pusat Sejarah ABRI Departemen Pertahanan Keamanan, 1971), hlm. 15; M. Oudang, *op. cit.*, hlm. 81 – 82.

komisaris polisi atau inspektur polisi kelas 1 dengan sebutan Komandan Mobile Brigade Besar. Komandan Mobile Brigade Besar Jawa Timur dijabat oleh IP I M. Jasin.⁷⁷

Mobile Brigade Karesidenan Besuki juga dibentuk di bawah pimpinan Inspektur Polisi kelas 1 Soetjipto Joedodihardjo. Sementara Ajun Polisi tingkat 1 Soekari menjabat sebagai wakil komandan Mobile Brigade. Dalam Mobile Brigade Besuki Soekari, yang lahir di Kediri pada tanggal 12 September 1922, dikenal sebagai pemimpin yang disegani. Pada jaman Belanda Soekari sempat menikmati pendidikan hingga tingkat MULO dan jaman Jepang masuk Sekolah Polisi Sukabumi. Pendidikan inilah yang menentukan perjalanan hidupnya dalam meniti karier sebagai anggota kepolisian semasa kemerdekaan. Bekal pendidikan yang dimilikinya juga membuat dia terpanggil untuk memimpin perjuangan bersenjata ketika Negara Republik Indonesia menghadapi ancaman kembalinya kolonialisme Belanda maupun pengkhianatan kaum komunis.⁷⁸

Keberadaan Mobile Brigade di Jawa Timur memperlihatkan peranan yang begitu menonjol dalam perjuangan kemerdekaan baik setelah dikonsolidasikan dalam wadah dan nama yang sama maupun ketika masih mempunyai sebutan yang bermacam-macam sebagai polisi istimewa. Di Karesidenan Besuki Mobile Brigade memperlihatkan peranan secara aktif dalam perjuangan dengan melucuti senjata Jepang di Jember, Situbondo, Banyuwangi dan Panarukan. Peranan Mobile Brigade dalam melucuti tentara Jepang juga berlangsung di tempat lain di Jawa Timur misalnya di Karesidenan Madiun, Bojonegoro, Malang, serta Surabaya. Di Surabaya misalnya Polisi Istimewa menggerakkan kegiatan melucuti tentara Jepang di Gubeng, Sawahan, Morokrembangan, Ujung,

77 Solichin Salam, "May. Jend. (Pol) Mohammad Jasin dan Pertempuran Surabaya 1945" dalam *Berita Buana* tanggal 17 Februari 1983.

78 Wawancara dengan Bapak Soekari di Bondowoso tanggal 2 November 1995.

Internatio, Karangmenjangan. Di samping itu, di bawah pimpinan M. Jasin dilakukan pembongkaran gudang senjata milik Jepang di Surabaya.⁷⁹

Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan dari ancaman kembalinya secara aktif di berbagai front pertempuran. Keterlibatan secara aktif dimungkinkan karena pasukan Polisi Istimewa mempunyai persenjataan yang relatif lengkap. Keterlibatan tersebut dilakukan di berbagai tempat dan salah satunya yang terbesar adalah dalam pertempuran di Surabaya. Pasukan Polisi Istimewa di bawah pimpinan Soetjipto Danoekoesoemo berjuang membendung pasukan Sekutu ke arah Mojokerto dengan pertahanan di sektor Kedurus. Di Surabaya Utara pasukan Polisi Istimewa di bawah pimpinan Imam Bachri berjuang dengan pertahanan di sektor Tandes. Pasukan perjuangan Polisi mempertahankan Surabaya Selatan dengan markas di Sidoarjo. Dalam front pertempuran di daerah Sidoarjo ini Soekari dengan pasukannya dari Besuki ikut terlibat dalam perjuangan.⁸⁰

Pasukan Polisi Istimewa selain berjuang di front pertempuran ternyata juga dipercayai untuk tugas pengamanan Istana Presiden di Yogyakarta. Pasukan pengamanan ini dipimpin oleh Inspektur Polisi Moejoko dengan kekuatan seribu orang. Inti kekuatannya adalah pasukan Polisi Istimewa Surabaya yang bemarkas di Mojokerto. Pasukan pengamanan yang dilengkapi dengan tiga buah panser mulai bertugas sejak tanggal 3 Juli 1946. Dalam pelaksanaannya pengamanan dilakukan secara bergilir. Pasukan yang baru datang dari front langsung dikirim ke Yogyakarta sebagai masa istirahat sebelum maju kembali ke front pertempuran.⁸¹

79 Pembahasan mengenai peranan aktif Mobile Brigade Karesidenan di Jawa Timur dalam perjuangan melucuti senjata Jepang serta mempertahankan kemerdekaan dapat ditemukan dalam Team Kodak X Jawa Timur, *Peranan POLRI dalam Perjuangan Kemerdekaan Tahun 1945 – 1949* (Surabaya: Kepolisian X Jawa Timur, 1982), hlm. 61 – 70.

80 Anonim (1967), *op. cit.*, hlm. 182; Wawancara dengan Bapak Soekari di Bondowoso tanggal 2 November 1995.

81 Subditjarah, *Biografi Mayor Jendral Polisi R. Soetjipto Danoekoesoemo* (Jakarta: Direktorat Personil Mabes POLRI, 1987), hlm. 34 – 35.

Selang beberapa waktu kemudian Polisi Istimewa dikonsolidasikan menjadi Mobile Brigade Polisi.

Dengan terjadinya pemberontakan komunis di Madiun kepolisian negara juga diperintahkan untuk ikut serta dalam tugas operasi penumpasan. Kepala Kepolisian negara R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menugaskan pasukan Mobile Brigade Karesidenan Surabaya dan Mobile Brigade Besar Jawa Timur. Dalam MBB Jawa Timur tergabung pula Mobile Brigade Karesidenan Besuki yang hijrah akibat perjanjian Renville, sedangkan dari arah barat Mobile Brigade Jawa Tengah.⁸² Dilibatkannya Mobile Brigade dalam operasi penumpasan pemberontakan komunis berkaitan dengan kenyataan bahwa pasukan ini mempunyai persenjataan relatif lengkap, cukup terlatih serta mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap pemerintah RI Yogyakarta.

Kepala Jawatan Kepolisian Negara mengirimkan utusan untuk menyampaikan perintah kepada Komisaris Polisi I M. Jasin selaku komandan Mobile Brigade Besar Jawa Timur yang berkedudukan di Blitar. Utusan ini terdiri dari Inspektur Polisi M. Soeprapto bersama dengan dua perwira lain. Mereka datang dengan menggunakan parasut dari pesawat udara yang menerbangkan mereka ke Blitar. Melalui utusan ini M. Jasin diperintahkan menggerakkan kekuatan Mobile Brigade untuk merebut kota Madiun dari arah timur bersama-sama pasukan lainnya.⁸³

Dalam rangka pelaksanaan tugas penumpasan pemberontakan komunis, M. Jasin melakukan konsolidasi kekuatan Mobile Brigade. Langkah yang diambil pertama-tama adalah membentuk satuan tugas yang merupakan gabungan dari Mobile Brigade Karesidenan Surabaya dan Mobile Brigade Besar Jawa Timur. Dua batalyon Mobile Brigade

82 Agus Wiradihardja, *Kepemimpinan dan Kepahlawanan Komisaris Polisi II R. M. Bambang Soeprapto Dipokoesoemo* (Jakarta: Disjarah Mabes POLRI, 1980), hlm. 12.

83 Dadi Rohaedi, "Peranan POLRI Dalam Penumpasan Pemberontakan PKI di Madiun Tahun 1948", dalam *Senakatha* tahun ke -IV, 14 April 1992, hlm. 12.

Besar Jawa Timur dipimpin oleh Wirato dan M. Soekari yang berasal dari Mobile Brigade Besuki. Sementara itu, satu batalyon Mobile Brigade Karesidenan Surabaya dipimpin oleh Jusuf Jayengrono dengan komandan kompi Koesnadi, Soetopo Isnomo dan Abdurachman.⁸⁴ Komandan Batalyon Gabungan dipegang oleh PIP I Imam Bachri dan wakilnya dijabat oleh PIP I Abdurachman. Komandan operasi ditempati oleh Soetjipto Danoekoesoemo dan pengendali operasi dijabat oleh Soetjipto Joedodiharjo, sedangkan pimpinan operasi adalah M. Jasin.⁸⁵

Menurut rencana semula Batalyon Gabungan Mobile Brigade akan digerakkan ke Madiun melalui Gunung Wilis dan Dungus. Akan tetapi, karena kota Nganjuk perlu dikuasai kembali maka batalyon Gabungan Mobile Brigade diperintahkan bergerak untuk menguasai jalan raya Nganjuk. Pertempuran dengan pasukan komunis terjadi namun Mobile Brigade di bawah pimpinan Soetjipto Danoekoesoemo berhasil memukul mundur mereka sehingga akhirnya dapat dikuasai.⁸⁶ Pasukan komunis mengundurkan diri ke Guyangan dan menjadikan tempat ini sebagai markasnya. Soetjipto dan pasukannya memilih Pendopo Kabupaten Nganjuk sebagai markasnya sambil menunggu kedatangan pasukan Mobile Brigade dari Blitar.⁸⁷

Setelah menunggu selama dua hari, pasukan Mobile Brigade Besar yang berangkat dari Blitar tiba di Nganjuk pada tanggal 25 September 1948 sekitar pukul 14.00 WIB. Pada hari itu juga sekitar pukul 15.00 WIB satuan tugas Mobile Brigade bergerak meninggalkan Nganjuk. Pasukan ini bergerak dengan formasi pasukan Soekari, Sutopo dan Wirato

84 Team Kodak X/Jatim, *Peranan POLRI Dalam Perjuangan Kemerdekaan di Jawa Timur Tahun 1945 – 1949* (Surabaya: Kepolisian Jatim, 1982), hlm. 123 – 124.

85 Wawancara dengan Bapak Katrimo tanggal 11 Maret 1982 di Kores 1053/Ngawi. Koleksi kaset milik Disbintal Mabes POLRI, Jakarta. No. kaset ST. 26. Br.

86 Memet Tanumidjaja, *Sedjarah Perkembangan Angkatan Kepolisian* (Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan, Pusat Sejarah ABRI, 1971), hlm. 55.

87 Wawancara dengan Bapak Masiran tanggal 11 Maret 1982 di Kores 1053/Ngawi. Koleksi kaset milik Disbintal Mabes POLRI, Jakarta. No. kaset ST. 26. Br.

menyusuri jalan raya Nganjuk-Madiun. Sekitar 2 kilometer di sebelah kiri jalan bergerak pasukan Jusuf Jayengrono, sedang di sebelah kanan jalan bergerak pasukan Kusnadi. Seluruh pasukan bergerak secara frontal dengan berjalan kaki.

Beberapa kilometer di luar kota Nganjuk yaitu di daerah Bagor pasukan Mobile Brigade terlibat kontak senjata dengan kaum pemberontak yang sebelumnya telah menyerang Nganjuk. Oleh karena kekuatan tidak seimbang para pemberontak mundur ke Desa Guyangan. Pada pagi harinya tanggal 26 September di sekitar Pekuburan Cina Guyangan pasukan Mobile Brigade mendapat perlawanan lagi secara sengit. Hal ini dikarenakan pasukan pemberontak mendapat bantuan dari Madiun sehingga lebih kuat. Pertempuran terjadi selama sehari semalam. Dalam pertempuran ini pasukan Mobile Brigade di bawah pimpinan Imam Bachrie berhasil memukul mundur kaum pemberontak ke daerah Wilangan. Wilangan pun akhirnya juga dapat dibebaskan dari kaum pemberontak. Bagor, Guyangan dan Wilangan yang oleh kaum pemberontak dijadikan lini perlindungan atas kedudukannya di Madiun berhasil dikuasai pasukan Mobile Brigade setelah melalui serangkaian pertempuran sengit.⁸⁸

Pada tanggal 27 September 1948 setelah dilakukan konsolidasi sekitar pukul 01.00 pasukan Mobile Brigade bergerak ke Saradan. Ketika akan memasuki Saradan, orang-orang komunis menghadang dengan bersenjata bambu runcing, tombak dan granat. Akibatnya dua orang anggota Brigade Mobile menjadi korban terkena tusukan bambu runcing. Pada hari itu juga Saradan berhasil dikuasai sekitar pukul 10.00 meskipun empat jam kemudian mendapat serangan balasan dari pasukan

88 Wawancara dengan Bapak Masiran tanggal 11 Maret 1982 di Kores 1053/Ngawi. Koleksi kaset milik Disbintal Mabes POLRI, Jakarta. No. kaset ST. 26. Br.; juga wawancara dengan Bapak Kasidik tanggal 11 Maret 1982 di Kores 1053/Ngawi. Koleksi kaset milik Disbintal Mabes POLRI, Jakarta. No. kaset ST. 26. Bq.

komunis yang datang dari Caruban. Serangan ini berhasil dihalau oleh Kompi Soekari, Wirato dan Sutopo. Selesai merebut Saradan pasukan Mobile Brigade bergerak menuju kota Caruban, yang menjadi benteng pertahanan terakhir untuk memasuki Madiun.⁸⁹

Mengingat arti strategis Caruban sebagai pintu gerbang menuju Madiun, pasukan pemberontak mencoba mempertahankannya mati-matian. Mereka membuat pertahanan secara berlapis serta membangun perlindungan dengan karung-karung berisi pasir. Baru setelah melalui pertempuran sengit sekitar enam jam pasukan Mobile Brigade berhasil merebut Caruban. Dengan didudukinya Caruban berarti pintu masuk ke pusat kekuasaan pemberontak telah terbuka.⁹⁰ Di pihak pemberontak banyak jatuh korban serta ratusan orang berhasil ditawan, namun di pihak Mobile Brigade tiga orang anggota pasukannya juga jatuh menjadi korban, yakni Matali, Markaban, dan Muryanto. Sebagian anggota pasukan Mobile Brigade mengalami luka-luka misalnya Ngatimin.⁹¹

Sebelum dilakukannya penyerangan ke kota Madiun, Gubernur Militer Jawa Timur Kolonel Sungkono memerintahkan agar pasukan Mobile Brigade menghentikan gerakannya untuk menunggu Divisi Siliwangi yang masih tertahan di sebelah barat kota Madiun.⁹² Diperkirakan bahwa daerah Madiun akan dipertahankan oleh kekuatan komunis dengan gigih sehingga dirasakan perlu adanya konsolidasi pasukan terlebih dahulu sebelum dilancarkan penyerangan atas Madiun. Konsolidasi ini juga diperlukan untuk menghindarkan terjadinya salah tembak di antara pasukan yang ditugaskan dalam operasi penumpasan. Sambil menunggu instruksi lebih lanjut pasukan Mobile Brigade

89 Pinardi, *Peristiwa Coup Berdarah PKI September 1948 di Madiun* (Jakarta: Inkopak-Hazera, 1966), hlm. 132.

90 *Ibid.*

91 Dadi Rohaedi, *op. cit.*, hlm. 49; Team Kodak X/Jatim, *op. cit.*, hlm. 125.

92 Pinardi, *op. cit.*, hlm. 133; juga Nasution, *op. cit.*, hlm. 318.

menjadikan Caruban sebagai markas komando dan menjadikan Desa Nglames sebagai pos terdepan.

Instruksi yang ditunggu-tunggu datang pada tanggal 30 September 1948. Pasukan Mobile Brigade diperintahkan segera menyerbu Madiun karena pasukan Divisi Siliwangi yang bergerak dari arah barat mulai masuk Madiun. Setelah mendapat perintah Pembantu Inspektur Polisi (PIP) I Imam Bachri segera menggerakkan pasukannya dan sekitar pukul 14.00 sudah masuk kota.⁹³ Dalam perebutan kota Madiun pasukan Mobile Brigade berhasil membebaskan sejumlah tawanan PKI di Penjara Kletak termasuk Komandan Mobile Brigade Karesidenan Madiun.⁹⁴ Pada pukul 17.30 seluruh kota Madiun berhasil dikuasai kembali oleh pasukan yang setia kepada pemerintah RI Yogyakarta.⁹⁵

Dalam waktu 12 hari setelah pecah pemberontakan, Madiun telah kembali berada di bawah kekuasaan RI. Madiun dapat direbut hamper tanpa perlawanan yang berarti, tidak seperti yang diperkirakan semula. Para pemimpin PKI beserta pasukannya yang masih tersisa rupanya telah meninggalkan Madiun. Mereka merencanakan melakukan perjuangan gerilya sebagaimana terlihat dengan dilakukannya pemindahan secara besar-besaran alat-alat perang maupun persediaan bahan makanan ke pegunungan.⁹⁶ Akan tetapi, dengan berhasil dikuasainya kembali Madiun tidak berarti bahwa tugas operasi penumpasan telah berakhir karena masih harus disusul dengan berbagai upaya pengejaran terhadap para pemberontak dan simpatisannya. Kegiatan ini menyita waktu relatif lebih lama dengan korban serta kerugian yang tidak kecil akibat kekejaman yang dilakukan kaum komunis di berbagai tempat yang mereka lewati.

93 Dadi Rohaedi, *loc. cit.*

94 Wawancara dengan Bapak Sukardi tanggal 12 Maret 1982 di Kores 1054/Magetan. Koleksi kaset milik Disbintal Mabes POLRI, Jakarta. No. kaset ST. 26. By.

95 "Madiun di Tangan Kita", dalam *Hidup* tanggal 1 Oktober 1948, hlm. 1.

96 "Tentara Kita Disambut Dengan Gembira", dalam *Hidup*, tanggal 2 Oktober 1948, hlm. 1.

Setelah kedudukan kaum komunis mendapat serangan dari arah barat dan timur, mereka mengundurkan diri ke arah tenggara, yakni ke Dungus dan Kandangan.⁹⁷ Di berbagai daerah yang mereka lewati kaum komunis sering melakukan tindakan kejam dengan membunuh para tawanan yang mereka bawa pada saat melarikan diri. Salah satu pembantaian terjadi misalnya di daerah Dungus, yakni di Desa Kresek tempat ditemukannya sejumlah mayat. Menurut informasi yang diperoleh, mayat ini adalah mayat sejumlah tawanan yang dibawa lari oleh kaum pemberontak lalu dibunuh di desa tersebut. Di samping itu, kaum komunis juga menculik dan menangkap orang-orang yang setia kepada pemerintah RI termasuk Wedana Dungus Sarjono. Mereka juga melakukan aksi pembakaran dan perampokan di sepanjang jalan Madiun – Ponorogo.⁹⁸

Pada tanggal 2 Oktober 1948 pasukan Mobile Brigade diperintahkan bergerak menyerang Ponorogo yang dipertahankan kaum komunis.⁹⁹ Pasukan Mobile Brigade di bawah pimpinan PIP I Imam Bachrie bergerak dari Madiun dan berturut-turut merebut Desa Kanigoro, Pagotan, Uteran, Dlopo dan Klaten. Di daerah Kanten pasukan Mobile Brigade dibagi menjadi dua bagian. Sebagian bergerak dari jurusan jalan raya, sedangkan sebagian lainnya bergerak dari jurusan timur dan selatan Ponorogo. Hanya dalam pertempuran yang singkat saja kota Ponorogo berhasil direbut pada tanggal 2 Oktober 1948. Selanjutnya dalam rangka pembersihan daerah Ponorogo dari kaum pemberontak, maka pasukan Mobile Brigade dipecah menjadi tiga. Satu batalyon Mobile Brigade yang dipimpin oleh Pembantu Inspektur Polisi (PIP) II Soekari ditempatkan di bagian timur. Di sebelah barat ditempatkan satu batalyon Mobile Brigade di bawah pimpinan PIP II Wirato, sementara di sebelah selatan Ponorogo ditempatkan satu batalyon Mobile Brigade dipimpin oleh PIP II Jusuf

97 “Tak Takut Darah Mengalir”, dalam *Hidup* tanggal 1 Oktober 1948, hlm. 1.

98 “Tawanan-tawanan Dibunuh”, dalam *Hidup* tanggal 4 Oktober 1948, hlm. 1.

99 Dadi Rohaedi, *loc. cit.*

Jayengrono.¹⁰⁰

Jatuhnya Ponorogo ke tangan pasukan Mobile Brigade rupanya tidak diterima begitu saja oleh Muso beserta panglima militernya, Djoko Soejono. Mereka tidak merelakan kubu pertahanannya jatuh ke tangan pasukan yang setia kepada RI Yogyakarta. Oleh karena itu, mereka merencanakan untuk membalas kekalahannya dengan merebut kembali Ponorogo melalui serangan umum. Rencana serangan umum tersebut diketahui setelah salah seorang kurir yang membawa dokumen rahasia dari Maladi Jusuf melakukan kekeliruan karena menyampaikannya pada orang yang salah. Dokumen yang mestinya disampaikan kepada pemimpin pasukan komunis di daerah itu yang bernama Kapten Abdurachman, ternyata diberikan kepada Abdurachman, salah satu komandan Mobile Brigade yang memimpin operasi pembersihan di daerah Kanten.¹⁰¹

Menurut dokumen rahasia tersebut, serangan umum oleh pasukan komunis akan terdiri dari tiga sayap. Sayap kanan yaitu batalyon yang dipimpin Panjang Jokoripno akan maju ke utara dan menerobos melalui Kanten menuju ke barat. Sayap kiri yang ditempati batalyon Abdurachman akan bergerak melalui Slaung di sebelah selatan Ponorogo menerobos ke arah barat. Di bagian tengah akan bergerak pasukan induk di bawah pimpinan Maladi Jusuf dan Mustofa. Menurut rancangan serangan umum akan dilakukan pada hari Jumat Wage dan dikomandoi secara langsung oleh Djoko Soejono.¹⁰²

Berdasarkan informasi tersebut, maka disusunlah rencana rahasia untuk menghadapi serangan pasukan komunis. Secara diam-diam pasukan Mobile Brigade ditempatkan di sekitar dan dalam kota Ponorogo untuk menghadang dan mempersiapkan pertahanan. Pada hari Jumat Wage tanggal 8 Oktober sekitar pukul 03.00 WIB pasukan komunis memulai

100 *Ibid.*

101 Wawancara dengan Bapak Soekari di bondowoso tanggal 2 November 1995.

102 Pinardi, *op. cit.*, hlm. 134; Dadi Rohaedi, *op. cit.*, hlm. 50.

serangannya ke Ponorogo. Di beberapa tempat pasukan komunis masuk perangkap yang telah dipersiapkan oleh pasukan Mobile Brigade sehingga serangan mereka berhasil dipatahkan.¹⁰³ Serangan umum tersebut berakhir dengan kegagalan harapan kaum komunis untuk menguasai kembali kota Ponorogo. Sisa-sisa pasukan komunis kemudian mengundurkan diri ke sebelah selatan ke arah Slaung.¹⁰⁴

Gerakan mundur pasukan komunis ke arah Slaung rupanya telah diketahui oleh pasukan Mobile Brigade. Pengejaran dan pencegahan terhadap mereka dilakukan. Di tengah perjalanan antara Ponorogo – Slaung pasukan komunis berhasil dihadang, sehingga kemudian terjadi pertempuran kembali di daerah Balong. Sekalipun telah kehabisan tenaga dan semangat tempur sebelum mundur ke Desa Tegalombo pasukan komunis sempat melakukan pembunuhan terhadap Wedana Balong Subardiman, asisten wedana dan beberapa anggota polisi setempat. Pada saat sampai di Desa Tegalombo inilah pasukan Mobile Brigade mendapat perintah untuk kembali ke Ponorogo. Tugas pengejaran dan penumpasan selanjutnya diserahkan kepada pasukan dari Divisi Siliwangi,¹⁰⁵ dan Muso dapat ditewaskan pada tanggal 31 Oktober 1948.¹⁰⁶

Setelah diperintahkan kembali ke Ponorogo, sebagian besar pasukan Mobile Brigade ditarik ke Madiun, kecuali batalyon Soekari dan Jusuf Jayengrono. Kepada pasukan Mobile Brigade yang masih tinggal diberi tugas baru melakukan gerakan pasifikasi di daerah Ponorogo yang baru saja dibebaskan dari pasukan pemberontak. Pencarian terhadap orang-orang yang dicurigai yang dicurigai terlibat dalam pemberontakan terus dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi. Agar keamanan dapat segera dipulihkan maka secara terus menerus pasukan Mobile Brigade melakukan patrol keamanan. Di samping itu, pasukan Mobile

103 Wawancara dengan Bapak Soekari di Bondowoso tanggal 2 November 1995.

104 Pinardi, *loc. cit.*

105 *Ibid.*, hlm. 135; Dadi Rohaedi, *loc. cit.*

106 “Beku Sebagai Noda Sedjarah”, dalam *Hidup*, tanggal 3 November 1948, hlm. 1.

Brigade juga membantu menyusun dan menegakkan aparat kepolisian setempat untuk menggalang kerjasama dengan mereka untuk tugas pasifikasi daerah Ponorogo.¹⁰⁷ Pasukan Mobile Brigade Polisi menjalankan penugasan operasi pasifikasi dan tinggal di Ponorogo selama beberapa waktu sampai Belanda melancarkan aksi agresi militer yang kedua.¹⁰⁸



107 Pinaridi, *loc. cit.*

108 Wawancara dengan Bapak Soekari di Bondowoso tanggal 2 November 1995.

BAB 4

LONG MARCH DARI PONOROGO KE BESUKI

A. Kembali ke Kantong Gerilya

Agresi Belanda yang kedua berhasil menduduki ibukota Republik Indonesia Yogyakarta serta kota-kota lain. Para pemimpin negara seperti Soekarno, Hatta, Agus Salim dan beberapa menteri berhasil ditawan dan diasingkan oleh Belanda ke Pulau Bangka.¹ Kota Ponorogo yang dipasifikasi oleh pasukan Mobile Brigade Polisi setelah merebutnya dari kaum pemberontak komunis Madiun juga jatuh ke tangan Belanda.² Mobile Brigade Polisi dan beberapa kekuatan lain yang mempertahankan Ponorogo terpaksa meninggalkan kota Ponorogo. Selanjutnya pasukan Mobile Brigade Polisi membuat markas pertahanan di Desa Jarak.³

Pada saat bertahan di Desa Jarak timbul inisiatif dari pemimpin Mobile Brigade Karesidenan Besuki Soetjipto Joedodihardjo dan M. Soekari untuk kembali ke daerah kantong pertahanan semula di daerah Besuki.⁴ Inisiatif ini diambil setelah Belanda terang-terangan melanggar

1 M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), hlm. 347; C.L.M. Penders, *Mohammad Hatta Indonesia Patriot*, Singapore: Gunung Agung, 1981), hlm. 297 – 299.

2 Kepolisian Resort Jember, *Palagan Jomerto: Perjuangan Polri dalam Perang Kemerdekaan RI*, Jember: Kepolisian Indonesia Resort Jember, 1984), hlm. 25.

3 Wawancara dengan Bapak M. Soekari di Bondowoso pada tanggal 2 November 1995.

4 Wawancara dengan Bapak M. Soekari di Bondowoso pada tanggal 2 November 1995.

Perjanjian Renville yang menghasilkan kesepakatan penarikan pasukan Republik Indonesia dari daerah-daerah yang dikuasai Belanda. Serangan Belanda atas Ponorogo sebagai bagian dari agresi Belanda kedua merupakan bukti konkret pelanggaran terhadap isi perjanjian yang disepakati.

Dengan adanya serangan Belanda terhadap berbagai wilayah RI serta ibukota negara di Yogyakarta. Panglima Besar Soedirman yang memegang pimpinan tertinggi militer memutuskan untuk melancarkan perjuangan gerilya.⁵ Seiring dengan kebijaksanaan yang diambil Panglima Besar Soedirman, maka semua kekuatan bersenjata diperintahkan kembali ke kantong-kantong gerilya.⁶ Batalyon 3 Mobile Brigade Polisi yang mempunyai basis gerilya di daerah Maesan, Bondowoso juga memutuskan diri untuk kembali ke kantongnya dan melanjutkan perjuangan melawan Belanda di daerah yang pernah ditinggalkan sesuai dengan hasil Perjanjian Renville.⁷

Dalam rangka pelaksanaan *long march* ke daerah kantong gerilya di daerah Maesan, Bondowoso Komandan Mobile Brigade Besar menggariskan 4 prinsip yang harus ditaati. Prinsip pertama adalah agar disiplin pasukan harus senantiasa ditegakkan. Prinsip kedua, agar keutuhan serta kekompakan pasukan tetap dijaga dan dipelihara. Prinsip ketiga, selama perjalanan *lon march* sedapat mungkin menghindarkan pertempuran langsung dengan Belanda. Prinsip yang keempat adalah agar diupayakan seluruh pasukan bias selamat sampai ke basis gerilya serta siap sedia melancarkan perang gerilya dalam jangka waktu yang lama.⁸

5 Penders, *op. cit.*, hlm. 295.

6 Irna H. N. Hadi Suwito, *Rakyat Jawa Timur Mempertahankan Kemerdekaan* (Jakarta:PT Gramedia, 1994), hlm. 355.

7 Wawancara dengan Bapak M. Soekari di Bondowoso pada tgl. 2 November 1995.

8 R. M. Yunani Prawiranegara, "Nyemak Sejarah Palagan Jomerto: (2) Palagan Jomerto Minangka Mata Rantai Sejarah Perjuangan Polri lan Bangsa Indonesia", dalam *Jaya Baya*, edisi 18 November, (1984), hlm. 9.

Berdasarkan prinsip yang digariskan, maka M. Soekari sebagai komandan Batalion 3 beserta anggota pasukan mulai mempersiapkan *long march*. Perjalanan ini tidak hanya dilakukan oleh Batalion 3 saja, melainkan disertai pula oleh anggota keluarga mereka termasuk anak-anak. Pada tanggal 10 Januari 1949 pasukan Mobile Brigade Polisi beserta rombongan meninggalkan Desa Jarak di Ponorogo. Jumlah kekuatan yang melakukan *long march* sekitar 250 sampai 300 orang. Di dalam rombongan ini terdapat 17 orang anggota Bhayangkari dan 8 orang anak.⁹ Dengan anggota rombongan yang melibatkan ibu-ibu dan anak-anak, perjalanan *long march* memang tidak dapat segera sampai ke tujuan dengan cepat. Apalagi *long march* dilakukan hanya dengan jalan kaki dan dalam pelaksanaannya mereka harus senantiasa memegang prinsip yang telah digariskan oleh M. Jasin.

Setelah berjalan lima hari pada tanggal 15 Januari 1949 rombongan pasukan *long march* sampai di desa Sawo di Kabupaten Ponorogo. Pada pagi hari berikutnya rombongan memasuki desa Tugu selanjutnya memasuki wilayah Kabupaten Trenggalek. Desa-desa yang dilalui adalah Gumblek, Tumpakpelem. Perjalanan *long march* pada tanggal 20 Januari 1949 telah memasuki Desa Kalidiwir di wilayah Kabupaten Blitar dan sehari kemudian tiba di Desa Wadung, Ngeni dan Ringinrejo sebagai daerah terakhir di Blitar yang dilewati pasukan *long march*.

Pada tanggal 25 Januari 1949 gerakan *long march* telah sampai di daerah Donomulyo yang sudah termasuk Kabupaten Blitar. Selama enam hari dari tanggal 25 Januari sampai dengan tanggal 1 Februari 1949 rute yang dilewati rombongan pasukan masih termasuk wilayah Kabupaten Blitar. Desa-desa yang dilewati pasukan setelah Donomulyo adalah Bentur, Klepu, Tretes, Sumberculeng dan berakhir di desa Sumberurip.¹⁰

⁹ Kepolisian Resort Jember, *op. cit.*, hlm. 26.

¹⁰ *Ibid.*

Perjalanan *long march* tersebut dilakukan pada siang hari. Di samping dengan pertimbangan lebih memudahkan perjalanan, perjalanan siang hari juga tidak memerlukan sarana penerangan. Kalau perjalanan dilakukan pada malam hari jelas lebih sulit serta membutuhkan biaya yang lebih besar untuk keperluan penerangan jalan. Hal ini tidak mungkin dilakukan dalam keadaan sangat terbatasnya fasilitas untuk keperluan tersebut. Perjalanan malam hari juga kurang menguntungkan karena mereka tidak dapat beristirahat, padahal mereka sangat memerlukannya untuk menempuh perjalanan yang jauh. Apalagi dalam rombongan ini terdapat ibu-ibu serta anak-anak yang kurang terbiasa dengan perjalanan malam hari. Dengan melakukan *long march* pada siang hari, pada malam harinya mereka dapat beristirahat.¹¹

Dalam perjalanan *long march* pasukan Mobile Brigade polisi tidak lepas dari berbagai kesulitan yang harus dihadapi di tengah jalan. Hal yang sama juga dialami oleh pasukan yang lain.¹² Di samping anggota rombongan yang relatif beragam, kesulitan yang berkaitan dengan faktor alamiah cukup melelahkan. Rute dan medan yang harus dilalui dalam perjalanan *long march* masih berupa jalan setapak yang terjal, padang-padang gersang, hutan-hutan, serta sungai yang sulit dilalui.

Rute tersebut dipilih sebagai alternatif satu-satunya dan merupakan cara yang paling tepat dan realistis agar selama perjalanan *long march* mereka tidak dipergoki pasukan Belanda di tengah jalan. Rute dan medan yang mudan dan sering dilalui umum dipandang tidak menguntungkan karena justru dapat menimbulkan kesulitan yang lebih besar. Patroli Belanda mudah memergoki mereka sehingga keutuhan dan keselamatan pasukan tidak dapat dijamin karena dengan kemampuan perlengkapan militer yang lebih baik pasukan Belanda mudah menghancurkannya.

11 Wawancara dengan Bapak M. Soekari di Bondowoso tanggal 2 November 1995.

12 Irna H. N. Hadi, *op. cit.*, hlm. 356.

Kesulitan lain yang harus dihadapi pasukan Mobile Brigade Polisi beserta rombongan adalah kenyataan kurangnya bekal menyangkut logistik yang diperlukan selama perjalanan.¹³ Situasi darurat yang tengah berlangsung tidak memungkinkan negara dapat menjamin sepenuhnya berbagai kebutuhan hidup yang diperlukan para anggota pasukan, bahkan kebutuhan yang paling mendasar sekalipun. Dalam situasi demikian, kebutuhan logistik pasukan sebagian besar mengandalkan bantuan yang diberikan oleh rakyat pedesaan. Sambutan yang diberikan rakyat di tempat yang dilalui pasukan kenyataannya begitu hangat dan simpatik. Dengan tanpa pamrih rakyat mengulurkan tangan untuk membantu berbagai kebutuhan yang diperlukan baik tempat istirahat maupun pemenuhan kebutuhan logistik.¹⁴ Pengalaman demikian mampu menciptakan hubungan yang sangat akrab antara pejuang dengan rakyat. Rakyat pedesaan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Berbagai kesulitan yang dihadapi membuat perjalanan *long march* sebagai bagian dan resiko perjuangan yang penuh dengan pengalaman manusiawi. Masalah-masalah sepele dalam situasi demikian dengan mudah dapat memicu munculnya pertengkaran dan perselisihan. Hal ini tentu mengait dengan keutuhan dan kekompakan anggota pasukan yang tengah *long march* yang sesuai instruksi harus tetap dijunjung tinggi. Faktor kepemimpinan dalam kondisi demikian menjadi faktor kunci bagi tetap terjaganya keutuhan dan kekompakan pasukan. Kepemimpinan M. Soekari yang begitu tegas mampu meredam pertikaian sehingga kekompakan pasukan tetap terpelihara setiap kali menghadapi kesulitan.

Hal tersebut juga terbukti ketika rombongan pasukan *long march* menghadapi kesulitan untuk menyeberangi Sungai Glidik yang tengah

13 Kepolisian Resort Jember, *op. cit.*, hlm. 27.

14 R. M. Yunani Prawiranegara, *op. cit.*, hlm. 9.

banjir. Banyak anggota pasukan yang ragu dapat mengatasi rintangan ini sehingga dapat mencapai seberang sungai dan melanjutkan perjalanan karena tidak ada jembatan penyeberangan. Keraguan ini bukan disebabkan anggota pasukan takut terhadap arus Sungai Glidik yang begitu deras, melainkan karena dalam rombongan terdapat ibu-ibu dan anak-anak. Dalam perhitungan mereka kaum ibu dan anak-anak jelas tidak mungkin dapat menyeberang. Melihat keraguan yang muncul M. Soekari dengan tegas memerintahkan seluruh anggota pasukan agar segera menyeberangkan kaum ibu dan anak-anak. Penyeberangan ini meskipun berjalan cukup lama akhirnya dapat dilakukan.¹⁵

Pada tanggal 3 Februari 1949 gerakan *long march* pasukan Mobile Brigade beserta rombongannya telah memasuki Desa Pananggal, yang terletak di lereng Gunung Semeru dan termasuk wilayah Kabupaten Lumajang. Di wilayah ini terdapat basis gerilya Batalyon Ketunggeng. Adapun rute yang dilalui selanjutnya adalah Desa Tunjungrejo pada tanggal 4 Februari 1949.¹⁶ Di tempat ini untuk beberapa saat perjalanan dihentikan karena jembatan kereta api Keting yang akan dilewati tengah dijaga oleh pasukan Belanda. Dihadapkan pada halangan ini M. Soekari beserta rombongan mencoba memikirkan alternative lain untuk melintas Sungai Keting yang menjadi perbatasan antara Kabupaten Jember dengan Kabupaten Lumajang. Pada saat itulah sebuah kereta api yang menarik tujuh gerbong penuh berisi anggota pasukan Belanda melintas ke arah Jember.¹⁷

Agen Polisi III Mangkurejo yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Petinggi Tunjungrejo akhirnya diperintahkan oleh Komandan M. Soekari untuk melakukan pendekatan kepada Petinggi Tunjungrejo. Dengan melalui berbagai cara agar Petinggi Tunjungrejo

15 *Ibid.*, hlm. 48.

16 *Ibid.*, hlm. 9.

17 Kepolisian Resort Jember, *op. cit.*, hlm. 28 – 29.

dapat mengupayakan pasukan Belanda meninggalkan Jembatan Keting sehingga perjalanan *long march* tidak terhalang. Permintaan bantuan ini disanggupi Petinggi Tunjungrejo dengan pertimbangan menghindarkan terjadinya pertempuran antara pasukan Belanda yang tengah bertugas jaga dengan pasukan Mobile Brigade Polisi yang melakukan *long march*. Pertempuran ini perlu dicegah agar desa dan rakyat di Tunjungrejo tidak menjadi sasaran balas dendam pasukan Belanda.¹⁸

Setelah terjadi pembicaraan antara Petinggi Tunjungrejo dengan pihak Belanda, rombongan pasukan Mobile Brigade Polisi dengan didahului oleh M. Soekari, komandannya menyeberangi Jembatan Keting. Pasukan Belanda (*KNIL*) yang berjaga telah meniggalkan pos penjagaan.¹⁹ Namun demikian, kehati-hatian dan kewaspadaan tetap dijunjung tinggi untuk mengantisipasi serangan musuh yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Masing-masing komandan seksi mempersiapkan seluruh anggota masing-masing untuk memberikan perlindungan terhadap komandan pasukan yang memimpin penyeberangan. Penyeberangan ini juga dilakukan dengan sangat hati-hati mengingat kaum ibu dan anak-anak juga perlu dibantu, ditambah kenyataan Sungai Keting begitu curam dengan arus yang deras serta bantalan rel kereta api yang dilewati sudah tua dan kurang terawat baik.²⁰

Menyimak situasi selama *long march* terutama setelah memasuki Desa Tunjungrejo, maka komandan pasukan Mobiloe Brigade Polisi membuat keputusan baru menyangkut pelaksanaan *long march*. Sejak berangkat dari Desa Jarak di Ponorogo sampai Desa Tunjungrejo di Lumajang perjalanan *long march* selalu ditempuh pada waktu siang hari. Setelah melihat gelagat patroli pasukan KNIL yang meningkat maka M. Soekari memutuskan melanjutkan perjalanan perjalanan *long march* dengan menempuhnya

18 *Ibid.*

19 R. M. Yunani Prawiranegara, *op. cit.*, hlm. 48.

20 Kepolisian Resort Jember, *op. cit.*, hlm. 29 – 30.

pada malam hari. Di samping itu, M. Soekari juga melakukan perubahan menyangkut rute tempuh yang semula direncanakan ke arah timur melalui Kencong diubah ke arah utara melalui Desa Sariono. Medan yang berat tidak menjadi masalah dengan pertimbangan mematuhi prinsip yang telah digariskan yakni menghindari pertempuran selama *long march*.²¹

Pada tanggal 6 Februari rombongan pasukan Mobile Brigade Polisi yang melakukan *long march* telah memasuki Desa Daringan dan dua hari berikutnya pada tanggal 8 Februari 1949 perjalanan *long march* telah sampai di desa Badean. Pada tanggal 11 Februari 1949 gerakan pasukan Mobile Brigade Polisi dan rombongan masuk ke desa Jomerto. Menurut rencana mereka tidak akan singgah di tempat ini, namun karena medan sangat sulit membuat rombongan *long march* kelelahan sehingga memerlukan istirahat.²² Keberadaan mereka di Jomerto rupanya dilaporkan kepada pasukan Belanda oleh mata-mata. Sebagai akibatnya tidak dapat dihindarkan lagi terjadinya pertempuran antara pasukan Belanda (KNIL) dengan pasukan Mobile Brigade Polisi yang sedang *long march*.²³

B. Jalannya Pertempuran Jomerto

Seperti telah dikemukakan pasukan Mobile Brigade Polisi yang melakukan *long march* dari Ponorogo ke Bondowoso sebenarnya tidak bermaksud singgah di Desa Jomerto. Akan tetapi, perjalanan setelah melewati jembatan Keting begitu melelahkan. Rute dari Desa Sariono melewati Darungan ke Badean cukup berat apalagi perjalanan dilakukan pada malam hari. Dalam situasi demikian diputuskan untuk beristirahat sejenak di Desa Jomerto sebelum meneruskan perjalanan. Menjelang masuk Desa Jomerto sekitar subuh terlebih dahulu komandan pasukan *long march*, M. Soekari

21 Wawancara dengan Bapak M. Soekari di Bondowoso tanggal 2 November 1995.

22 Wawancara dengan Bapak M. Soekari di Bondowoso tanggal 2 November 1995.

23 R. M. Yunani Prawiranegara, *op. cit.*, hlm. 9, 48.

mengirim dua orang prajurit untuk menemui Yakop, seorang penduduk Desa Jomerto. Kedua prajurit diperintahkan untuk memberitahu bahwa pasukan Mobile Brigade Polisi beserta rombongan bermaksud singgah sebentar untuk beristirahat.²⁴

Kedua utusan rupanya sudah cukup mengenal Desa Jomerto sehingga dengan cepat dapat menemukan rumah Yakop. Setibanya di rumah Yakop salah seorang utusan mengetuk pintu sambil mengucap kalimat sandi: “ Pak Yakop, ini anak Bapak yang sudah sekian bulan berada di dalam hutan dan sudah lama tidak bertemu dengan Bapak, ini puteranya sangat kangen.” Setelah kalimat ini diucapkan dua tiga kali Yakop yang berada di dalam rumah baru menyahut dan mempersilahkan masuk ke dalam. Setelah berdialog sesaat kedua utusan yang salah satunya bernama Basuki menjelaskan maksud kedatangannya ke rumah Yakop. Dikatakan bahwa rombongan pasukan Mobile Brigade Polisi yang sedang melakukan *long march* sebenarnya tidak bermaksud menetap di Jomerto, melainkan akan ke Maesan Bondowoso. Dikatakan pula bahwa karena pasukan kelelahan maka minta masyarakat Jomerto mau mengijinkan dan menerima mereka untuk beristirahat di tempat ini barang sejenak.²⁵

Permintaan tersebut tidak ditolak bahkan disambut dengan penuh simpati oleh Yakop. Setelah mendapat kepastian bahwa mereka diijinkan untuk singgah di Jomerto kedua utusan kembali ke pasukan untuk memberitahukan hasilnya. Namun, sebelumnya terlebih dahulu kedua utusan bersama Yakop dan dua orang desa lain berputar mengelilingi desa untuk melakukan pengamatan. Dengan segera Yakop menghubungi dan membangunkan para tetangganya untuk menyambut kedatangan rombongan pasukan yang melakukan *long march*. Setelah mendapat laporan bahwa masyarakat di Jomerto bersedia disinggahi, M. Soekari beserta rombongan bergerak menuju ke Desa Jomerto. Gerakan dilakukan

²⁴ *Ibid.*, hlm. 14.

²⁵ Kepolisian Resort Jember, *op. cit.*, hlm. 33 – 34.

secara perlahan karena mereka sudah kelelahan ditambah selama dua hari tidak mendapat makanan.²⁶

Kedatangan pasukan Mobile Brigade Polisi mendapat sambutan yang hangat dan penuh rasa kekeluargaan dari masyarakat Jomerto. Sambutan semacam ini menandakan jalinan hubungan yang erat antara pasukan militer dengan rakyat dalam situasi perjuangan. Dengan penuh persaudaraan pula rakyat Jomerto memberikan bahan makanan yang diperlukan oleh pasukan yang tidak mempunyai bekal logistik memadai selama perjalanan *long march*. Di sini terlihat pula bahwa rakyat desa ikut menyatu dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Tanpa partisipasi rakyat dalam perjuangan dapat dipastikan bahwa perjuangan bersenjata melawan penjajah tidak dapat berjalan dan sulit untuk dapat bertahan karena kekurangan bahan makanan. Tanpa suplai logistik pasukan yang mengangkat senjata di garis depan tidak mungkin dapat melanjutkan perjuangan. Kenyataan ini sejajar dengan apa yang dikemukakan oleh T. B. Simatupang bahwa rakyat desa dan pedesaan memainkan peranan yang sangat besar dan merupakan bagian integral dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari kembalinya kekuatan kolonial yang bermaksud menegakkan kembali kekeusaannya di Indonesia.²⁷

Di tengah sambutan masyarakat Desa Jomerto, Komanadan pasukan M. Soekari memanggil dan mengumpulkan para komandan seksi. Kepada mereka diperintahkan untuk mengatur penempatan tempat-tempat peristirahatan yang disediakan oleh penduduk. Seksi senjata berat ditempatkan di mushola dengan maksud untuk berjaga-jaga terhadap setiap kemungkinan serangan yang tidak diduga. Dengan kata lain, seksi senjata berat ditempatkan di mushola agar dapat memberikan perlindungan

²⁶ Ibid., hlm. 35 – 36.

²⁷ Lihat T. B. Simatupang, *Laporan dari Banaran: Kisah Pengalaman Seorang Prajurit Selama Perang Kemerdekaan*, (Jakarta: PT Pembangunan, 1960).

terhadap serangan mendadak. Untuk keperluan mengantisipasi setiap kemungkinan buruk maka juga dilakukan pengaturan jadwal penjagaan (piket) yang diatur oleh seksi senjata berat.

Rupanya keberadaan rombongan pasukan Mobile Brigade Polisi di Desa Jomerto tercium oleh pasukan Belanda. Diketahui keberadaan pasukan Mobile Brigade Polisi yang tengah *long march* disebabkan adanya laporan mata-mata Belanda, yang ternyata adalah Petinggi Jomerto sendiri yang bernama Sujak. Beberapa saat setelah menerima kedatangan rombongan Mobile Brigade Polisi, secara diam-diam Sujak meninggalkan Desa Jomerto menuju ke selatan arah kota Jember untuk melaporkan kehadiran pasukan RI di daerahnya.²⁸ Penempatan jaringan informan di Jomerto sebenarnya dapat dipahami karena Belanda rupanya memperhitungkan bahwa kembalinya pasukan-pasukan Republik Indonesia ke kantong gerilya terutama yang bersal dari Besuki pasati akan melewati Jember bagian utara. Tidak mustahil jika Belanda menempatkan jaringan mata-mata di tempat yang diperhitungkan akan dilewati pasukan yang kembali ke kantong gerilya.

Perginya Petinggi ke Jember agaknya memang tidak diduga bakal memberikan informasi kepada Belanda. Namun demikian, pasukan Mobile Brigade Polisi yang tengah beristirahat tidak kehilangan kewaspadaan untuk selalu berjaga-jaga.²⁹ Hal ini terbukti seksi senjata berat di bawah pimpinan Agen Polisi I Soeraji tetap mengadakan patroli di kampung Krajan yang ditempati rombongan pasukan serta sekitar perkampungan di sebelah barat sungai yang ditempati ibu-ibu dan anak-anak. Di samping itu juga ditempatkan pasukan di beberapa rumah penduduk yang diatur sedemikian rupa sementara kelompok komando ditempatkan pada posisi yang tetap memungkinkan dapat menjalankan

28 R. M. Yunani Prawiranegara, op. cit., hlm. 14.

29 Wawancara dengan Bapak M. Soekari di Bondowoso tanggal 2 November 1995.

tugas komando dan pengendalian apabila terjadi situasi kritis.³⁰

Sekalipun kesiapsiagaan tetap dijaga tidak berarti tanpa kekawatiran sama sekali. Kekawatiran ini terkait dengan kenyataan bahwa mereka secara taktis mereka belum begitu mengenal medan yang ditempati. Meskipun wilayah Jomerto cukup jauh dari jangkauan lawan tidak tertutup kemungkinan bahwa pasukan musuh dapat mencapainya dalam kegiatan operasi. Hal ini mengingat jaringan mata-mata diduga sudah dibangun oleh Belanda sehingga untuk menghindari jebakan oleh jaringan intelejen dilakukan gerakan zig zag dan bila perlu mengubah arah gerakan.³¹ Hal ini ditempuh agar prinsip yang digariskan selama *long march* yakni memegang teguh kekompakan pasukan, menjunjung tinggi disiplin, menghindari pertempuran langsung dengan Belanda selama perjalanan, dapat kembali ke basis gerilya dengan selamat untuk melanjutkan perjuangan.

Dengan dilaporkannya keberadaan pasukan Mobile Brigade Polisi oleh mata-mata menyebabkan prinsip menghindarkan pertempuran dengan Belanda tidak dapat dipertahankan. Pada saat seksi senjata berat mengadakan patroli tiba-tiba dari arah timur terdengar tembakan yang semakin gencar disusul tembakan balasan. Kontak senjata yang terjadi diawali dengan penembakan terhadap seorang polisi yang tengah membersihkan senjata. Tembakan ini serentak membangunkan anggota polisi yang lain yang tengah beristirahat sehingga dengan segera mencoba memberikan tembakan balasan untuk menetralisasi serangan lawan dan mencari kesempatan untuk membangun serangan yang lebih teratur.³² Suasana Desa Jomerto menjadi hiruk pikuk karena serangkaian tembakan dari Belanda yang menyerang Jomerto dari arah timur dan selatan.³³ Pasukan Belanda ini rupanya tidak menyangka akan mendapatkan

30 Kepolisian Resort Jember, op. cit., hlm. 37 - 38.

31 Wawancara dengan Bapak M. Soekari di Bondowoso tanggal. 2 November 1995.

32 Kepolisian Resort Jember, op. cit., hlm. 42.

33 R. M. Yunani Prawiranegara, loc. cit.

perlawanan yang gencar dari pasukan yang berada di Jomerto. Dihadapkan pada kenyataan ini akhirnya pasukan Belanda menambah kekuatannya dengan meminta bantuan pasukan ke Jember.³⁴

Seorang penduduk Jomerto bernama Sukarni dengan menyamar sebagai petani yang akan berangkat ke sawah berhasil keluar dari Desa Jomerto yang diserbu pasukan Belanda. Akan tetapi, setelah berada di luar desa Sukarni ditangkap oleh pasukan Belanda yang datang dari arah timur yang baru saja tiba dari Jember untuk memberikan bantuan. Warga Desa Jomerto ini dipaksa untuk menunjukkan lokasi keberadaan pasukan Mobile Brigade Polisi. Dengan spontan Soekarni justru menunjukkan ke arah kedudukan pasukan Belanda yang sudah terlibat pertempuran.

Kabut yang meyelimuti daerah Jomerto ikut menyebabkan pasukan Belanda yang baru tiba tidak mudah mengenali pasukan Belanda yang terdahulu, sehingga pasukan Belanda yang baru tiba justru langsung melancarkan tembakan ke arah pasukan Belanda sendiri.³⁵ Pertempuran internal antara pasukan Belanda sendiri berlangsung sampai sore hari sehingga menimbulkan korban yang cukup besar. Sementara Soekarni berhasil meloloskan diri dari pertempuran ke arah timur ke Desa Klungkung.³⁶

Sementara pasukan Belanda Republik Indonesia yang berada di Jomerto menyadari bahwa posisi mereka cukup sulit karena medannya terpotong-potong oleh aliran sungai. Kondisi geografis ini menjadi kendala untuk dapat melakukan hubungan koordinasi antara komando dengan unsure-unsurnya. Tentu tidak boleh diabaikan pula akan kenyataan lain bahwa keberadaan mereka yang belum mengenal begitu dekat kondisi alam di Jomerto membuat mereka kesulitan menyusun pertahanan serta

34 Wawancara dengan Bapak M. Soekari di Bondowoso tgl. 2 November 1995.

35 Kepolisian Resort Jember, *op. cit.*, hlm. 45 – 46.

36 Wawancara dengan Bapak M. Soekari di Bondowoso tgl. 2 November 1995; R. M. Yunani Prawiranegara, *op. cit.*, hlm. 14 – 15.

taktik untuk menghadapi serangan yang datang. Dalam kondisi demikian berlaku prinsip bahwa setiap unsur harus dapat mengambil tindakan sesuai dengan situasi yang tengah dihadapinya. Untuk memantapkan kelangsungan pimpinan pada unsur tempur maka Ajun Inspektur polisi Aspan ditempatkan pada unsur depan di Jomerto.

Sementara Komandan rombongan yakni M. Soekari dalam situasi yang kritis ini terus berusaha melakukan kontak dengan unsur depan. Namun upaya ini tidak mendapatkan hasil karena cuaca yang berkabut tidak memungkinkan, apalagi pada saat pertempuran berlangsung tembakan-tembakan tidak teratur datang dan arahnya.³⁷ Unsur yang dapat dihubungi hanyalah unsure belakang yang terdiri dari bagian logistic ditambah dengan kaum ibu dan anak-anak. Kepada mereka M. Soekari memerintahkan agar segera melakukan evakuasi ke arah barat untuk menjauh dari ajang pertempuran. Kelompok komando memindahkan posisinya ke arah barat di luar kampung dan terus berupaya membangun hubungan dengan unsur yang terlibat dalam pertempuran.³⁸

Berlangsungnya pertempuran semakin seru bersamaan dengan hari yang semakin siang. Sambil terus melakukan perlawanan pasukan Republik Indonesia mencoba mengundurkan diri ke arah utara. Upaya ini rupanya berhasil seperti yang diinginkan. Sementara unsur komando bergerak ke arah barat dan menjadikan kampung Durjo sebagai tempat melakukan konsolidasi kekuatan. Setelah konsolidasi berlangsung, komandan batalyon bersama dengan beberapa anggota pasukan mencoba bergerak mendekati bekas daerah yang menjadi ajang pertempuran dengan tujuan meneliti keadaan serta menangani korban-korban yang jatuh akibat pertempuran. Upaya ini gagal karena belum sampai memasuki Desa Jomerto muncul tembakan yang dilancarkan oleh pasukan Belanda yang ternyata masih menduduki Jomerto. Akhirnya, M. Soekari memutuskan

37 Wawancara dengan Bapak M. Soekari di Bondowoso tanggal 2 November 1995.

38 Kepolisian Resort Jember, *op. cit.*, hlm. 39 – 41.

dan memerintahkan pasukannya untuk meneruskan perjalanan *long march* ke basis gerilya di daerah Maesan, Bondowoso.³⁹

C. Akibat Pertempuran

Pertempuran yang terjadi di Jomerto antara pasukan Mobile Brigade Polisi dengan pasukan Belanda yang terdiri dari pasukan cakra dan KNIL dilihat dari jangka waktunya berlangsung relatif singkat. Pertempuran di Jomerto berlangsung dari waktu subuh sampai sore hari pada tanggal 11 Februari 1949. Praktisnya pertempuran ini terjadi selama satu hari. Akan tetapi, sebenarnya pertempuran sehari yang meletus di Jomerto tidak secara keseluruhan berlangsung antara pasukan Mobile Brigade Polisi dipimpin M. Soekari dengan pasukan Belanda (KNIL). Kedua belah pihak terlibat pertempuran kurang lebih hanya sekitar tiga jam.⁴⁰ Selebihnya pertempuran yang terjadi justru melibatkan anggota pasukan Belanda sendiri sebagai akibat kesalahpahaman dan terkena tipu muslihat.

Meskipun jangka waktu pertempuran Jomerto relatif pendek bila dibandingkan misalnya dengan waktu yang ditempuh selama *long march*, pertempuran ini merupakan satu-satunya kontak senjata yang terjadi antara pasukan Mobile Brigade Polisi dengan pasukan Belanda. Kontak senjata ini sekaligus merupakan satu peristiwa yang tidak dapat dihindarkan, padahal sejak semula sudah digariskan agar sedapat mungkin diupayakan untuk tidak terlibat pertempuran selama perjalanan *long march*. Peristiwa yang terjadi dalam satu hari tersebut ternyata juga telah menimbulkan korban yang begitu besar di kedua belah pihak. Di pihak pasukan Mobile Brigade Polisi telah gugur satu regu pasukan yang dipimpin oleh Soeraji.⁴¹

39 Wawancara dengan Bapak M. Soekari di Bondowoso tgl. 2 November 1995.

40 Wawancara dengan Bapak Abdarullah (Suhadi) di Kelurahan Jomerto tanggal 10 Desember 1996; juga Kepolisian Resort Jember, op. cit., hlm 39.

41 Team Kodak X Jawa Timur, Peranan POLRI dalam Perjuangan Kemerdekaan Tahun 1945 – 1949 (Surabaya: Kepolisian X Jawa Timur, 1982), hlm. 112.

Keseluruhan korban yang meninggal dari kalangan pasukan Mobile Brigade Polisi berjumlah 13 orang. Nama-nama korban secara lengkap yaitu: Agen Polisi I Soeraji, Agen Polisi II Soerono, Agen Polisi II Moedjamedi, Agen Polisi III Achmad, Agen Polisi III Wintjono, Agen III Asbari, Agen Polisi III Soebari, Agen Polisi III Moeh. Said, Agen Polisi III Basuki, Agen Polisi III Sasono, Agen Polisi III Kasim, S. Kusnadi dan seorang korban lagi tidak dikenal identitasnya.⁴²

Kecuali korban dari kalangan pasukan polisi, juga terdapat korban dari kalangan rakyat Jomerto. Rakyat Jomerto yang menjadi korban pertempuran berjumlah 20 orang. Para korban pertempuran ini kebanyakan meninggal karena ditembak di halaman rumah masing-masing. Nama-nama mereka yang menjadi korban yaitu Yakop, suami-istri Muati, Abdura, Sarmo, Munawar, Durahman, Zainal, Tambang, Sardan, Sahan, Biya, Soemar, Sarito, Parimo, Rip, Mukti, Dullah, Salim, Saningwar. Seorang korban lagi bernama Etti mengalami cacat karena ditembak tangan dan kakinya.⁴³

Akibat yang dirasakan rakyat Desa Jomerto bukan hanya jatuhnya sejumlah korban jiwa, tetapi juga didudukinya desa ini oleh pasukan Belanda yang terdiri dari Cakra dan KNIL. Dengan paksa mereka mengusir seorang penduduk bernama Asmar dan menjadikan rumahnya sebagai markas sebagai markas pasukan Belanda selama menduduki Jomerto. Pendudukan oleh pasukan Belanda berlangsung sekitar enam bulan dan dalam periode ini mereka melakukan kegiatan patroli untuk mencari para pejuang Republik serta orang-orang yang bersimpati maupun memberikan dukungan terhadap perjuangan. Patroli dilakukan bukan hanya di jalan-jalan, rumah-rumah melainkan juga menyusuri sampai ke sungai-sungai

42 Kepolisian Resort Jember, *op. cit.*, bagian lampiran juga R. M. Yunani Prawiranegara, *op. cit.*, hlm. 15. Nama-nama korban pertempuran Jomerto sekarang diabadikan pada dinding monumen baik korban dari kalangan Mobile Brigade maupun rakyat Jomerto sendiri.

43 Kepolisian Resort Jember, *ibid.* juga R. M. Yunani Prawiranegara, *ibid.*

sekitar Jomerto. Dalam masa pendudukan ini penduduk Desa Jomerto secara psikologis terus menerus dicekam ketakutan karena tanpa segan pasukan Belanda bertindak kejam serta melakukan penganiayaan. Di samping itu penduduk Jomerto juga mengalami kerugian karena pasukan Belanda sering merampas harta miliknya serta mengganggu istri ataupun gadis-gadis desa.⁴⁴

Hal tersebut membuktikan bahwa pengorbanan yang diberikan rakyat dalam perjuangan sungguh besar. Rakyat pedesaan tidak hanya memberikan dukungan logistik berupa bahan makanan yang dibutuhkan para pejuang untuk menopang kesinambungan perlawanan menghadapi kekuatan musuh. Rakyat pedesaan juga tidak hanya memberikan tempat persinggahan, persembunyian maupun perlindungan yang dibutuhkan para pejuang dalam rangka perang gerilya. Lebih mahal lagi, rakyat pedesaan juga mengorbankan miliknya yang paling berharga yakni kehidupannya sendiri sebagai wujud simpati dan partisipasi dalam perjuangan meraih dan mempertahankan kemerdekaan.

Rakyat pedesaan sering menjadi sasaran kekejaman dan balas dendam yang dilakukan pasukan KNIL sebagai harga atas solidaritas yang mereka berikan terhadap perjuangan. Rakyat pedesaan sering menjadi korban karena tidak mau menunjukkan tempat persembunyian para pejuang kemerdekaan bahkan dengan caranya sendiri sering mencoba menutupi. Bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari yang berkembang di kalangan petani pedesaan⁴⁵ merupakan alternatif yang biasa digunakan. Tidak disangsikan alternatif ini dapat memberikan dukungan serta kemanfaatan untuk menunjang perjuangan gerilya sehingga kekuatan bersenjata yang menjadi inti sulit ditiadakan dan ditumpas keberadaannya.

44 Wawancara dengan Bapak Abdarullah (Suhadi) di Kelurahan Jomerto Kecamatan Patrang Kotatiff Jember tanggal 10 Desember 1996.

45 James C. Scott, *Perlawanan Kaum Tani* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1993).

Dalam kaitan dengan pertempuran di Jomerto kiranya cukup relevan untuk menyebut pembagian perang seperti yang dilakukan oleh Ibrahim Alfian membedakan perang dalam empat kategori yaitu perang besar, perang kecil, perang rakyat dan perang partisan. Menurut Ibrahim Alfian karakteristik utama perang besar adalah adanya upaya secara sistematis untuk menghancurkan kekuatan musuh. Perang kecil di pihak lain dikarakterisasi oleh usaha menghambat kemajuan musuh dengan merusak berbagai fasilitas komunikasi lawan. Sementara perang rakyat ditandai oleh adanya keterlibatan rakyat secara aktif dengan memanggul senjata melawan musuh di medan pertempuran. Kategori keempat yakni perang partisan yang ditandai dengan keterlibatan rakyat secara pasif dalam melakukan perlawanan terhadap musuh.⁴⁶

Pertempuran Jomerto agaknya tidak dapat dikategorikan sebagai perang besar karena di dalamnya tidak terdapat upaya untuk menghancurkan daya serang musuh melalui penghancuran kekuatan musuh. Kategorisasi perang kecil juga kurang tepat untuk memahami pertempuran Jomerto mengingat tidak ada usaha untuk menghambat kemajuan gerakan musuh dengan mengancam alat-alat komunikasinya. Usaha yang dilakukan pasukan Mobile Brigade Polisi malahan adalah berupaya melepaskan diri dari sergapan musuh sambil melakukan perlawanan. Pertempuran Jomerto juga kurang tepat kalau dimasukkan dalam kategori perang rakyat yang karakteristiknya rakyat ikut secara aktif memanggul senjata dan terlibat dalam pertempuran. Kategori yang lebih tepat untuk pertempuran Jomerto adalah perang partisan dengan ciri tidak melibatkan keikutsertaan rakyat secara aktif tetapi tidak berarti lepas sama sekali dari dukungan rakyat. Pemberian logistik, tempat persinggahan dan perlindungan oleh rakyat Jomerto terhadap pasukan

46 T. Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 18
- 19

Mobile Brigade Polisi secara kuat memperlihatkan terpenuhinya cirri-ciri perang partisan.

Pertempuran yang terjadi di Jomerto memang mengakibatkan kekuatan pasukan Mobile Brigade Polisi berkurang, namun kekauan ini tidak berhasil ditumpas oleh pasukan Belanda (KNIL) yang dari segi persenjataannya jauh lebih baik dalam artian kuantitas maupun kualitas. Hal ini tentu tidak terlepas dari bantuan rakyat Jomerto yang dengan caranya sendiri berusaha melindungi pasukan Mobile Brigade Polisi melalui informasi yang menyesatkan sehingga antara pasukan KNIL sendiri terjadi baku tembak. Sementara pasukan Mobile Brigade Polisi sambil melakukan perlawanan terus mencoba untuk melepaskan diri dari kancah pertempuran. Upaya ini tidak sia-sia terbukti pasukan Mobile Brigade Polisi dapat mengundurkan diri ke arah Desa Durjo dan selanjutnya mengadakan konsolidasi kekuatan kembali di tempat ini.⁴⁷

Setelah selesai melakukan konsolidasi di Desa Durjo, komandan pasukan Mobile Brigade Polisi memutuskan untuk segera meneruskan perjalanan *long march* pada malam harinya agar dapat segera sampai di tempat yang dituju. Di Desa Langsung pasukan Mobile Brigade dan rombongan bertemu dengan pasukan Jangkar X ALRI di bawah pimpinan Kapten Soewito. Perlu diketahui bahwa Jember memang menjadi pusat Resimen ALRI di Karesidenan Besuki yang membawahkan Batalyon ALRI Banyuwangi dan Situbondo.⁴⁸

Di samping itu, rombongan ini juga bertemu dengan sebuah kompi pasukan yang dipimpin Letnan Satu Winotodari Batalyon Safiudin, sebuah batalyon terdiri dari tiga kompi yang secara aktif dan mobil

47 Wawancara dengan Bapak M. Soekari di Bondowoso tgl. 2 November 1995.

48 Nugroho Notosusanto, "Pangkalan X dan Ekspedisi Lintas Laut Jang Pertama Kali ke Bali", *Makalah*, Pusat Penerangan Angkatan Laut Jakarta, 1963, hlm. 8.

bergerak di wilayah Jember.⁴⁹ Selama lima hari ketiga rombongan pasukan sempat menjalin kerjasama menghadapi serangan Belanda di Arjasa.⁵⁰ Begitu keadaan telah memungkinkan maka pasukan Mobile Brigade Polisi memutuskan melanjutkan perjalanan ke lereng Gunung Argopuro di daerah Maesan.⁵¹

Dengan menjadikan daerah Maesan sebagai basis gerilya, pasukan Mobile Brigade Polisi di bawah pimpinan M. Soekari meneruskan kegiatan perjuangan gerilya untuk melawan kekuatan kolonial Belanda di daerah Bondowoso bersama dengan kekuatan perjuangan lainnya.⁵² Di Bondowoso terdapat kekuatan militer Republik Indonesia yang lain seperti Batalyon Anjing Laut yang dipimpin Magenda, Kompi Geni Pionir dipimpin Kapten Pirngadi, Kompi Auto Mobile dipimpin Kapten Ahmad Hidayat maupun kekuatan kelaskaran misalnya Barisan Pemberontak Republik Indonesia (BPRI), Hisbullah, Sabilillah.⁵³

Perjuangan gerilya terus berlangsung hingga terselenggaranya persetujuan antara Indonesia dengan Belanda yang tertuang dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag Negeri Belanda. Kesepakatan yang dicapai dalam Konferensi Meja Bundar menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Kerajaan Belanda pada tanggal 27 Desember 1949.⁵⁴ Dengan adanya pengakuan terhadap kedaulatan Negara Republik Indonesia maka berakhirlah perjuangan gerilya untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman kolonialisme Belanda.

49 Irna H. N. Hadi Soewito, *op. cit.*, hlm. 364; juga Wawancara dengan Bapak M. Soekari di Bondowoso tgl. 2 November 1995.

50 Irna H. N. Hadi Soewito, *ibid.*, hlm. 369.

51 Kodak X Jatim, *op. cit.*, hlm. 112.

52 Wawancara dengan Bapak M. Soekari di Bondowoso tgl. 2 November 1995.

53 Edy Burhan Arifin, "Agresi Militer I Belanda Mengakibatkan Terjadinya Peristiwa Gerbong Maut 23 November 1947", Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM, Yogyakarta, 1979), hlm. 9, juga lihat Irna H. N. Hadi Soewito, *op. cit.*, hlm. 361 – 363.

54 Robert B. Cribb, *Gejolak Revolusi di Jakarta 1945 – 1949: Pergulatan Antara Otonomi dan Hegemoni*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990), hlm. 194; juga Donald Wilhelm, *Emerging Indonesia* (Jakarta: PT Indira, 1980), hlm. 23.

Digital Repository Universitas Jember

Akan tetapi, perjalanan Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat masih panjang karena berbagai tantangan baik eksternal maupun internal terus menguji keberadaannya. Tantangan tersebut misalnya berupa pemberontakan maupun gerakan separatis yang bermunculan di berbagai daerah.



BAB 5

PALAGAN JOMERTO DALAM KISAH DAN MONUMEN

A. Palagan Jomerto dalam Konteks Perjuangan Nasional

Bagi bangsa Indonesia periode revolusi fisik dari tahun 1945 hingga tahun 1949 merupakan periode penuh gejolak. Dalam periode inilah untuk pertama kalinya bangsa Indonesia memperlihatkan pengalaman melancarkan perlawanan berskala nasional bahkan internasional dalam menghadapi agresor asing. Menurut sejarawan Australia Anton Lucas, pernyataan kemerdekaan Indonesia yang terjadi saat berlangsung kekosongan kekuasaan membuka pintu bagi kekuatan-kekuatan sosial-politik, cita-cita serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat memasuki suatu Revolusi.¹ Pada sisi lain, revolusi nasional membawa perubahan fundamental dalam struktur sosial-politik feodal kolonial ke struktur republik egalitarian.

Negara republik yang lahir dengan proklamasi 17 Agustus 1945 dalam kenyataannya masih sangat lemah. Hal ini disebabkan karena Republik Indonesia tidak mewarisi otoritas administratif dari Pemerintah pendudukan Jepang. Indonesia juga tidak mempunyai sumberdaya keuangan yang memadai dan dapat diandalkan untuk menyangga

¹ Anton E. Lucas, *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi* (Jakarta: Grafiti Pers, 1989), hlm. 299.

roda pemerintahan, tidak memiliki angkatan bersenjata reguler dengan perlengkapan tempur yang memadai, tidak memiliki alat komunikasi yang memadai sehingga sulit menjamin komunikasi antar daerah.² Semua kesulitan ini merupakan tantangan berat yang dihadapi negara Republik Indonesia dan pemerintahannya yang baru terbentuk.

Politik diplomasi yang dijalankan pada awal kemerdekaan sering dipandang mendorong pemerintah ke arah konservatif dan status quo. Dalam perjanjian yang disepakati ternyata Belanda hanya mau mengakui kemerdekaan Republik Indonesia dengan syarat bahwa Indonesia dapat menjamin kepentingan-kepentingan ekonomi barat di wilayah bekas Hindia-Belanda. Untuk itu para pemimpin republik harus menjamin stabilitas politik masyarakat agar kepentingan yang terkait ekonomi barat tidak tertanggu. Pada sisi lain diyakini bahwa revolusi Indonesia bersifat anti kolonial dan anti kekuasaan asing. Dalam posisi demikian, politik diplomasi antara pihak RI dan pihak Belanda mudah memicu serangkaian konflik baik dengan pasukan Belanda maupun dengan kekuatan-kekuatan revolusi yang mengusung aspirasi dan menghendaki kedaulatan sepenuhnya.³

Bagi pihak Belanda politik diplomasi dijadikan sebagai salah satu cara untuk memperkuat posisi di daerah bekas jajahannya karena dalam perkembangan selanjutnya Belanda lebih tertarik kepada aksi militer. Sejak Inggris meninggalkan Indonesia bulan November 1946, Belanda semakin leluasa menentukan tindakan-tindakan ambisius tanpa takut diveto Inggris. Tindakan ambisius ini terwujud dalam keinginan untuk menguasai berbagai pusat ekonomi yang penting baik di Jawa maupun Sumatera melalui aksi-aksi militer. Alasan Belanda mengincar pusat-pusat ekonomis penting didasari oleh berbagai kesulitan yang tengah mereka

2 Robert Bridson Cribb, *Gejolak Revolusi di Jakarta 1945-1950* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990), hlm. 18.

3 Onghokham, *Rakyat dan Negara* (Jakarta: LP3ES, 1991), hlm. 156.

dihadapi berupa kekurangan sumber devisa dan keuangan.⁴

Dengan tidak tanggung-tanggung lagi bahkan kemudian Belanda melancarkan agresi militer terhadap ibukota RI, Yogyakarta, yang menjadi jantung dan pusat nadi negara republik. Agresi yang dilancarkan dengan tujuan demi meniadakan negara republik ternyata meleset dari sasaran. Kekuatan bersenjata dan kelaskaran yang berhasil dilokalisasi ke wilayah de yure RI yang sempit melalui Perjanjian Renville justru menyebar kembali ke kantong-kantong asal untuk melancarkan perjuangan gerilya. Kembalinya kekuatan bersenjata serta kelaskaran ke kantong-kantong gerilya seperti sebelum pemberlakuan Perjanjian Renville membuka kembali front-front perjuangan melawan kekuatan kolonialis.

Dalam rangka gerakan kembali ke kantong gerilya, pasukan Mobile Brigade Polisi terlibat kontak senjata dengan pasukan Belanda yang terdiri dari pasukan Cakra dan KNIL di Desa Jomerto. Pertempuran ini menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari kalangan pasukan Mobile Brigade Polisi sebanyak 13 orang maupun rakyat Desa Jomerto. Pertempuran yang terjadi juga menimbulkan kerusakan dalam segi materiel di kalangan penduduk desa. Penderitaan secara psikologis juga dirasakan bahkan hingga beberapa bulan karena setelah pertempuran berakhir Desa Jomerto diduduki pasukan Belanda yang mengadakan patroli dan penghadangan terhadap pasukan republik.

B. Pengaruh Palagan Jomerto Bagi Perjuangan

Pertempuran Jomerto sudah barang tentu memberi pengaruh terhadap perjuangan bangsa di daerah Jember dan Karesidenan Besuki. Pertempuran Jomerto telah menyebabkan berkurangnya personel Mobile Brigade Polisi di Besuki. Padahal mereka telah memperlihatkan keberanian dan pengalaman dalam perjuangan sebagaimana dibuktikan

4 Cribb, *op.cit.*, hlm. 135,

dalam keterlibatan mereka secara aktif dalam berbagai front pertempuran, misalnya di Karesidenan Besuki, Surabaya dan Blitar. Kemampuan dan pengalaman mengangkat senjata juga ditambah dengan keterlibatan dalam penumpasan pemberontak komunis di Madiun tahun 1948.⁵

Berkurangnya pasukan Mobile Brigade Polisi jelas memperlemah kemampuan pasukan untuk melawan kekuatan militer Belanda dalam rangka perang gerilya. Hal ini juga berarti mengurangi kemampuan republik untuk menekan atau tepatnya melelahkan dan membuat repot pasukan Belanda. Ungkapan melelahkan dan membuat repot dipandang lebih tepat dengan alasan bahwa secara militeristik diakui pihak republik sulit untuk dapat menghancurkan kekuatan militer dan memenangkan perang melawan Belanda, apalagi melalui pertempuran terbuka.⁶ Hal ini karena dilihat dari segi perlengkapan militer pihak republik kalah sempurna dibanding pihak Belanda. Dengan demikian, dilihat dari segi personel maka pertempuran Jomerto telah mengurangi kekuatan republik, termasuk persenjataan yang dimiliki republik untuk melakukan perjuangan melawan pasukan Belanda.

Sementara jika dikaitkan dengan segi mentalitas, pengaruh pertempuran Jomerto terhadap perjuangan lebih positif. Pertempuran Jomerto tidak diragukan justru meningkatkan fanatisme perjuangan melawan kekuatan kolonial, yang jelas-jelas bermaksud meniadakan keberadaan RI. Pertempuran Jomerto sebagai salah satu episode drama untuk meniadakan sebagian kekuatan bersenjata yang menjadi salah satu pilar Republik Indonesia merupakan bukti lain keinginan Belanda menghancurkan RI dan mendirikan otoritas kolonial kembali.

5 Mengenai keterlibatan Mobile Brigade Polisi dalam penumpasan pemberontakan komunis, lihat Weny Pudyastuti, "Peranan Polisi dalam Penumpasan Pemberontakan Komunis di Madiun tahun 1948". Skripsi (Jember: Fakultas Sastra Universitas Jember, 1995).

6 Pengakuan mengenai peranan perjuangan gerilya lebih bersifat melelahkan diakui misalnya oleh TB Simatupang, Lihat S. Nawiyanto, "Serangan Oemoem Satu Maret: Mencari Makna Kearifan", Harian Bernas, 1 Maret 1991.

Jatuhnya korban di kalangan Mobile Brigade Polisi jelas merupakan mendung yang menorehkan duka di kalangan anggota pasukan lainnya yang sedang melakukan *long march*. Hal ini disebabkan karena mereka sudah mempunyai ikatan solidaritas yang kokoh selama perjuangan melalui gembengan peristiwa dan pengalaman yang panjang. Solidarita ini diperkukuh lagi dengan pengalaman bersama selama *long march* dalam sebuah kebersamaan yang diwarnai secara kental dengan perasaan senasib dan sepenenderitaan dalam menghadapi medan perjalanan yang sulit serta terbatasnya logistik.

Penderitaan dan kekurangan selama *long march* dapat menjadi pengalaman yang memperkukuh kentalnya solidaritas. Kukuhnya solidaritas membuat jatuhnya korban di kalangan mereka dalam pertempuran Jomerto bagi anggota pasukan yang lain ikut mempertebal kegigihan sikap antipati terhadap kaum penjajah. Sikap antipati ini pada sisi lain merupakan sumber api yang dapat membakar semangat dan fanatisme perjuangan melawan kekuatan kolonialis. Dengan kata lain, jatuhnya korban telah melipatgandakan semangat perjuangan sebagaimana terungkap dalam ungkapan "mati satu tumbuh seribu". Dalam konteks perjuangan melawan penjajah ungkapan demikian menemukan tumbuh dan menemukan popularitasnya.

Pertempuran Jomerto juga menimbulkan korban di kalangan penduduk Desa Jomerto. Dengan pengorbanan ini Desa Jomerto dan penduduknya telah dipertautkan melalui darah dan jiwa dengan perjuangan bangsa secara langsung dan konkret. Dipertautkannya desa dan penduduk Jomerto dalam pengalaman perjuangan bangsa merupakan bagian dari keterlibatan desa dan penduduk pedesaan secara umum dalam mendukung revolusi kemerdekaan. Desa dan pedesaan identik dengan "kawan" dalam perjuangan, sedangkan kota dan perkotaan sering mengekspresikan "lawan" atau "wilayah musuh". Dengan demikian, desa

dan rakyat pedesaan telah menjadi satu kesatuan dalam perjuangan bukan hanya dalam tataran fisik, melainkan juga merambah lebih dalam lagi pada tataran simbolik.⁷

Pada tataran makro di tingkat nasional terdapat kesulitan untuk melihat secara eksplisit pengaruh langsung peristiwa Palagan Jomerto terhadap perjuangan bangsa. Akan tetapi, cara pemahaman terhadap pertempuran Jomerto memang mestinya tidak secara sendiri-sendiri atau terlepas dari peristiwa serupa di tempat lain. Dengan menempatkan Palagan Jomerto bersama-sama dengan pertempuran-pertempuran serupa di daerah lain secara kolektif sebagai upaya seluruh bangsa, maka pengaruh pertempuran dapat dilihat secara lebih jelas. Pertempuran Jomerto dan pertempuran-pertempuran lain membuktikan bahwa Republik Indonesia masih nyata keberadaannya. Dengan kemampuan militer yang lebih baik ternyata bukan jaminan bahwa Belanda dapat menegakkan kembali kekuasaan dan mengeliminasi kekuatan republik. Hal ini sangat berbeda dengan yang disuarakan Belanda di tingkat internasional bahwa mereka akan dapat mempasifikasi wilayah republik dalam waktu singkat. Artinya, palagan Jomerto merupakan bagian dari kontak-kontak bersenjata antara republik melawan Belanda, yang ikut menjadi bagian integral dalam perjuangan mencapai kemerdekaan, bersama-sama dengan perjuangan melalui jalur diplomasi internasional.

Untuk mengabadikan peristiwa sejarah tersebut, di Jember didirikan Monumen Palagan Jomerto . Uraian mengenai monumen tersebut disajikan dalam bagian berikut.

C. Deskripsi Fisik Monumen

Dalam kaitan dengan upaya mengabadikan peristiwa sejarah pada masa revolusi fisik untuk mempertahankan kemerdekaan, pembangunan

⁷ Daniel Dhakidae, "Laporan Tentang Perang dan Damai", Prisma, 12 (Desember 1980), hlm. 89.

monumen merupakan salah satu upaya konkret yang dapat dirasakan nilai signifikansinya. Nama yang biasa dipakai untuk menunjukkan identitas monumen secara umum setidaknya bisa merujuk pada tiga hal. Pertama, nama monumen dapat diambilkan dari lokasi geografis tempat terjadinya peristiwa atau proses sejarah (*historical event or process*) yang hendak diabadikan dalam bentuk monumen. Kedua, nama monumen diambilkan dari nama tokoh sejarah (*historical actors/players*) yang berperan secara sentral dalam peristiwa yang dimaksud baik nama individu maupun kelompok kolektif. Ketiga, nama monumen diambilkan dari nama senjata atau alat yang dipergunakan dalam perjuangan.⁸

Nama yang dipakai untuk identitas monumen perjuangan yang dibangun di Desa Jomerto, Kecamatan Patrang, Jember rupanya diambil dari lokasi terjadinya peristiwa sejarah. Nama monumen tersebut adalah Monumen Palagan Jomerto. Monumen Palagan Jomerto ini terletak sekitar 5 km arah utara dari kota Jember. Letaknya persis di sebelah kanan Kantor Desa Jomerto. Secara administratif Desa Jomerto berbatasan dengan Desa Banjarsengon di sebelah barat, Desa Bintoro di sebelah timur, Desa Klungkung di sebelah utara dan Desa Slawu di sebelah selatan. Perjalanan menuju lokasi monumen dapat ditempuh dengan mudah karena sudah terdapat fasilitas jalan desa beraspal yang menghubungkannya dengan kota, kecamatan dan kabupaten.

8 Untuk sekadar contoh di daerah Jawa Timur nama monumen yang diambilkan dari nama tempat berlangsungnya peristiwa antara lain Monumen Tumpeng, Monumen Kepuh Sari, Monumen Padusan, Monumen Gumeng, Monumen Jatidukuh, Monumen Randegan dan Monumen Parengan. Monumen yang namanya diambil dari nama tokoh atau kelompok misalnya Monumen Kadet Soewoko, Monumen Suparjono, Monumen Soerjo, Monumen PETA, Monumen PMI Remaja. Monumen yang namanya diambil dari senjata atau alat yang dipakai dalam perjuangan misalnya Monumen Bambu Runcing, Monumen Peluru dan Monumen Gerbong Maut. Lihat, Prayoga Kartomihardjo, Prapto Saptono dan Sukarsono, Monumen Perjuangan di Jawa Timur (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986).



Monumen Palagan Jomerto (Koleksi Tim)

Monumen Palagan Jomerto berada satu kompleks dengan bangunan masjid. Kedua bangunan ini dibangun dalam waktu yang bersamaan dan antara kedua bangunan dipisahkan dengan pagar yang terbuat dari tembok dan besi. Kompleks bangunan ini relatif bersih dan cukup terawat dengan baik. Di sekeliling bangunan monumen telah diberi pagar tembok dengan hiasan relief perjuangan. Pagar bagian depan dibuat dari besi yang membuat monumen dapat dilihat dari luar. Untuk jalan masuk ke dalam kompleks monumen di bagian depan terdapat pintu besi yang selalu dalam keadaan terkunci sehingga jikalau ingin masuk harus seijin penjaganya yang tinggal sekitar 100 meter dari bangunan monumen. Di samping berfungsi menjaga bangunan monumen dari tindakan perusakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, pemberian pagar juga membuat bangunan monumen tampak estetik.

Bahan dasar monumen merupakan campuran semen, batu bata dan batu gunung. Bangunan monumen berdiri megah menyerupai

tugu setinggi 11 meter dan terdiri dari beberapa bagian. Bagian pondasi berbentuk segi lima dengan ukuran sisi 3 meter. Di atasnya terdapat dinding sebelah-menyebelah. Dinding bagian depan bertuliskan prasasti pembangunan monumen yang diresmikan pada tanggal 1 Juli 1984 oleh Kapolda Jawa Timur Mayor Jenderal Polisi Soedarmadji. Pada dinding sebelah kanan tertulis nama-nama pahlawan dari Mobile Brigade yang telah gugur dalam pertempuran Jomerto di atas sebuah batu marmer berukuran 2 x 2 meter. Pada dinding sebelah kiri tertulis nama-nama penduduk Jomerto yang menjadi korban pertempuran. Pada dinding yang lain tertulis nama-nama anggota Brimob yang gugur dalam pertempuran di Jomerto.



Daftar Nama Korban Meninggal dalam Peristiwa Jomerto (Koleksi Tim)



Daftar anggota Brimob yang gugur dalam Peristiwa Jomerto (Koleksi Tim)

Di bagian atasnya lagi terdapat tancapan lima bambu runcing serta terpampang lambang kepolisian Jawa Timur. Di atas lima bambu runcing terdapat dua buah senjata api peninggalan Jepang yang bersandar pada empat tiang kokoh. Di atas keempat tiang kokoh ini terdapat tiga pilar segi tiga dan lambang *Rastra Sewakottama*. Sementara puncak bangunan Monumen Jomerto berbentuk bungan teratai dengan obor abadi yang tidak pernah padam.

D. Arti Lambang

Bangunan Monumen Palagan Jomerto mempunyai makna filosofis yang sangat tinggi. Makna filosofis ini secara eksplisit tercermin dalam sejumlah lambang yang melekat pada bangunan monumen. Bahkan dapat dikatakan bahwa bangunan monumen dari bawah hingga ke puncaknya

Digital Repository Universitas Jember

merupakan susunan sejumlah lambang. Adanya lambang yang melekat pada bangunan monument membenarkan pendapat Cassirer bahwa manusia adalah *animal symbolicum*.⁹ Manusia bukanlah semata-mata makhluk rasional *animal rationale* sebagaimana diyakini kaum rasionalis. Manusia juga bukan hanya makhluk ekonomis (*homo economicus*) seperti diyakini kelompok ekonom. Manusia adalah makhluk yang menghayati eksistensinya dengan seperangkat simbol dan lambang yang diciptakannya.



Simbol-simbol yang membentuk fondasi Monumen Palagan Jomerto (Koleksi Tim)

Fondasi bangunan Monumen Palagan Jomerto yang berbentuk segi lima melambangkan kelima sila Pancasila yang menjadi dasar negara dan falsafah hidup negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa perjuangan

⁹ Ernst Cassirer, *Manusia dan Kebudayaan: Sebuah Esei tentang Manusia* (Jakarta: PT Gramedia, 1990), hlm. 40.

yang terungkap dalam peristiwa Palagan Jomerto dilandasi oleh nilai-nilai luhur yang dikristalisasikan dalam kelima sila Pancasila.

Di atas fondasi terpampang lambang kepolisian daerah Jawa Timur serta lima buah bambu runcing yang menancap. Kelima bambu runcing ini melambangkan senjata yang dipergunakan rakyat pada masa perjuangan dalam rangka merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sekalipun hanya dengan senjata yang amat sederhana, rakyat berani melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda yang persenjataannya jauh lebih baik dan lebih lengkap. Dengan demikian, bambu runcing merupakan simbol heroisme dan patriotisme rakyat dalam ikut serta mempertahankan kemerdekaan.

Di atas lima bambu runcing ditempatkan dua buah senjata api laras panjang peninggalan Jepang yang melambangkan senjata polisi. Kedua senjata tersebut bersandar pada empat pilar tiang yang melambangkan keempat pedoman kerja polisi Republik Indonesia yakni Catur Prasetya, Yaktan Satrisna. Keempatnya secara berurutan berarti setia kepada negara dan pimpinan negara, mengenyahkan musuh-musuh negara dan masyarakat, mengagungkan negara dan bangsa serta tidak terikat *trisnya* pada sesuatu. Pilar ini dihiasi dengan lambang Brigade Mobil (Brimob).

Di atas tiang Catur Prasetya terdapat tiga pilar segitiga yang melambangkan Tri Brata yang menjadi pedoman hidup Polri dengan hiasan lambang *Rastra Sewakottama*. Sesuai dengan isi Tri Brata yang mencakup *Rastra Sewakottama, Nagarayanottama dan Yana Anucasanadharma*, polisi adalah abdi teladan negara, warga negara utama dengan kewajiban menjaga ketertiban pribadi rakyat. Bagian puncak monumen berupa teratai dengan obor yang tidak pernah padam. Bentuk puncak ini melambangkan jiwa semangat Polri yang senantiasa berkobar dalam pengabdian terhadap nusa, bangsa dan negara menuju tercapainya cita-cita luhur bangsa Indonesia, yakni masyarakat yang *tata tentrem kerta*

raharja (adil makmur dan sejahtera) sepanjang jaman.



Lambang-Lambang yang membentuk monumen (Koleksi Tim)

E. Maksud dan Tujuan Pembangunan Monumen

Adanya kesadaran sejarah merupakan salah satu karakter yang membedakan keberadaan manusia dengan makhluk lainnya. Memang harus diakui bahwa terdapat perbedaan tingkatan kesadaran sejarah

secara individual maupun kolektif. Dengan kata lain, terdapat perbedaan tingkatan kesadaran sejarah antara komunitas yang satu dengan komunitas yang lain atau antara individu yang satu dengan yang lain. Akan tetapi, adanya variasi tingkat kesadaran sejarah bukan semata-mata hanya berkaitan dengan heterogenitas sosial, melainkan berkaitan juga dengan lintas temporal seiring dengan gerak perjalanan sejarah. Dalam perjalanan waktu yang tidak pernah berhenti kesadaran sejarah mengalami pasang surut.¹⁰

Adanya kesadaran sejarah yang terus mengalir dalam masyarakat salah satunya dimanifestasikan dalam berbagai upaya untuk membuat keberadaan individu maupun kelompok kolektif tetap akan selalu dikenang sepanjang sejarah. Menyadari keberadaan individu maupun kelompok kolektif yang terbatas dalam sebuah rentang waktu, maka mereka baik secara individual maupun kolektif berusaha memberikan bukti maupun tanda-tanda akan keberadaan dalam sebuah periode sejarah. Dalam konteks inilah sebenarnya penulisan sejarah atau yang sering disebut pula dengan istilah historiografi maupun pembangunan monumen pertamanya perlu ditempatkan. Penulisan sejarah dan monumen merupakan sebagian dari bentuk pertanggungjawaban akan masa lampau dari suatu komunitas maupun individu.¹¹

Dalam kerangka pemikiran tersebut Monumen Palagan seharusnya ditempatkan. Monumen Palagan Jomerto dimaksudkan sebagai simbolisasi peristiwa pertempuran melawan pasukan Belanda di daerah Jomerto dalam bentuk bangunan fisik yang dapat dilihat secara langsung. Pada bangunan ini dilekatkan nilai sejarah perjuangan Mobile Brigade

10 Pembahasan mengenai kesadaran sejarah lihat misalnya, F. R. Ankersmit, *Refleksi tentang Sejarah: Pendapat-Pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah* (Jakarta: PT Gramedia, 1987), hlm. 349 – 357; lihat juga Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: PT Gramedia, 1992), hlm. 19 – 21.

11 Sarwono Pusposaputro, "Catatan Editorial" dalam buku Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif* (Jakarta: PT Gramedia, 1982), hlm. V.

dan rakyat Jomerto dalam ikut serta merebut dan mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dari keinginan kekuatan kolonial yang bermaksud menanamkan kembali kekuasaannya atas Indonesia melalui serangkaian aksi militernya. Keberadaan Monumen Palagan Jomerto dengan demikian ditujukan untuk mengabadikan semangat perjuangan melawan kekuasaan kolonial.

Pengabdian semangat perjuangan secara konkret dalam bentuk monumen membuat semangat perjuangan yang sebenarnya bersifat abstrak dapat terus dikenali oleh generasi-generasi berikutnya. Didasari bahwa semangat perjuangan tidak mustahil tenggelam dan dilupakan bersamaan dengan pergantian generasi. Akan tetapi, dengan mengabadikannya dengan sebuah monumen semangat perjuangan tersebut tetap terus dapat dihadirkan bagi generasi berikutnya meskipun waktu senantiasa berjalan dan berubah.¹² Bagi generasi penerus Monumen Palagan Jomerto dapat dipakai sebagai bukti yang memberikan kesaksian mengenai semangat perjuangan dan pengorbanan tanpa pamrih yang telah diberikan oleh Mobile Brigade Polisi dan rakyat Jomerto bagi bangsa dan negara. Pembangunan Palagan ini juga merupakan wujud pengakuan, penghargaan dan penghormatan terhadap pahlawan.¹³ Ada pepatah menyatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat menghargai jasa para pahlawannya.

Pembangunan Monumen Palagan Jomerto ini diprakarsai oleh Bapak Soemardijono bersama dengan beberapa mantan anggota polisi yang ikut terlibat dalam peristiwa pertempuran Jomerto. Pelaksanaan pembangunan monumen ditangani oleh DPU Cipta karya Besuki dan

12 Pembahasan mengenai pergeseran semangat dan nilai perjuangan lihat misalnya Ruslan Abdulgani, "Pergerakan Nilai-Nilai Kejuangan dan Kepahlawanan Dalam Perspektif Sejarah", Makalah, disajikan pada Seminar MSI Cabang Jawa Timur di Surabaya tanggal 10 Nopember 1994.

13 Soemardijono, "Laporan Pelaksanaan Pembangunan Palagan Jomerto di Desa Jomerto Kecamatan Patrang Kotip Jember, 22 Oktober 1984.

DPU Kabupaten Jember. Pembangunan dimulai tanggal 26 Januari 1984 dan diselesaikan pada tanggal 20 Oktober 1984. Pembangunan monumen dilakukan bersama-sama dengan pembangunan masjid yang terdapat di sebelahnya. Keseluruhan biaya untuk pembangunan monumen dan masjid menghabiskan dana lebih dari 20 juta rupiah. Adapun sumber dana diperoleh dari anggota Polri dan bantuan dari berbagai pihak termasuk Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Jember Suryadi Setiawan.



BAB 6

KESIMPULAN

Monumen Palagan Jomerto yang terletak di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember merupakan bangunan yang mempunyai nilai penting karena beberapa alasan. Pertama, bangunan ini mempunyai makna historis-nostalgia akan peristiwa bersejarah berupa pertempuran melawan kekuatan militer Belanda yang berlangsung di wilayah Kabupaten Jember. Makna yang dimiliki Monumen Palagan Jomerto secara esensial sama dengan bangunan-bangunan monumen bersejarah lainnya yang banyak didirikan di berbagai wilayah Indonesia terutama pada masa pemerintahan Orde Baru, seperti Monumen Yogya Kembali (Monjali). Kedua, bangunan ini menjadi ungkapan penghargaan dan pengakuan terhadap pengorbanan dan jasa para pahlawan dan pejuang bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Ketiga, Monumen Palagan Jomerto juga merupakan pengabdian semangat perjuangan secara simbolis yang dengan eksplisit tercermin dalam beragam lambang yang digunakan dan membentuk bangunan monumen bersejarah di wilayah Jember ini. Keempat, bangunan Monumen Palagan Jomerto dapat menjadi media pembelajaran sejarah di luar kelas dalam rangka menginspirasi dan membangkitkan kesadaran sejarah generasi penerus bangsa agar mewarisi mental pejuang, semangat rela berkorban, sebagaimana telah diteladankan

melalui tindakan nyata oleh para pendahulu bangsa.yang berjuang hingga titik darah penghabisan dalam mencapai dan mempertahankan kemerdekaan.

Pertempuran yang terjadi di Jomerto Kecamatan Patrang Kabupaten Jember merupakan salah satu bentuk insiden yang memanifestasikan konflik yang terjadi antara pihak Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda dengan pihak Indonesia di tingkat lokal. Insiden serupa terjadi di berbagai wilayah Indonesia lainnya pada masa Revolusi Kemerdekaan. Konflik antara kedua belah pihak berakar pada kepentingan yang berbeda bahkan bisa dikatakan bertolak belakang. Dengan kerangka pemikiran Dahrendorf dapat dilihat bahwa Indonesia di satu pihak mempunyai kepentingan mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan ketika tengah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia akibat menyerahnya pemerintah pendudukan Jepang kepada pihak Sekutu. Pada pihak lain, terdapat Belanda yang mempunyai kepentingan menegakkan kembali status-quo kekuasaannya di Indonesia. Hal ini berarti antara kedua belah pihak terlibat konflik politik untuk saling mengeliminasi demi tegaknya kepentingan masing-masing. Konflik politik ini dimanifestasikan salah satunya dalam bentuk pertempuran. Pertempuran Jomerto juga dapat dipandang sebagai bentuk konflik antara kelompok teritorial yang didorong oleh faktor kebangsaan seperti dikonsepsikan Duverger.

Selain terkait erat dengan faktor politik, pecahnya insiden pertempuran Jomerto yang banyak menelan korban jiwa tidak terlepas dari faktor militer. Pasukan Mobile Brigade Polisi yang melakukan perjalanan *long march* diketahui keberadaannya di Jomerto akibat laporan mata-mata musuh. *Long march* ini dilakukan atas perintah Panglima Besar Soedirman yang memegang pimpinan tertinggi militer untuk kembali ke kantong wilayah masing-masing. Batalyon 3 Mobile Brigade Polisi yang mempunyai basis gerilya di daerah Maesan, Bondowoso memutuskan

untuk kembali ke kantongnya dan melanjutkan perjuangan melawan Belanda di daerah yang pernah ditinggalkan sesuai dengan hasil Perjanjian Renville. Menurut prinsip, selama *long march* pasukan Mobile Brigade Polisi tidak ingin terlibat kontak senjata dengan pihak Belanda. Akan tetapi, karena mendapat serangan pasukan Mobile Brigade Polisi tidak mempunyai pilihan selain melakukan perlawanan agar tidak tertumpas. Pasukan Mobile Brigade Polisi memberi perlawanan sambil terus berupaya melepaskan diri dari kancah pertempuran agar dapat kembali secara utuh ke markas gerilya di Bondowoso. Adanya perlawanan gigih membuat pasukan Belanda meminta bala bantuan dari Kota Jember. Dalam pertempuran ini antara pasukan Belanda sendiri sempat terjadi baku-tembak akibat terkena tipu-muslihat. Pasukan Mobile Brigade Polisi sendiri setelah memberi perlawanan selama beberapa saat akhirnya berhasil mengundurkan diri dan melakukan konsolidasi di Desa Durjo untuk kemudian melanjutkan *long march* ke basis gerilya mereka di wilayah Bondowoso.

Pertempuran di Jomerto sekalipun terjadi dalam waktu relatif singkat ternyata menimbulkan akibat besar bagi kedua belah pihak. Akibat yang ditimbulkan bukan hanya menyangkut segi materiel berupa kerusakan fisik, melainkan juga menimbulkan jatuhnya korban jiwa baik di kalangan anggota pasukan Mobile Brigade Polisi maupun rakyat Desa Jomerto. Di samping itu, akibat psikologis juga dirasakan terutama oleh penduduk setempat karena pasukan Belanda mengontrol desa ini dalam rangka patroli dan pasifikasi daerah untuk mengikis kegiatan para pejuang kemerdekaan. Palagan Jomerto ikut membuktikan bahwa pengorbanan yang diberikan rakyat pedesaan selama perjuangan kemerdekaan begitu besar. Mengingat pengorbanan mereka selama perjuangan kemerdekaan, sudah selayaknya pada masa pembangunan untuk mengisi kemerdekaan rakyat mendapat perhatian serius dari pemerintah. Palagan Jomerto

juga memperlihatkan besarnya pengorbanan Mobile Brigade Polisi bagi perjuangan kemerdekaan. Oleh karena itu, sudah selayaknya pula apabila semangat perjuangan dan pengorbanan yang telah mereka berikan dapat menjadi panutan dan suri teladan bagi para generasi bangsa yang tengah berjunag membangun bangsa untuk mencapai masyarakat adil dan makmur sehingga bangsa Indonesia dapat setara dan sederajat dengan Belanda serta bangsa-bangsa lain dalam pergaulan internasional.



DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip, Buku, Artikel dan Laporan Penelitian

- A.H. Nasution. 1977 dan 1979. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*. Bandung: Angkasa.
- A.H. Nasution. 1982. *Memenuhi Panggilan Tugas: Kenangan Masa Muda*, Jilid I. Jakarta: Gunung Agung.
- Agus Wiradihardja. 1980. *Kepemimpinan dan Kepahlawanan Komisaris Polisi II R.M. Bambang Soeprpto Dipokoesomo*. Jakarta: Disjarah Mabes POLRI.
- Ahmad Sobardjo. 1977. *Lahirnya Republik Indonesia*. Bandung: PT Kinta.
- Anderson, Ben. 1988. *Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Ankersmit, F.R. 1987. *Refleksi tentang Sejarah: Pendapat-pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Anonim. 1967. *20 Tahun Perkembangan Angkatan Kepolisian Kepolisian Indonesia*. Jakarta: Inkopak.
- ANRI, Koleksi Arsip Kementerian Penerangan, No. Inventaris 94, "Laporan No. 20/Secr/G/tg. 1-12-48: Daerah Pendudukan Besuki".
- ANRI, Koleksi Arsip Kementerian Pertahanan No. Inventaris 1377, "Penindjauan di Daerah2 Pendoedoeakan di Karesidenan Malang dan Besoeki, pada tg. 18/10-4/11-47".

- Benda, Harry. J. 1980. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Cassirer. Ernest. 1990. *Manusia dan Kebudayaan: Sebuah Esei tentang Manusia*. Jakarta: Gramedia.
- Cribb, Robert B. 1990. *Gejolak Revolusi di Jakarta 1945-1949: Pergulatan antara Otonomi dan Hegemoni*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Dadi Rohaedi. 1992. "Peranan POLRI dalam Penumpasan Pemberontakan PKI Madiuntahun 1948". *Senakatha*, 4 (14 April).
- Dahrendorf, Ralf. 1984. *Konflik-konflik dalam Masyarakat Industri*. Jakarta: CV Rajawali.
- Daniel Dhakidae. 1980. "Laporan tentang Perang dan Damai". *Prisma*, 12 (Desember).
- Davis, Cullom, et al. *Oral history: from tape to type*. Chicago: American Library Association, 1977.
- Deliar Noer. 1990. *Mohammad Hatta: Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Dison Mulyadi. 1984. "Peranan Perjuangan Rakyat Bondowoso Menghadapi Agresi Belanda I 1947". *Laporan Penelitian*. Jember: Pusat Penelitian Universitas jember.
- Djoko Surjo. 1980. "Sekitar Masalah Sejarah dengan Ilmu-Ilmu Sosial". *Seri Bacaan Sejarah No. 4*. Yogyakarta: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UGM.
- Drooglever, P.J. 1987. "Uneasy encounter: Semarang, Ambarawa, and Magelang during the first month of the Revolusi". Dalam T. Ibrahim Alfian, et al. (ed.). *Dari Babad dan Hikayat sampai Sejarah Kritis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edy Burhan Arifin. 1979. "Agresi Militer I Belanda Mengakibatkan Terjadinya Peristiwa Gerbong Maut 23 November 1947". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM.
- Ember, Carol C. Dan Melvin Ember. 1980. "Teori dan Metoda Antropologi Budaya". T.O. Ihromi (ed). *Pokok-pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Gramedia.

- Frederick, William H. 1989. *Pandangan dan Gejolak: Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946)*. Jakarta: Yayasan Karti Sarana dan Gramedia.
- G.A. Ohorella dan Restu Gunawan, *Sejarah Lokal Peranan Rakyat Besuki (Jawa Timur) pada Masa Perang Kemerdekaan* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2001), hlm. 51-52.
- Gottschalk, Louis. 1975. *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Himawan Soetanto, *Yogyakarta: Jendral Spoor (Operatie Kraai) versus Jendral Sudirman (Perintah Siasat No. 1)* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 74-75.
- Himawan Soetanto. 1994. *Perintah Presiden Soekarno: "Rebut Kembali Madiun,,,"*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Hoopes, James. 1979. *Oral history: an introduction for students*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press.
- Ibrahim Alfian, T. 1987. *Perang di Jalan Allah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Irna H.N. Hadi Suwito. 1994. *Rakyat Jawa Timur Mempertahankan Kemerdekaan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Kahin, George Mc.T. 1995. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Solo: UNS Press.
- Kepolisian Resort Jember. 1984. *Palagan Jomerto: Perjuangan POLRI dalam Perang Kemerdekaan RI*. Jember: Kepolisian Indonesia Resort Jember.
- Kodak IX/Jateng. *Sejarah Kepolisian Komando Daerah Kepolisian IX Jawa Tengah 1945-1980*. Semarang: Kodak IX.
- Kuntowijoyo. 1993. *Radikalisasi Petani*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo. 1994. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kurasawa, Aiko. 1993. *Mobilisasi dan Kontrol: Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*. Jakarta: Yayasan Karti Sarana dan Gramedia.

- Leirissa, R.Z. 1985. *Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-1950*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Lucas, Anton. 1989. *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi*. Jakarta: Grafiti Pers.
- M. Oudang. 1968. *Perkembangan Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. 1990. *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta: Balai Pustaka.
- McVey, Ruth. 1983. "Pesona Revolusi: Sejarah dan Aksi salam sebuah Naskah Komunis Indonesia". Dalam Anthony Reid dan David G. Maar (ed). *Dari Raja Ali Haji hingga Hamka*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Memet Tanumidjaja. 1971. *Sedjarah Perkembangan Angkatan Kepolisian*. Jakarta: Pusat Sejarah ABRI.
- Nash. R.H. 1969. *Ideas of history: The Critical philosophy of history*. New York: EP Dutton.
- Nawiyanto, Eko Crys Endrayadi, dan Siti Sumardiati. 2015. *Melacak Jejak Pejuang: Biografi R.H. Noerdhin Soetawidjaja*. Yogyakarta: Galang Press bekerjasama dengan Tarutama Nusantara dan Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember.
- Nawiyanto. 1991. "Serangan Oemoem Satu Maret: Mencari Makna Kearifan". *Harian Bernas*. 1 Maret.
- Nugroho Notosusanto, et al. 1990. *Sejarah Nasional Indonesia, Jilid VI*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nugroho Notosusanto. 1963. "Pangkalan X dan Ekspedisi Lintas Laut Jang Pertama kali di Bali". *Makalah*. Jakarta: Pusat Penerangan Angkatan Laut.
- Nugroho Notosusanto. 1979. *Tentara PETA pada Zaman Pendudukan Jepang Di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Sejarah Hankam.
- Onghokham. 1991. *Rakyat dan Negara*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Pamoe Rahardjo. 1993. *Tentara Peta (Pembela Tanah Air)*. Jakarta: Majalah PETA

- Panitya Peristiwa Korban Gerbong Maut Bondowoso. T.t. "Sekelumit Sedjarah Kepahlawanan: Kisah Peristiwa Perjalanan K.A. Gerbong Maut Bondowoso-Wonokromo.
- Penders. C.L.M. 1981. *Mohammad Hatta Indonesian Patriot*. Singapore: Gunung Agung.
- Pinardi. 1966. *Peristiwa Coup Berdarah PKI September 1948 di Madiun*. Jakarta; Inkopak-Hazera.
- Prayoga Kartomihardjo, Prapto Saptono, dan Soekarsono. 1986. *Monumen Perjuangan Jawa Timur*. Jakarta; Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Prijotomo, Josef. 1996. *Ideas and Forms of Javanese Architecture*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- R. Soetojo, "Sekilas Perjuangan Fisik Membela dan mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia di Daerah Jember", dalam *Bunga Rampai Perjuangan dan Pengorbanan*, Jilid IV (Jakarta: Markas Besar Legiun Veteran RI, 1991), hlm. 494.
- Reid, Anthony J.S. 1996. *Revolusi Nasional Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Ricklefs. M.C. 1992. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ruslan Abdulgani. 1994. "Pergeseran Nilai-nilai Kejuangan dan Kepahlawanan dalam Perspektif Sedjarah". *Makalah*. Seminar MSI Cabang Jawa Timur di Surabaya 10 Nopember.
- Saleh As'ad Jamhari. 1971. *Ichthisar Sejarah Perjuangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 1945-Sekarang*. Jakarta: Pusat Sejarah ABRI Departemen Pertahanan Keamanan.
- Sartono Kartodirdjo. 1973. *Protest movements in rural Java: A study of agrarian unrest in the nineteenth and twentieth centuries*. Singapore: Oxford University Press.
- Sartono Kartodirdjo. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia.

- Sartono Kartodirdjo. *Sejarah Pergerakan Nasional* Jilid I. Jakarta: Gramedia.
- Sarwono Pusposaputro. 1982. "Catatan Editorial" dalam buku Sartono Kartodirdjo. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif*. Jakarta: PT Gramedia.
- Scott, James C. 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Simatupang, T.B. 1960. *Laporan dari Banaran: Kisah Pengalaman Seorang Prajurit Selama Perang Kemerdekaan*. Djakarta: PT Pembangunan.
- Simatupang, T.B. 1981. *Pelopor Dalam Perang Pelopor Dalam Damai*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Smail, John R.W. 1964. *Bandung in the Early Revolution*. Ithaca: Cornell University Modern Indonesia Project.
- Soemardijono. 1984. "Laporan Pelaksanaan Pembangunan 'Palagan Jomerto' di Kelurahan Jomerto, Kecamatan Patrang Kotib Jember, 22 Oktober.
- Solichin Salam. 1983. "May. Jend . (Pol.) Mohammad Jasin dan Pertempuran Surabaya 1945". *Berita Buana*, 17 Februari.
- Subditjarah. 1987. *Biografi Mayor Jenderal Polisi R. Soetjipto Danoekoesoemo*. Jakarta: Direktorat Personil Mabes POLRI.
- Swift, Ann. 1989. *The Road to Madiun: The Indonesian Communist Uprising of 1948*. Ithaca: Cornell University Modern Indonesia Project.
- Taufik Abdullah. 1985. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Team Kodak X Jatim. 1982. *Peranan Polri dalam Perjuangan Kemerdekaan di Jawa Timur 1945-1949*. Surabaya: Kodak X Jawa Timur.
- Vredembregt. 1979. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia.
- Walsh, W.H. 1963. *An introduction to philosophy of history*. London: Hutchinson University Press.
- Weny Pudyastuti. 1995. "Peranan Polisi dalam Penumpasan Pemberontakan Komunis di Madiun tahun 1948". *Skripsi*. Jember: Fakultas Sastra Universitas Jember.

Wilhelm, Donald. 1980. *Emerging Indonesia*. Jakarta: Indira.

Yunani Prawiranegara, R.M. 1984. "Nyemak Sejarah Palagan Jomerto: (2) Palagan Jomerto *Minangka* Mata Rantai Sejarah Perjuanga Polri lan Bangsa Indonesia. *Jayabaya*. 18 November.

B. Koran dan Majalah Sejaman

"Angkatan Laoet Keradjaan Menoelis Sedjarah di Djawa Timur" dalam *Saudara Seperdjoeangan*, Tahun 2 No. 21, 8 September 1947, hlm. 8-9.

"Beku sebagai Noda Sejarah". *Hidup*. 3 November 1948.

"Hukuman Besar Bagi Pemimpin Yang Menimbulkan Kesengsaraan Rakyat". *Murba*. 2 September 1948.

"Kekuasaan Penuh Kepada Presiden Soekarno". *Murba*. 21 September 1948.

"Keluarga Musso Ragu". *Murba*. 19 September 1948.

"Kesalahan Revolusi Yang Prinsipeel". *Buruh*. 17 Agustus 1948.

"Madiun di Tangan Kita". *Hidup*. 1 Oktober 1948.

"Pemerintah Soekarno-Hatta Tetap Koeasa". *Hidup*. 20 September 1948.

"Perintah Panglima Besar Soedirman". *Hidup*. 20 September 1948.

"Pernyataan Pesindo". *Pacific*. 3 September 1948.

"PKI dan SOBSI Mengakui Kesalahan". *Murba*. 24 Agustus 1948.

"Protes Umum Rakyat di Solo Sekitar Penculikan Pemimpin Rakyat dan Militer". *Buruh*. 13 September 1948.

"Pemuda dan Revolusi". *Buruh*. 18 Agustus 1948.

"Siapa Pengacau". *Buruh*. 19 September 1948.

"Tak Takut Darah Mengalir". *Hidup*. 1 Oktober 1948.

"Tawanan-tawanan Dibunuh". *Hidup*. 4 Oktober 1948.

"Tentara Kita Disambut dengan Gembira". *Hidup*. 2 Oktober.

C. Kaset dan Wawancara

Wawancara dengan Bapak Soekari di Bondowoso, 2 November 1995.

Wawancara dengan Bapak Abdarullah (Suhadi) di Kelurahan Jumerto, 10 Desember 1995.

Wawancara dengan Bapak Darmowaluyo tanggal 11 Maret 1982 di Kores 1054/ Magetan, Koleksi Kaset milik Disbintal Mabes POLRI Jakarta, No. Kaset ST.26.Bp.

Wawancara dengan Bapak Sartono tanggal 12 Maret 1982 di Kores 1053/ Ngawi, Koleksi Kaset milik Disbintal Mabes POLRI Jakarta, No. Kaset ST.26.Bx.

Wawancara dengan Bapak Kasidik tanggal 11 Maret 1982 di Kores 1053/ Ngawi, Koleksi Kaset milik Disbintal Mabes POLRI Jakarta, No. Kaset ST.26.Bq.

Wawancara dengan Bapak Sukardi tanggal 12 Maret 1982 di Kores 1054/ Magetan, Koleksi Kaset milik Disbintal Mabes POLRI Jakarta, No. Kaset ST.26.By.

Wawancara dengan Bapak Masiran tanggal 11 Maret 1982 di Kores 1053/ Ngawi, Koleksi Kaset milik Disbintal Mabes POLRI Jakarta, No. Kaset ST.26.Br.

Wawancara dengan Bapak Katrimo tanggal 11 Maret 1982 di Kores 1053/ Ngawi, Koleksi Kaset milik Disbintal Mabes POLRI Jakarta, No. Kaset ST.26.Br.

Radar Jember

[Rabu, 01 Juli 2009]

Mengenang Para Pahlawan yang Gugur dalam Palagan Jumerto

KNIL Menyerang, 13 Anggota Brimob Gugur

Desa Jumerto, Patrang, Jember, menyimpan sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan NKRI. Tiga belas anggota Brimob dan 20 warga setempat tewas karena ditembus peluru pasukan Cakra dari KNIL Belanda yang berniat menduduki Indonesia. Jumai-Narto, Jember

Monumen Palagan Jumerto yang berdiri di depan Kelurahan Jumerto, Kecamatan Patrang, tetap kukuh. Deretan nama 13 anggota Brimob Polri dan 20 warga setempat tertulis jelas pada monumen yang diresmikan 1 Juli 1984 oleh Kapolda Jawa Timur saat itu, Mayjen Polisi Soedarmadji.

Kapolres Jember saat itu, Letkol Polisi H Soemardiono, juga tertulis di monumen tersebut. Dua bambu runcing, logo Brimob, logo Polri, serta logo Polda Jatim, pun terpampang di monumen bersejarah tersebut. Menjelang Hari Bhayangkara 1 Juli 2009 kemarin (30/6), jajaran Kapolres Jember berkunjung ke monumen itu.

Tidak banyak yang tahu sejarah monumen setinggi 10 meter tersebut. Para saksi mata peristiwa maut itu sudah tiada. Kini tinggal anak dan para cucu saksi mata yang tetap mengenang sejarah kepahlawanan 13 anggota Brimob dan 20 warga Jumerto tersebut.

Suhadi, salah seorang warga Jumerto, menyatakan mendapatkan cerita kepahlawanan itu dari Abdarullah, ayahnya yang meninggal lima bulan lalu. Dia kemudian menceritakan peristiwa Palagan Jumerto. Kejadian tersebut bermula dari kedatangan 13 anggota Brimob yang mendapatkan tugas patroli keliling Jawa Timur (Jatim).

“Tiga belas anggota Brimob itu baru datang dari perjalanan panjang,” kata Suhadi. Sebelum menginap di Desa Jumerto, mereka menempuh perjalanan dari Lumajang, Malang, dan Blitar. “Ayah saya lupa harinya. Saat itu 1949,” tambahnya.

Lebih lanjut dia bercerita, karena sudah kelelahan, mereka memutuskan bermalam di Desa Jumerto. “Ketika sampai di Desa Jumerto, mereka bertemu Pak Yakub (salah satu warga),” tuturnya.

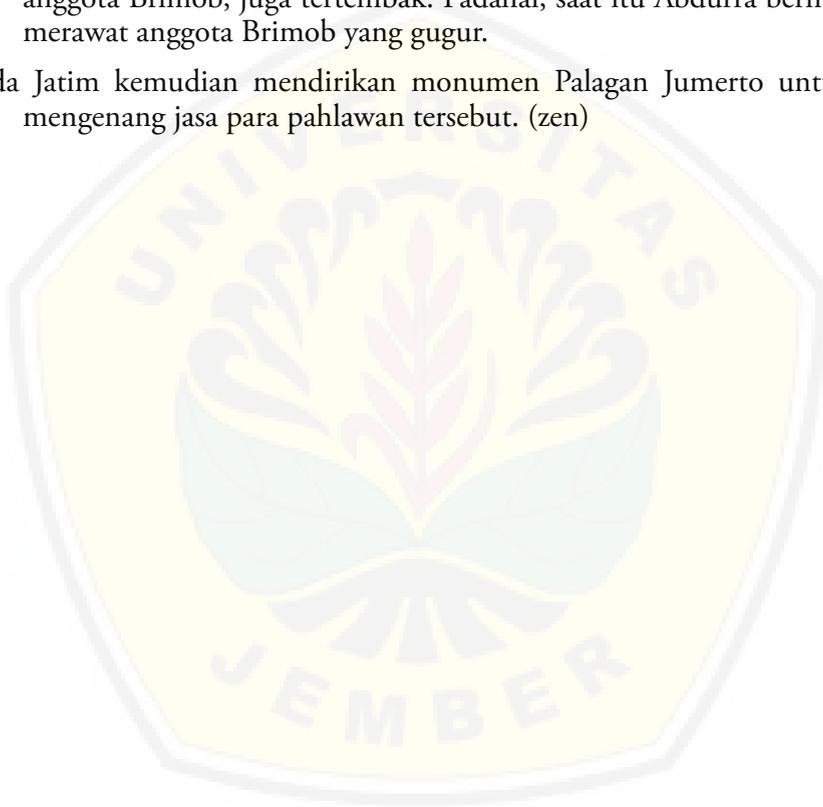
Saat ketemu Pak Yakub, salah seorang anggota Brimob meminta ditunjukkan rumah kepala desa. Memang, selama perjalanan, mereka pasti mampir di rumah perangkat desa setempat. Termasuk saat datang ke Desa Jumerto. “Oleh Pak Yakub, mereka diajak ke rumah sesepuh desa bernama Pak Asmar,” ujarnya. Pak Asmar merupakan kakek Suhadi.

Nah, saat itulah KNIL -tentara bentukan Belanda- ternyata juga datang ke Desa Jumerto. Mereka membagi-bagikan gula untuk mengambil hati warga Jember. Kedatangan tentara KNIL tersebut tidak disadari anggota Brimob.

Paginya, tentara KNIL yang bersenjata lengkap langsung menyerbu 13 anggota Brimob yang sedang beristirahat. Mendapatkan serangan tiba-tiba, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka dengan mudah dihabisi.

Ratusan warga yang berniat menolong akhirnya juga menjadi korban. Setidaknya 20 warga Desa Jumerto tewas karena ditembus peluru tentara KNIL. Abdurra, anak Pak Asmar yang mengantarkan anggota Brimob, juga tertembak. Padahal, saat itu Abdurra berniat merawat anggota Brimob yang gugur.

Polda Jatim kemudian mendirikan monumen Palagan Jumerto untuk mengenang jasa para pahlawan tersebut. (zen)



Glosarium

- Agresi militer** : Serangan atau penyerangan suatu Negara terhadap Negara lain dalam bentuk penyerangan militer (kekuatan angkatan bersenjata). Pemerintah Belanda pernah melakukan serangan ke Indonesia yang baru menyatakan kemerdekaannya, serangan militer terjadi sekitar tahun 1945-1950-an. Alasan pemerintah Belanda adalah, daerah Indonesia merupakan daerah Hindia Belanda yang diserahkan kepada pemerintahan militer Jepang pada tahun 1942. Pada saat pemerintah militer Jepang bertekuk lutut kepada pasukan sekutu, maka pemerintahan Hindia Belanda merasa masih berhak untuk menguasai wilayah yang pernah diserahkan kepada Jepang tahun 1942.
- Bambu runcing** : Bambu yang diruncingkan ujungnya, digunakan sebagai senjata perang oleh bangsa Indonesia terutama perang gerilya era perang kemerdekaan.

Sampai sekarang bamboo runcing menjadi simbol keberanian bangsa Indonesia

- Diplomasi : Urusan atau penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu Negara dengan Negara lainnya. Pada awal kemerdekaan, pemerintahan Republik Indonesia menggunakan taktik perjuangan diplomasi untuk mendapatkan pengakuan dunia Internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia.
- Divisi Siliwangi : Divisi Siliwangi merupakan divisi yang dibentuk oleh Pemerintahan Republik Indonesia pada awal kemerdekaan, sebagai bagian dari Tentara Nasional Indonesia. Setelah Perjanjian Renville ditandatangani oleh pemerintahan Belanda dan Pemerintahan Republik Indonesia, maka Republik Indonesia hanya meliputi sebagian kecil wilayah Nusantara, yaitu Jawa dan sebagian kecil Sumatra. Akibat lainnya adalah Divisi Siliwangi harus meninggalkan kantong-kantong gerilya dan daerah benteng pertahanan di Jawa Barat menuju pusat pemerintahan Republik Indonesia di Jawa Tengah, Sementara yang berada di Bondowoso hijrah ke Blitar.
- Gerilya : Cara berperang yang tidak terikat secara resmi pada ketentuan perang. Taktik perang gerilya diajar kepada bumiputera oleh pemerintahan militer Jepang pada masa pendudukan Jepang. Perang gerilya dilakukan oleh bangsa Indonesia era revolusi fisik, untuk melawan tentara

Belanda. Serangan dilakukan tiba-tiba dan secara sembunyi-sembunyi tidak terbuka, terutama di daerah terpencil atau di daerah pegunungan.

Keibodan

Korppemuda yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang tanggal 29 April 1943. Anggota Keibodan berumur antara 23 tahun sampai 30 tahun. Tugasnya menjaga keamanan di daerah masing-masing juga berkewajiban mengawasi peraturan kebijakan ekonomi era Jepang agar tidak terjadi pelanggaran.

KNIL

: Koninklik Nederlandsch Indisch Leger. KNIL dibentuk pada tahun 1830 oleh Gubenur Jendral Johannes van den Bosch, setelah terjadi Perang Jawa (perang antara pemerintahan Hindia Belanda dengan Pangeran Dipenogoro). Tujuannya agar pemerintahan Hindia Belanda memiliki pasukan militer sendiri yang dapat diandalkan dalam menumpas pemberontakan. Pada abad ke-19 awal abad ke-20 KNIL melakukan peperangan dengan beberapa Negara pribumi luar Pulau Jawa. Akan tetapi peran utamadari KNIL adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban (rust en order). Korp KNIL didominasi oleh orang Belanda, baru pada akhir abad ke-20 KNIL menerima bumiputera dalam jumlah kecil.

Kolonialisme

: Pengertian koloni adalah daerah atau wilayah. Kolonial adalah negara yang menganeksi daerah lain berkaitan dengan eksploitasi sumberdaya manusia dan sumberdaya alamnya. Kolonialisme

adalah faham yang berkaitan dengan penguasaan daerah lain yang tidak terlepas dari kepentingan menguasai sumberdaya alam ataupun sumberdaya manusia daerah yang dikuasainya.

Laskar : Pada awalnya merujuk pada milisi atau pembela tanah air. Istilah ini selama revolusi digunakan untuk menyebut kesatuan-kesatuan bersenjata yang terorganisasi dengan baik dan mendukung republik, akan tetapi tidak mau dimasukkan ke dalam Angkatan Darat. Mayoritas laskarnya menolak bernegosiasi dengan Belanda dan lebih menyukai kebijakan perjuangan bersenjata.

Long March : Dalam pengertian biasa merupakan gerak jalan jarak jauh. Akan tetapi, bagi bangsa Indonesia long march mempunyai arti simbolis dan nasionalisme yang tinggi. Long march mempunyai latar belakang sejarah patriotisme bangsa. Perjanjian Renville yang telah disetujui oleh pemerintah Indonesia dengan Belanda mengakibatkan pasukan Siliwangi harus meninggalkan kantong gerilya di Jawa Barat menuju kantong pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta Jawa Tengah. Dalam proses long march inilah banyak peristiwa penting yang dialami oleh para pejuang beserta keluarganya, karena perjalanan panjang yang melelahkan, di samping harus menjaga ketahanan fisik dalam perjalanan juga harus waspada, karena tentara Belanda secara tiba-tiba melakukan serangan. Dengan demikian, long

march merupakan symbol kesetiaan dan perasaan nasionalisme yang tinggi dari TNI.

Mesianisme : Faham yang berkaitan dengan kelahiran pemimpin baru yang dapat mensejahterakan kehidupan rakyat.





Indeks

A

Abdulkadir Wijoyoatmo 53

Ahmad Soebardjo 45, 45–88

Amir Syarifuddin 53, 54, 55–54,
55, 60

B

Balung 47

Banaran 13–12, 92–105, 130

Bandung 11, 11–24, 11–24, 11–
24, 11–24, 36–42, 45–88,
57–88, 125, 130, 148

Banyuwangi 41, 47, 71, 101

Batalyon Anjing Laut 102

Ben Anderson 11, 12–24, 46–88

Besuki 3–8, 23–22, 39, 40, 41,
42–41, 47, 48, 49, 49–88,
51–50, 52–88, 68, 70–88,
71, 72, 73, 74–73, 83, 93,
101, 107, 108–107, 119, 125,
127, 148–147, 149

Bondowoso 41, 44, 47, 49–88,
51–50, 51–88, 51, 51, 52,

54–53, 71–88, 72–88, 80–
88, 81–88, 83–105, 84, 84–
105, 86–105, 90, 90–105,
90–105, 91, 93–105, 94–
105, 95–105, 96–105, 97–
96, 97–105, 101–105, 102,
102–105, 102–105, 122,
123–122, 126, 129, 132, 136

D

Divisi Siliwangi 54–53, 63, 68,
76, 77, 80, 136

F

FDR 57–56, 57, 57, 57, 57, 58,
59–58, 59, 59, 60

G

Garahan 47

Gerbong Maut 49–88, 51–88,
102–105, 111–123, 126, 129

H

Hatta 28, 35–34, 44, 44–88, 45,
55, 55–88, 56–55, 56, 56, 56,

57–56, 57, 57, 57, 58–57,
58, 58, 58, 58, 58, 58, 59–58,
60, 61, 62, 66, 68, 68–88, 83,
83–105, 126, 129, 131

Heroisme 116

Historical actors 18, 18–150,
111–110, 111–150

I

Indonesianis 11

J

Jawa Timur 5, 11, 12, 12–24, 13–
24, 48–88, 49–88, 60, 63, 68,
70, 71–70, 71, 71, 72–88, 73,
74–73, 74–88, 76, 84–105,
97–105, 111–123, 113–112,
114, 116, 119–123, 127,
129, 130, 133

Jember 1, 2, 5, 7, 8, 13, 14, 19,
22, 23–22, 32–42, 39, 40–
39, 41, 42–41, 42, 42, 42, 47,
49–88, 51–88, 52, 52–88,
52–88, 52–88, 54–88, 71,
83–105, 85–105, 87–105,
88, 88–105, 89–105, 91–
105, 93, 94–105, 95, 95–105,
96–105, 97–105, 98–105,
99–105, 101, 102–101, 107,
108–123, 110, 111, 119–123,
120–119, 121, 122, 123–122,
126, 127, 128, 129, 130, 132,
133, 147, 148–147, 148, 149

Jendral Sudirman 49–88, 127

Jusuf Jayengrono 74–73, 75–74,
78, 80

K

Kantong Gerilya 4–8, 83

Klabang 51

Kompleksitas sejarah 15

L

Linggarjati 48, 49–48, 62

Long march 122, 138

M

Maesan 52–51, 84, 91, 97–96,
102–101, 102, 122

Magenda 51–50, 51, 52–51, 102

Masyumi 54, 55–54, 56–55, 57–
56

Mayor Waraou 51–50

Mobile Brigade Polisi 4–8, 7, 23–
22, 43, 44–43, 44, 51, 65, 68,
69, 70–69, 73–72, 81–80,
83, 84, 85, 87, 89–88, 89, 90,
91–90, 91, 92, 93, 94, 95, 97,
98, 100, 101–100, 101, 101,
101, 101, 101, 102–101, 102,
107, 108, 108–123, 109, 119,
122, 123–122, 123, 124–123

N

NICA 48

O

Operasi Produk 48

P

PALAGAN JOMERTO 1, 2, 4–8,
105

- Patriotisme 19, 36, 42, 116
Patroli 48, 89, 93, 94, 98, 107, 123, 133
Pedesaan 9, 10–24, 12, 13–12, 28, 30, 33, 36, 39, 40, 52, 87, 92, 99, 109, 110–109, 123
Perang Asia Timur Raya 11, 34, 35–34
Perkotaan 12, 28, 33, 36, 39, 109
Pesindo 60, 60–88, 60–88, 60–88, 63, 65, 131
PETA 28–42, 34–33, 34, 35–34, 35, 35, 35, 35, 36, 45–88, 111–123, 128
PNI 55–54, 56–55
- R**
Rakyat 12–24, 28, 40–39, 49–88, 57–56, 61–88, 63–88, 84–105, 87, 98, 99, 106–123, 126, 127, 128, 131
Rekonstruksi
Renville 53, 54–53, 54, 54, 54, 62, 63, 73, 84–83, 84, 107, 123–122, 136, 138
Reorganisasi dan rasionalisasi 57
Revolusi Agustus 61–60, 61
Revolusi fisik 42, 105, 110, 136
Revolusi sosial 46–45
Romusha 34
- S**
Seinendan 30, 31–30
Sekutu 11–10, 11, 11, 11, 12, 26, 30, 45, 47, 48, 72, 122
Semarang 11, 11–24, 11–24, 46–45, 70–88, 126, 127, 149
Situbondo 41, 47, 49, 51–50, 71, 101
Sjafruddin Prawiranegara 57–56
SOBSI 60, 60–88, 131
Soekari 52–51, 71, 71–88, 72, 72–88, 74–73, 74, 76–75, 78, 79–88, 80, 80–88, 81–88, 83, 83–105, 83–105, 84–105, 85, 86–105, 87, 88–87, 88, 88, 89, 90–89, 90–105, 90–105, 90, 91, 92, 93–105, 94–105, 95–105, 96, 96–105, 97, 97–105, 101–105, 102, 102–105, 102–105, 132
Soekarno-Hatta 44, 45, 68–88, 131
Soetjipto Joedodihadjo 47
Surabaya 11, 11–24, 11–24, 12, 13–12, 39, 46, 47, 48–88, 70–88, 71, 72–71, 72–88, 72, 72, 72, 73, 74–73, 74–88, 97–105, 108–107, 119–123, 127, 129, 130
- T**
TLRI (Tentara Laut Republik Indonesia) 51–50
TRI (Tentara Republik Indonesia) 51–50
- V**
Vacuum of power 45

Van Mook 53, 63

W

William H. Frederick 11–24, 12



Biodata Penulis



Prof.Drs. Nawiyanto, M.A., Ph.D. Lahir di Klaten pada tahun 1966. Saat ini menjabat sebagai Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. Memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada (1990), MA dari Faculty of Asian Studies, The Australian National University (2000), doktor sejarah dari Division of Pacific and Asian History, Research School of Pacific and Asian Studies (RSPAS), The Australian National University (2007). Beberapa buku yang dihasilkan di antaranya: *Kesultanan Palembang Darussalam Sejarah dan Warisan Budayanya*. (Jember: Jember University Press, 2016) *Melacak Jejak Pejuang: Biografi R.H. Noerdhin Soetawidjaja* (Yogyakarta: Galang Press, 2015). *Pangan, Makan dan Ketahanan Pangan: Konsepsi Etnis Jawa dan Madura* (Yogyakarta: Galang Press, 2011), *The Rising Sun and the Bamboo Curtain: Japanese and Chinese Trade Competition in Java during the 1930s and the 1990s Crises* (Jember: Jember University Press, 2010), *Matahari Terbit dan Tirai Bambu: Persaingan Dagang Jepang –Cina di Jawa Pada Masa Krisis 1930-an dan 1990-an* (Yogyakarta: Ombak, 2010),

The Development of Plantations in Jember during the Late Colonial Period (Bantul: Lembah Manah, 2008), *Agricultural Development in a Frontier Region of Java: Besuki, 1870 – Early 1990s, second edition.* (Yogyakarta: Galangpress, 2006), *The Rising Sun in a Javanese Rice Granary: Change and Impact of Japanese Occupation on the Agricultural Economy of Besuki, 1942-1945* (Yogyakarta: Galangpress, 2005).



Lahir di Bandung 1960. Riwayat pendidikan, menyelesaikan strata satu di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Pajajaran Bandung tahun 1984. Program Magister dengan program studi Sosiologi Antropologi Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Padjadjaran Bandung selesai tahun 2002. Program doktor bidang kajian prodi Sejarah Fakultas Sastra Universitas

Pajajaran tahun 2012. Sejak tahun 1986 menjadi dosen di Universitas Jember.

Karya dalam bentuk penelitian di antaranya : Ritus Kehamilan Masyarakat Madura tahun 1990. Pandangan Masyarakat Madura dan Jawa tentang Uang dan Utang (Ketua, 2015/2016).

Buku :Sejarah Kota (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta tahun 2013. “Kepemimpinan Di Indonesia dalam Perspektif History”, dalam *Kepemimpinan di Indonesia dalam Perspektif Sejarah dan Budaya*, tahun 2013. “Etnisitas dan Nasionalisme dalam Perspektif Sejarah” dalam *Dinamika Budaya Indonesia dalam Pusaran Pasar Global*. Yogyakarta: Ombak tahun 2014. “ Revitalisasi Budaya Seni dan Sastra Cina Pasca Orde Baru”, dalam *Jejak Langkah Perubahan dari Using sampai Indonesia*. Ombak Yogyakarta tahun 2016.

Artikel Jurnal: Bumiputera, Kredit, dan Permasalahannya pada Masa Hindia Belanda (1900-1942). *Historia* Vol.7 No. 2 Desember 2012. “Makna dan Fungsi Uang dalam Perseptif Sejarah”. *Historia* Vol.8 No. 1 Juni 2013. “Bahasa Dalam Dinamika Sosial Budaya di Indonesia. *Historia* Vol.9 No. 1 Juni 2015. “Uang dan Budaya Utang di Eks Keresidenan Besuki dalam Lintas Sejarah”. *Paramitha: Historical Social Studies Journal*. Vol 26 No.2 tahun 2016.

Dra. Dewi Salindri, M.Si.



Lahir di Semarang 06 November 1962 Alumnus S1 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Diponegoro 1986, S2 Jurusan Ilmu Budaya Fakultas Sastra Universitas Udayana tahun 2012. Menjadi Dosen di Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Jember sejak 1988 sampai sekarang. Beberapa penelitian dan buku yang pernah ditulis antara lain *Dinamika Frontir Perikanan Laut Di Karesidenan Besuki Sejak Era Kolonial Hingga Orde Baru*, Dikti, 2010; “Masa Politik Konservatif Ke Politik Liberal: Studi Tentang Kedudukan Bupati Jawa Abad IX; *Jurnal Historia*, Juli – Desember 2009 Vol IV No. 2. *Sejarah Kebudayaan Indonesia*, Kurnia Kalam Semesta: Yogyakarta, 2013. *Peranan Guru Pada Masa Kolonial Belanda*, *Jurnal Historia* Vol. 9 Juni 2015.

